

**SEJARAH PERLAWANAN
TERHADAP KOLONIALISME
DAN IMPERIALISME
DI KALIMANTAN TIMUR**

Direktorat
dayaan

3

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PEKERJAAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991**

959. 838

P10

5

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI KALIMANTAN TIMUR

Tim Penulis :
Fidy Finandar
M. Noor ARS.
Hasjim Ahmad
Sjahrial Hanan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991

Penyunting :
R.Z. Leirissa
Sutrisno Kutoyo
M. Soenjata K.

**Koreksi Naskah
Soejanto**

Cetakan Pertama : Tahun 1983
Cetakan Kedua : Tahun 1991
Penerbit : Proyek IDSN
Pencetak : CV. Tumaritis

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Nopember 1991

Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1983 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian mengenai perjuangan rakyat Kalimantan Timur dalam usahanya untuk menentang sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing, baik berupa perlawanan fisik maupun non-fisik yang mereka lakukan pada masa pergerakan nasional. Pengalaman-pengalaman mereka itu merupakan modal yang sangat berharga dalam usahanya untuk mengujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkaitan dengan kandungan isi buku ini, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "butuh baca" sangat berminat untuk memilikinya. Sementara itu persediaan buku cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instansional.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional memberikan kepercayaan pada Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebarluasan buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Nopember 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional



Dra. Sri Sutjatningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .	iii
PENGANTAR CETAKAN KEDUA	v
DAFTAR ISI.	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Prosedur dan Pertanggungjawaban Penelitian	6
Bab II Perlawanan Rakyat di Kerajaan Pasir terhadap	
 Imperialisme dan Kolonialisme Tahun 1800 --	
 1907	9
2.1 Identifikasi	9
2.2 Pertumbuhan Kerajaan Pasir	10
2.3 Masuknya Kekuasaan Belanda di Pasir	11
2.4 Latar Belakang Perlawanan	15
2.5 Sebab-sebab Perlawanan	16
2.6 Perlawanan Pangeran Panji	27
2.7 Akibat Perlawanan Rakyat di Kerajaan Pasir ter-	

hadap Imperialisme dan Kolonialisme Tahun 1800–1907	32
Bab III Perlawanan Rakyat di Kerajaan Kutai terhadap Imperialisme dan Kolonialisme	35
3.1 Identifikasi	35
3.2 Pertumbuhan Kerajaan Kutai	36
3.3 Kerajaan Kutai Kertanegara	39
3.4 Hubungan dengan Kerajaan-kerajaan di Nusantara	42
3.5 Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme	43
3.6 Perlawanan sejak Tahun 1800	47
3.6.1 Perlawanan pada Tahun 1825	47
3.6.2 Perlawanan terhadap Inggris Tahun 1844	47
3.6.3 Perlawanan terhadap Belanda Tahun 1844	50
3.6.4 Akibat Perlawanan Rakyat di Kerajaan Kutai terhadap Imperialisme dan Kolonialisme	55
3.7 Perlawanan Rakyat Samarinda	56
3.7.1 Lahir dan Berkembangnya Kota Samarinda	56
3.7.2 Perlawanan dalam Abad Ke-19	63
3.7.3 Perlawanan pada Zaman Pergerakan Rakyat	64
3.7.3.1 Sarikat Islam	65
3.7.3.2 Muhammadiyah	65
3.7.3.3 Nahdlatul Ulama	65
3.7.3.4 Persatuan Bangsa Indonesia (PBI)	66
3.7.3.5 Partai Indonesia Raya (Parindra)	66
3.7.3.6 Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)	67
3.7.3.7 Penyadar	68
3.7.3.8 Gabungan Politik Indonesia (Gapi)	68
3.7.3.9 Majelis Islam ala Indonesia (MAI)	69
3.7.4 Perlawanan pada Zaman Jepang	70
Bab IV Perlawanan Rakyat di Kerajaan Berau terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Tahun 1673--1945	75

4.1	Identifikasi	75
4.2	Pertumbuhan Kerajaan Berau	77
4.2.1	Zaman Sriwijaya	77
4.2.2	Zaman Majapahit	78
4.2.3	Hubungan dengan Kerajaan Wajo, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Sulu Filippina Selatan.....	80
4.2.3.1	Hubungan dengan Kerajaan Wajo Sulawesi Selatan	80
4.2.3.2	Hubungan dengan Kerajaan Kutai	81
4.2.3.3	Hubungan dengan Kerajaan Sulu Filippina Selatan	81
4.2.3.4	Sosial Budaya dan Ekonomi	81
4.3	Kedatangan Imperialisme dan Kolonialisme Spanyol dan Belanda	82
4.3.1	Kedatangan Spanyol di Berau	82
4.3.2	Kedatangan VOC di Kerajaan Berau	82
4.4	Jalannya Perlawanan terhadap Hindia Belanda (1800 -- 1942)	83
4.5	Perlawanan HA. Kuning Gunung Tabur	89
4.6	Perlawanan Abad Ke-20 (1900 -- 1945) : Perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda	91
4.7	Perlawanan terhadap Pemerintah Jepang (1942 -- 1945)	96
4.7.1	Perlawanan di Kampung Biduk-biduk, Kecamatan Talysayan	100
4.7.2	Perlawanan di Kampung Talassau, Kecamatan Gunung Tabur	101
4.7.3	Akhir Masa Jepang	101
Bab V Penutup.....		105
Daftar Pustaka.....		106

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan Timur terletak antara 119 BT, 114 BT dan antara 4,2° LU, 23° LS. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur, sebelah selatan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah Timur dengan Selat Makasar, dan sebelah barat dengan Malaysia Timur.

Luas daerah Kalimantan Timur 211.440 km, dibagi empat daerah kabupaten dan daerah kotamadya, 69 kecamatan dan 1.057 kampung, yaitu Kotamadya Samarinda, Kotamadya Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Berau, Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Bulungan. Pembagian wilayah administrasi ini tidak terlepas dari sejarah masa lampau daerah ini.

Kotamadya Samarinda dibangun sejak tahun 1668 oleh orang-orang Bugis yang bermigrasi ke Kalimantan Timur di bawah pimpinan Pua Ade La Mohang Daeng Mangkona.¹ Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan Belanda. *Af-deeling Oost Borneo*, dan akhirnya menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Kotamadya Balikpapan semula merupakan kampung yang kemudian menjadi kota minyak sejak tahun 1898, yakni setelah di daerah ini ditemukan sumber minyak. Mula-mula dikelola oleh *Nederlandsche Industrie Handelsmaatschappij* (Amsterdam), kemudian pada tahun 1907 diambil alih oleh BPM (*Bataafsche Petroleum Maatschappij*).

Pada tahun 1959, sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, Daerah Istimewa Kutai dipecah menjadi tiga daerah, yakni Kabupaten Kutai, Kotapraja Samarinda, dan Kotapraja Balikpapan.

Pada sekitar abad ke-15 di daerah Kalimantan Timur telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, yakni Kesultanan Kutai, Kesultanan Pasir, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan. Pertumbuhan kerajaan-kerajaan ini tak dapat dipisahkan dengan tiga peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah tanah air kita dalam abad ke-15 dan 16.

Pertama, adalah jatuhnya Kerajaan Mojopahit, sebuah kerajaan yang bercorak Hindu yang telah pernah mempersatukan wilayah Indonesia dengan kekuatan armada lautnya. tetapi setelah kerajaan ini runtuh, daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan berusaha melepaskan diri.

Kedua, perkembangan Agama Islam yang berpusat di tepi pantai. Agama ini berkembang perlahan-lahan tetapi secara mantap disiarkan lewat perdagangan. Kemakmuran yang dinikmati oleh penduduk kota-kota pantai dari hasil perdagangan yang sangat berkembang pesat menimbulkan tendensi untuk melepaskan diri dari penguasa di pedalaman yang hidup dari pertanian.

Ketiga, semakin meningkatnya permintaan rempah-rempah Indonesia oleh dunia internasional dan Eropa khususnya. Daerah Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil lada, garu, beras, rotan, teripang, sarang burung, getah perca, dan kayu. Besi dan batu bara yang penting bagi perindustrian sudah diketemukan pada tahun 1851 di Pulau Tarakan. Hasil tambang ini juga diperlukan dalam dunia perdagangan.

Keadaan alam daerah Kalimantan Timur belum banyak mengalami perubahan. Alamnya yang masih diliputi oleh hutan belantara yang lebat dengan berbagai jenis kayunya. Rawa-rawa dan sungai-sungai yang lebar-lebar dan panjang bermuara ke

laut. Sungai-sungai besar di Kalimantan Timur merupakan pusat-pusat kegiatan hidup manusia sejak dahulu sampai sekarang. Kabupaten Kutai dengan Sungai Mahakamnya, terletak kota-kota Samarinda, Tenggarong, dan Muara Kaman merupakan pusat-pusat pemerintahan sejak zaman dahulu Sungai Berau yang mengalir di daerah Kabupaten Berau, terletak Kota Tanjung Redeb yang dahulu menjadi pusat Kerajaan Sambaliung dan Gunung Tabur Kota Tanjung Selor ibukota Kabupaen Bulungan sekarang terletak di Sungai Kayan. Sungai Kayan yang mengalir di Kabupaten Bulungan, terletak Kota Tanjung Palas yang dahulu sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Bulungan. Tanjung Selor sebagai ibukota *Afdeeling Bulungan* dan Berau, sekarang menjadi ibukota kabupaten. Pasir Belengkong yang dahulu merupakan ibukota Kerajaan Pasir dan Tanah Grogot sebagai ibukota Kabupaten Pasir sekarang terletak di tepi Sungai Kandilo. Sungai bagi penduduk daerah Kalimantan Timur sangat penting karena merupakan satu-satunya prasarana perhubungan.

Penduduk Kalimantan Timur dapat diklasifikasi dalam dua bagian, yaitu penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli adalah Melayu Muda (*Deutro Melayu*), seperti suku bangsa Tidung, Bulungan, Berau, Kutai dan Pasir dan suku bangsa Dayak yang mendiami daerah pedalaman, antara lain suku bangsa Benuaq, Basao, Bukat, dan lain-lain. Penduduk pendatang yang sering mereka sebut orang Haloq digolongkan ke suku bangsa Banjar, Bugis, Jawa, Manado, Madura, dan lain-lain.

Agama yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Timur umumnya adalah Agama Islam. Penganut-penganutnya mendiami daerah sepanjang pantai dan muara-muara sungai. Penganut-penganut agama yang bersifat kesukuan pada umumnya adalah penduduk asli yang mendiami daerah pedalaman yang kini banyak pula yang memeluk agama baru tersebut. Kalimantan Timur menjadi sangat penting pada abad ke-19 setelah diketemukannya tambang batubara dan minyak. Suatu peris-

tiwa yang memaksa Belanda untuk mengubah politiknya terhadap daerah Kalimantan Timur adalah ketika James Brooke, seorang avonturir Inggris, berhasil mendapatkan daerah Serawak pada tahun 1840 dengan sewa 20.000 dollar setahun dari sultan Brunei, yang kemudian diakuinya sebagai miliknya sendiri. Sultan Brunei pada tahun 1846 menyerahkan Labuhan kepada Pemerintah Inggris.² Walaupun Pemerintah Belanda mengadakan protes, tetapi tidak berhasil seperti halnya ketika Inggris menduduki Singapura.

Untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti itu, maka Pemerintah Belanda mengadakan perluasan wilayah ke arah Kalimantan Timur yang masih berdaulat dan merdeka. Walaupun sejak tahun 1817 antara Banjarmasin dan Belanda telah ada perjanjian yang antara lain menyebutkan bahwa wilayah Pasir, Kutai, dan Berau diserahkan kepada Belanda, perjanjian itu hanyalah merupakan tanda formal bahwa Pemerintah Hindia Belanda berkuasa atas wilayah Kalimantan Selatan sampai ke Kalimantan Timur, tetapi kedudukan serta kekuatan Belanda belum berarti apa-apa sehingga residen hanya merupakan lambang politik belaka. Keadaan ini berubah dengan adanya usaha negara-negara Eropa lainnya (Inggris) untuk mencari hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur yang memaksa Pemerintah Belanda mengubah politiknya ke arah penguasaan langsung atas wilayah Kalimantan Timur. Agar bisa mencegah meluasnya imperialisme lainnya ke wilayah Kalimantan Timur, pada tahun 1846 Pemerintah Hindia Belanda mengangkat asisten residen yang pertama H. Van Wall di Palaran. Pada tahun 1896 Samarinda dijadikan pusat pemerintahan *Afdeeling Oost Borneo*.³ Belanda mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di daerah Kalimantan Timur agar mengakui kekuasaan Belanda atas wilayahnya, memberikan izin kepada Belanda untuk membuka tambang batubara, dan memberikan konsesi pertambangan minyak tanah misalnya di Sanga-sanga pada tahun 1889.

Hubungan antara Pemerintah Belanda dengan kerajaan-kerajaan di daerah Kalimantan Timur diatur dalam surat perjanjian yang disebut Perjanjian Pendek (*Korte Verklaring*) dan Perjanjian Panjang (*Lange Verklaring*). Bagian selatan dan timur Pulau Kalimantan diperintah oleh seorang komisaris yang berkedudukan di Banjarmasin, dibantu seorang residen, asisten residen, dan kontrolir. Jabatan-jabatan ini kadang-kadang diduduki oleh opsir militer.

Di Kalimantan Timur, residen Banjarmasin dibantu oleh dua orang asisten residen yang berkedudukan di Samarinda dan di Tanjung Selor.

Afdeeling Samarinda terbagi atas tiga *onderafdeeling*, yaitu : (1) *Onderafdeeling Kutai* dengan ibukota Tenggarong, (2) *Onderafdeeling Hulu Mahakam* dengan ibukota Long Iram, dan (3) *Onderafdeeling Pasir* dengan ibukota Tanah Grogot. *Afdeeling Bulungan* dan *Berau* dengan ibukota Tanjung Redeb (2) *Onderafdeeling Bulungan* dan *Tidung* dengan ibukota Tanjung Selor, dan (3) *Onderafdeeling Apo Kayan* dengan ibukota Long Nawang.

Daerah pedalaman yang didiami oleh suku-suku bangsa Dayak, pemerintahannya tetap dikepalai oleh kepala-kepala suku menurut petunjuk yang diberikan pegawai sipil militer.

Perlawanan rakyat Kalimantan Timur terhadap kolonialisme dan imperialisme dimulai sejak VOC berusaha memonopoli perdagangan pada pertengahan abad ke-17. Agama Islam menjadi anutan bagi kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur dan merupakan dasar-dasar aturan kerajaan serta turut menentukan perlawanan terhadap Belanda dan merupakan kekuatan penggerak masa rakyat untuk menentang penjajahan yang dianggap sebagai orang kafir. Prinsip perlawanan sebenarnya adalah semangat kemerdekaan terhadap belenggu penjajahan. Semangat itu tetap subur hingga perang kemerdekaan.

1.2 Tujuan Penelitian

Buku-buku sejarah Indonesia yang diajarkan baik di tingkat

sekolah dasar maupun di tingkat perguruan tinggi belum mencakup seluruh Nusantara. Sejarah perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah Kalimantan Timur ini bertujuan mengungkapkan aktivitas bangsa Indonesia di daerah itu melawan penjajahan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional.

1.3 Ruang Lingkup

Imperialisme adalah suatu paham atau cita-cita untuk menaklukkan negeri lain guna kebesaran, kemakmuran dan kejayaan bangsa penakluk dengan tidak mengindahkan nasib bangsa yang ditaklukkannya. Imperialisme bukanlah orang atau bangsa, akan tetapi paham dan cita-cita yang dianut oleh sesuatu bangsa yang selalu berusaha untuk menaklukkan dan memeras bangsa dan negeri lain. Menurut J.S. Barstra dalam bukunya yang berjudul *Geschiedenis van het Moderne Imperialisme 1880 - 1890*, imperialisme adalah suatu keinginan akan menambah tanah-tanah jajahan untuk memperbaiki perniagaan, kerajinan dan perusahaan serta menambah kekayaan dalam negeri sendiri, seperti kelihatan dengan jelas dalam tahun 1880 - 1906 dari sikap politik negeri-negeri yang terbilang besar di tanah Eropa. Salah satu pendukung paham itu adalah bangsa Belanda. Politik penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia yang ada di kawasan Kalimantan Timur dari abad ke-17 sampai tahun 1942. Selanjutnya akan diuraikan sekilas lanjutan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan Jepang

1.4 Prosedur dan Pertanggungjawaban Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sumber-sumber bacaan, arsip-arsip serta dokumen yang ada di daerah ini yang dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang kejadian pada masa lampau. Di samping itu juga digunakan metode wawancara terhadap orang-orang yang berpengetahuan

tentang sejarah di Kalimantan Timur atau keturunan dari raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Pasir untuk sejarah Kerajaan Pasir, Kabupaten Kutai untuk sejarah Kerajaan Kutai yang berpusat di Kota Tenggarong, Daerah Tingkat II/Kabupaten Berau bekas Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung serta Daerah Tingkat II/Kabupaten Bulungan bekas Kerajaan Tidung dan Bulungan yang berpusat di Tanjung Selor. Dua kotamadya masing-masing Samarinda dan Balikpapan yang merupakan pusat kegiatan pada masa penjajahan sebagai ibukota keresidenan dan Balikpapan sebagai kota minyak, juga diteliti.

Sejak bulan Juli telah disusun rencana dan pengumpulan bahan-bahan informasi yang ada di Kota Samarinda. Kemudian pada bulan September diadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi-informasi yang belum lengkap terutama di daerah Berau dan Bulungan. Pada bulan Oktober sampai bulan Nopember dilakukan penulisan.

CATATAN

1. Kirana. Ranreng Daeng Risompa, *Catatan Sejarah Ringkas Kedatangan Orang Bugis di Samarinda*, Koleksi Mohd. Noor, ex Asisten Perwakilan P dan K Propinsi Kaltim di Samarinda.
2. Krom J. S., *Memorie Overgave en overname*, Ktr Controleur Tanjungredeb, 1940.
3. DR. J. Eisenberger, *Kroniek Zuider en Ooster afdeeling van Borneo*, Banjarmasin, 1936, hal. 3.

BAB II PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN PASIR TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME TAHUN 1800 -- 1907

2.1 Identifikasi

Kerajaan Pasir pada zaman dahulu terletak di Daerah Tingkat II/Kabupaten Pasir. Daerah ini terletak pada bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Kabupaten Kota Baru, dan sebelah barat dengan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Daerah ini meliputi sembilan² kecamatan dan 92 kampung dengan luas wilayah 20.040 km². Wilayah ini pada umumnya terdiri atas dataran tinggi. Di dataran tinggi terdapat gunung-gunung seperti Gunung Lumut (1.233 m) dan Gunung Serampakan (1.300 m), sedangkan dataran rendah terdapat di kiri dan kanan sungai dan daerah pantai. Sungai yang mengalir di daerah ini antara lain Sungai Kandilo, Sungai Telake, Sungai Kuaro, dan Sungai Apad. Peranan sungai bagi daerah ini penting sekali bagi perhubungan antara daerah pedalaman dan pantai. Daerah Tingkat II Pasir adalah daerah yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kaliman-

tan Selatan. Hubungan ke luar lewat laut dilakukan melalui Pelabuhan Tanah Grogot yang terletak di tepi Sungai Kandilo.

Suku bangsa Pasir membangun desa di tempat yang sulit dicapai oleh orang. Umumnya rumah-rumah dan perkampungan mereka bangun di tengah-tengah hutan atau di tepi sungai. Kebiasaan hidup mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan pola perladangannya. Suku bangsa Pasir terkenal dalam hal membuat keris beracun dan membuat racun yang sangat berbahaya.

2.2 Pertumbuhan Kerajaan Pasir

Setelah Kerajaan Majapahit berkurang kewibawaannya, di daerah-daerah berdirilah kerajaan-kerajaan kecil seperti Kutai, Berau dan Pasir, yang menurut Dr. J. Eisenberger dalam *Kroniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*, terjadi pada awal abad ke-15. Menurut cerita rakyat, raja yang pertama memerintah di Kerajaan Pasir adalah seorang wanita bernama Putri Petung. Pusat pemerintahan berkedudukan di Sadorangas di hulu Sungai Kandilo. Pada tahun 1569 Agama Islam mulai berkembang di Kerajaan Sadorangas dan akhirnya menjadi agama kerajaan. Ratu Aji Putri Petung digantikan oleh putranya, Aji Mas Pati Indra (1600 -- 1624), dan kemudian digantikan Pangeran Anom Singa Maulana (1644 -- 1707). Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad, Kerajaan Pasir selalu mendapat gangguan dari Suku bangsa Dusun dan Hulu Sungai. Perintah untuk memagar dan membuat kubu pertahanan dilaksanakan rakyat dengan sebaik-baiknya, tetapi sebelum pagar dan kubu itu selesai, Kerajaan Pasir diserang oleh rakyat Hulu Dusun dan Hulu Sungai. Rumah-rumah dibakar dan harta dirampas, termasuk Keraton Pasir yang indah juga turut terbakar.

Karena itu, Sultan Aji Muhammad beserta rakyatnya berpindah ke hilir Sungai Kandilo, mencari tempat yang aman yaitu di Pasir Benua dekat Pasir Belengkong. Di tempat inilah Sultan Aji Muhammad membuat perkampungan baru, mendirikan istana dan perumahan rakyat secara bergotong-royong.

Sejak saat itulah Pasir menjadi tempat kedudukan pemerintahan sultan Pasir.

2.3 Masuknya Kekuasaan Belanda di Pasir

Pada akhir bulan Desember 1816 datanglah ekspedisi Belanda ke Banjarmasin di bawah pimpinan J. Van Boeckholdz, yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda atas wilayah ini setelah Konvensi London. Pada 1 Januari 1817 ditandatangani suatu perjanjian yang meliputi 32 pasal, antara sultan Banjarmasin dengan J. Van Boeckholdz. Pasal atau artikel lima menentukan bahwa Pasir, Kutai, dan Berau diserahkan pada Belanda.¹ Atas dasar perjanjian itu Belanda merasa berkuasa atas wilayah Kerajaan Pasir. Kerajaan Pasir pada masa itu diperintah oleh Sultan Sepuh, putra Sultan Aji Muhamad. Pada waktu Sultan Sepuh memerintah, pertanian yang berupa perladangan dan perkebunan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat Pasir tiada kekurangan makanan. Meskipun demikian Sultan Sepuh merasa susah, karena Kerajaan Pasir telah beberapa tahun lamanya tunduk kepada Kerajaan Banjarmasin. Setiap tahun rakyat harus mengantar upeti kepada sultan Banjarmasin berupa sepuluh kati emas urai disertai dengan beras dan padi. Karena itulah Sultan Sepuh berkunjung ke Martapura menghadap sultan Banjar, meminta supaya upeti sepuluh kati emas itu dikurangi, karena pembayaran itu dirasa terlampau berat. Hal ini disebabkan Sungai Kandilo kerap kali banjir, sehingga pendulungan emas tidak dapat dilakukan.

Sultan memohon agar upeti itu dapat dibayar sekaligus dan Kerajaan Pasir dibebaskan dari kekuasaan Kerajaan Banjar. Dalam perundingan ini Sultan Sepuh mengemukakan beberapa alasan yang diterima sultan Banjar, yaitu upeti Kerajaan Pasir dapat ditebus sekaligus dengan setengah pikul (50 kati) emas urai dan pembayaran itu harus dilunasi dalam masa setahun.

Perjanjian ini diterima baik oleh kedua belah pihak dan Sultan Sepuh dapat membayar pada tahun berikutnya. Ketika Sultan Sepuh kembali ke Pasir, diadakanlah permusyawaratan

dengan rakyat Pasir. Sultan Sepuh meminta kepada rakyat yang menyimpan emas atau perhiasan emas, bilamana sampai waktunya akan mengantarkan upeti, dan ternyata kekurangan supaya menyerahkan emasnya itu ke Kerajaan Pasir.

Sejak saat itu, Sultan Sepuh memerintahkan rakyat Pasir, tua muda, laki-laki perempuan, dan anak-anak yang telah dapat menolong orang tuanya, agar bergotong royong mendulang emas di Sungai Kandilo untuk menebus Kerajaan Pasir dari Kerajaan Banjarmasin. Beribu-ribu rakyat Pasir beramai-ramai mendulang emas di Sungai Kandilo, sehingga dalam tempo satu tahun telah didapat hampir 100 kati emas.

Setelah sampai waktunya perjanjian, emas urai yang setengah pikul (50 kati), diserahkan kepada sultan Banjarmasin oleh Sultan Sepuh untuk menebus kerajaannya. Sejak saat itu, bebaslah Kerajaan Pasir dari ikatan Kerajaan Banjarmasin.²

Setelah Sultan Sepuh meninggal dunia, ia digantikan oleh kemenakannya yang bernama Dipati Anom. Selama Dipati Anom memerintah, rakyat Pasir menjadi lebih makmur, karena tidak dibebani pekerjaan mendulang emas untuk pembayaran upeti kepada raja Banjarmasin. Ladang dan kebun dapat dipelihara dengan baik.

Setelah Sultan Dipati Anom meninggal dunia, ia digantikan oleh sepupunya yang bernama Sultan Sulaiman. Dalam masa pemerintahan sultan ini Kerajaan Banjarmasin memperingatkan kepada sultan Pasir akan kewajibannya untuk membayar upeti. Sultan Pasir tidak menggubris, tetapi pihak Belanda tidak tinggal diam. Dalam perjanjian tahun 1817, Belanda belum melakukan tindakan terhadap kedudukan Pasir. Baru dalam perjanjian 4 Mei 1826 dinyatakan bahwa Sultan Adam harus menyerahkan, antara lain Pasir, Kutai, dan Berau kepada Belanda. Sultan Pasir yang keempatbelas, yaitu Sultan Adam, untuk pertama kalinya telah membuat kontrak dengan Gubernur Belanda pada tahun 1844.

Walaupun demikian Sultan Sulaiman tetap memerintah Pasir yang merdeka dan berdaulat tanpa dicampuri oleh Pemerintah Belanda. Setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia, ia digantikan oleh kemenakannya, Sultan Ibrahim, putra dari Pangeran Surya Nata Negara. Peristiwa penting dalam pemerintahan Sultan Ibrahim, ialah pergeseran perbatasan antara Kerajaan Kutai dan Kerajaan Pasir. Sebelumnya perbatasan kedua kerajaan itu ialah sebuah sungai bernama Sungai Aji Raden. Karena itu Balikpapan dan Panajam masuk wilayah Kerajaan Pasir.

Pada waktu Sultan Ibrahim memerintah Kerajaan Pasir, seorang putrinya kawin dengan putra sultan Kutai. Ketika putri Kerajaan Pasir yang bernama Aji Siti Jawiah berangkat ke Kutai beserta suaminya, secara resmi Sultan Ibrahim menyerahkan segala hasil laut dan darat kepada Siti Jawiah beserta suaminya. Karena hubungan kekeluargaan, maka Balikpapan dan Panajam itu seterusnya menjadi daerah Kerajaan Kutai.

Sesudah Sultan Ibrahim meninggal, ia digantikan oleh saudara sepupunya, Sultan Makhmud Khan, putra sulung dari almarhum Sultan Sulaiman yang memerintah dari tahun 1838 -- 1843. Tiga tahun setelah sultan memerintah Kerajaan Pasir, tibalah sebuah kapal dagang Belanda. Nakhoda dan anak buahnya datang ke istana untuk berkenalan dengan Sultan Makhmud Khan. Menurut cerita itulah pertama kalinya Negeri Pasir didatangi orang Belanda. Kapal dagang tersebut datang melalui Banjarmasin dengan membawa barang seperti kain-kain, barang-barang permainan, roti, gula-gula, cermin, mainan, manik-manik, piring, dan guci. Barang dagangan ini diperjualbelikan secara barter dengan hasil hutan seperti rotan, damar, dan emas urai hasil pendulangan rakyat. Setelah kapal Belanda masuk ke Negeri Pasir, sejak itu banyak pula kapal dagang dari Jawa dan Makasar ke Pasir.

Setelah Sultan Makhmud Khan meninggal dunia, ia digantikan oleh saudaranya, Sultan Adam, pada tahun 1844 -- 1861. Acara penobatan dilakukan menurut adat lembaga Kerajaan

Pasir sejak pemerintahan Putri Petung, yakni menyerahkan alat kerajaan sebagai pusaka turun-temurun berupa barang seperti gong, ceret, pinggan melawan, baki dari tembaga, dan dua buah meriam si Macan dan si Gantang. Semua pusaka kerajaan ini diserahkan oleh rakyat Pasir. Sesudah raja yang baru dinobatkan itu menerima alat kerajaan, barulah raja itu dianggap sah sebagai raja yang diakui oleh seluruh rakyat Pasir. Pada waktu penobatan Sultan Adam, untuk pertama kali residen Banjarmasin menghadiri upacara tersebut atas nama Pemerintah Kolonial Belanda.

Sebelum upacara penobatan dimulai, Residen Banjarmasin A.L. Weddik yang berpangkat komisararis Gubernemen Belanda untuk Pulau Borneo menyerahkan hadiah dari Kerajaan Belanda sebagai tanda persahabatan berupa sebuah peti yang indah berisi sebuah baju dari kain laken bersulam kembang dari benang emas, sebuah celana dari kain laken hitam dengan strip pita emas, sebilah pedang berhulu gading, berbentuk emas dan bermahkota dua ekor singa bertahtakan intan, sepasang sepatu dan sepasang kaus tangan. Pakaian inilah yang dipakai Sultan Adam pada waktu dinobatkan menjadi sultan Pasir.

Setelah sultan dinobatkan, Belanda menyodorkan perjanjian yang isinya antara lain sebagai berikut :

- (1) Kerajaan Pasir mengakui masuk sebagai wilayah jajahan Hindia Belanda,
- (2) Kerajaan Pasir setia kepada Kerajaan Belanda dan taat kepada raja Belanda dan gubernur jenderal Hindia Belanda, dan
- (3) Kerajaan Pasir tidak akan mengadakan hubungan langsung ataupun membuat perjanjian dengan negara lain dan musuh Belanda juga menjadi musuh Kerajaan Pasir.

Pada masa pemerintahan Sultan Adam, ada dua orang pedagang yang kerap kali berdagang di Kerajaan Pasir. Pertama Syeh Syarif Hamid Alsegaf, seorang pedagang Arab dari Semarang. Syeh Syarif Hamid kerap kali membawakan pistol dan senapan untuk sultan, karena itu Syarif Hamid menjadi sahabat sultan. Saudagar Arab itu kemudian kawin dengan kemenakan

sultan bernama Aji Musnah. Syarif Hamid Alsegaf kemudian diangkat menjadi menteri kerajaan dan dihadiahi gelar pangeran. Pedagang yang kedua bernama La Kumai dari Sulawesi Selatan, seorang saudagar yang kaya. Ia kemudian dikawinkan dengan putri bangsawan Pasir bernama Aji Rindu, puteri almarhum Sultan Makhmud Khan. Ia dihadiahi gelar pangeran dan kemudian diangkat menjadi menteri kerajaan dengan nama Pangeran Mas.

Pada akhirnya Pemerintah Belanda tidak senang, karena Sultan Adam membantu menyembunyikan pejuang-pejuang pengikut Pangeran Antasari yang memberontak terhadap Belanda sejak tahun 1859. Ketika raja-raja pesisir Kalimantan Timur diminta residen Banjarmasin untuk menghadap dan menyatakan tanda setianya kepada gubernemen, Sultan tidak bersedia menghadap ke Banjarmasin.

2.4 Latar Belakang Perlawanan

Telah disinggung bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah merasa dirinya berhak atas seluruh wilayah Indonesia terutama sejak adanya timbang terima kekuasaan dari Inggris ke Pemerintah Belanda tahun 1816. Namun demikian, untuk melaksanakan politik penjajahan, Belanda sebenarnya merasa tidak mampu menguasai seluruh wilayah Indonesia sehingga melakukan politik pemerintahan tidak langsung. Politik pemerintahan inilah yang dijalankan oleh Belanda terhadap Kerajaan Pasir. Dengan politik adu-domba, Belanda memperoleh keuntungan untuk memperkecil kekuasaan raja Pasir.

Politik Belanda yang dijalankan itu tidak dapat diterima oleh rakyat Pasir yang cinta kemerdekaan. Belanda dianggap terlalu banyak mencampuri urusan pemerintahan kerajaan, sehingga raja hanya merupakan boneka belaka. Di samping itu faktor pendorong bagi Belanda untuk segera menguasai Kerajaan Pasir adalah agar supaya wilayah ini tidak jatuh ke tangan imperialis Eropa lainnya. Masyarakat Pasir yang umumnya beragama Islam memandang orang Belanda sebagai orang kafir.

Mati melawan orang kafir adalah mati syahid; karena itu mereka berjuang melawan Belanda.

2.5 Sebab-sebab Perlawanan

Sejak Sultan Adam menandatangani *Korte Verklaring*, sebenarnya telah timbul benih permusuhan. Hal ini tampak ketika meletus perlawanan rakyat Banjarmasin. Sultan Adam aktif memberikan bantuan pada pasukan Antasari yang bersembunyi di wilayahnya. Perlawanan Sultan Adam terhadap Belanda merupakan gerakan perlawanan di bawah tanah. Untuk menumpas gerakan di bawah tanah ini Pemerintah Belanda menangkap Sultan Adam dan mengasingkannya ke Banjarmasin.

Sultan Adam digantikan kemenakannya, Sultan Sepuh Adil Khalifatulmukminin. Sultan ini sangat aktif memajukan pertanian. Pada waktu itulah mula-mula diadakan perkebunan karet di wilayah Kerajaan Pasir. Sultan dan keluarganya sendiri turut berladang dan berkebun untuk memberi dorongan kepada rakyat supaya giat bertani. Pada zaman pemerintahan sultan ini, ada seorang pedagang ternak kaya dari Sulawesi Selatan bernama La Basso. Karena kekayaannya, ia meminang keluarga dekat raja yang bernama puteri Aji Reinah. La Basso kemudian diberi gelar Pangeran Dipati dan diangkat menjadi menteri kerajaan. Politik perkawinan ini berlatar belakang memperoleh bantuan orang-orang Bugis melawan penjajah Belanda.

Sultan Adil Khalifatulmukminin digantikan putra almarhum Sultar. Makhmud Khan yang bernama Sultan Muhammad Ali Khalifatulmukminin. Raja ini seorang yang taat beragama. Pada bulan puasa, menteri kerajaan dan pegawainya diberikan keringanan. Dalam menjalankan urusan pemerintahan, sering perintah residen Banjarmasin tidak mendapat layanan dari sultan. Residen tidak senang atas kebijaksanaan sultan. Residen semakin bertambah marah mendengar laporan-laporan dari bawahannya, bahwa Sultan Muhammad Ali menaruh simpati terhadap perjuangan Pangeran Antasari dan melindungi pemberontak-pemberontak yang bersembunyi di lingkungan istana.

Seorang asisten residen secara diam-diam menyelidiki hal itu. Dari rakyat Pasir ia mengetahui peristiwa itu. Asisten residen meminta agar sultan berdatang ke Banjarmasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada residen. Sultan tidak menanggapi permintaan asisten residen dan menyatakan ia belum bersedia meninggalkan Pasir selama bulan puasa.

Mendengar laporan itu residen sangat marah. Sebulan kemudian residen sendiri beserta sepasukan tentara datang ke Pasir. Setibanya di Pasir, residen Belanda menyatakan bahwa sultan tidak cakap, tidak taat kepada peraturan gubernemen dan suka melawan pemerintah. Mendengar pembicaraan residen yang tidak sopan itu, Sultan Ali Muhamad menjadi marah, dan mengatakan bahwa sebagai sultan ia berhak menentukan kebijaksanaan sendiri dalam kerajaannya. Baru sekali inilah seorang sultan berani menentang terus terang seorang residen Belanda di Kerajaan Pasir. Residen dengan paksa membawa sultan ke Banjarmasin. Sultan Muhamad Ali meninggal di tempat pembuangannya di Banjarmasin. Sebagai penggantinya diangkat Sultan Abdurrahman, putra almarhum Sultan Adam.³ Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman, gubernemen Belanda mengadakan peraturan memungut *belasting* atau uang kepala di Kerajaan Pasir. Setiap orang yang sudah dewasa diwajibkan membayar pajak tersebut.

Setelah Sultan Abdurrahman meninggal dunia, pemerintahan diserahkan kepada Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, kemenakan Sultan Abdurrahman. Ia dicalonkan sebagai penggantinya, tetapi Pangeran Nata berkeberatan. Ia memberikan pernyataan kepada residen, bahwa ia lebih senang bertani. Para bangsawan dan rakyat Kerajaan Pasir lalu memilih Pangeran Ratu Raja Besar, putra Sultan Sepuh Adil Khalifatulmukminin, sebagai penggantinya. Setelah upacara menurut adat lembaga Kerajaan Pasar selesai dilaksanakan dan pemerintahan diserahkan oleh Sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, ia kembali ke kampungnya di Selinau. Menteri-menteri kerajaan pada waktu itu ialah: Aji Meja, putra Aji Gaga bergelar Pangeran

Mangku Jaya Kesuma (menteri pertama), Aji, putra Pangeran Nata Panembahan Sulaiman bergelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat (menteri kedua), Pangeran Panji Nata Kesuma, putra almarhum Sultan Abdurrahman (menteri ketiga), dan La Basso gelar Pangeran Dipati (menteri keempat).

Sultan Pangeran Ratu Raja Besar kerap kali mempercayakan urusan pemerintahan kepada para menterinya. Di antara menterinya yang sangat dipercayainya ialah Pangeran Mangku Jaya Kesuma. Urusan pemerintahan dengan Gubememen Belanda di Banjarmasin dipercayakannya kepada menteri pertama ini. Mertua Pangeran Jaya Kesuma bernama La Maraja, adalah seorang saudagar yang kaya raya. Ia banyak mempunyai hubungan dagang dengan saudagar di Banjarmasin, Surabaya, Gresik, Betawi, dan Singapura. Karena selalu saja berurusan dengan Gubernemen Belanda di Banjarmasin, timbullah ambisinya untuk lebih berkuasa. Dengan bantuan mertuanya yang kaya raya, ia bercita-cita untuk menjadi sultan. Hubungannya dengan Residen J. Broers di Banjarmasin sudah sangat akrab. Baik Pangeran Mangku Jaya Kesuma maupun mertuanya, kerap kali membawakan buah tangan untuk Nyonya J. Broers sebagai tanda persahabatan. Karena hubungannya yang sangat baik itu, Pangeran Mangku Jaya Kesuma dan mertuanya, La Maraja, tiada merasa malu dan segan dengan terus terang mengemukakan maksudnya itu kepada residen. Residen J. Broers setuju untuk membantu cita-cita Pangeran Mangku Jaya Kesuma, karena dengan berhasilnya rencana ini residen dapat melaksanakan cita-cita pemerintahannya untuk menjalankan politik adu-domba, memecah belah rakyat dan raja Pasir yang selama ini bersimpati kepada perjuangan Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Untuk mencapai maksudnya itu, residen, La Maraja, dan Pangeran Mangku Jaya Kesuma mengatur suatu rencana.

Sultan Pasir Pangeran Ratu Raja Besar dengan menterinya, Pangeran Mangku Jaya Kesuma, menghadap residen di Banjarmasin. Setibanya di Banjarmasin residen menganjurkan kepada sultan agar memberikan suatu surat kepercayaan kepada Pa-

ngeran Mangku Jaya Kesuma sebagai dasar hukum untuk berurusan soal-soal pemerintahan dengan Gubernemen Belanda. Dengan demikian sultan tidak perlu pulang-balik ke Banjarmasin. Anjuran residen ini disetujui oleh Pangeran Ratu Raja Besar untuk memberikan surat kepercayaan kepada menterinya, Pangeran Mangku Jaya Kesuma sebagai menteri pertama. Residen membacakan konsep surat yang telah disediakan lebih dahulu.

Sultan setuju bunyi konsep itu. Keesokan harinya Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dan menterinya dipanggil menghadap untuk menandatangani surat kepercayaan atau surat kuasa untuk menterinya, Pangeran Mangku Jaya. Sultan menandatangani surat kuasa itu dengan tiada membacanya lebih dahulu serta membubuhi cap Kerajaan Pasir. Sesudah itu, Pangeran Mangku Jaya menandatangani surat kuasa itu dan penghabisannya tuan residen sebagai saksi. Setelah selesai penandatanganan surat kuasa itu, Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dan menterinya kembali ke Pasir.

Sesudah beberapa lama sultan berada di Pasir, tersiar berita bahwa sultan telah menandatangani suatu surat penyerahan kekuasaan kepada menterinya, Pangeran Mangku Jaya, dan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai sultan. Para bangsawan Pasir yang merasa lebih berhak mewarisi kerajaan dan menggantikan sultan sangat marah mendengar berita itu. Mereka menghadap Pangeran Ratu Raja Besar untuk meminta keterangan tentang kebenaran berita itu. Sultan menjelaskan bahwa ia sekali-kali tidak menandatangani pengunduran diri dan menunjuk Pangeran Mangku Jaya menjadi sultan; yang ada ialah surat kuasa untuk menterinya, Pangeran Mangku Jaya, supaya mudah berurusan di Banjarmasin. Mendengar penjelasan itu, para bangsawan Pasir menjadi lega hatinya.

Tiada berapa lamanya sultan menerima salinan surat yang ditandatangani di Banjarmasin itu. Setelah dibaca dengan teliti, alangkah terkejutnya, karena bunyi surat itu tidak sesuai dengan konsep yang dibacakan. Sekarang barulah ia insyaf

bahwa ia telah ditipu oleh residen dan menterinya, Pangeran Mangku Jaya, dan menyesal karena kelalaiannya sendiri tidak hati-hati harus menandatangani surat kuasa itu dengan tidak membacanya lebih dahulu. Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dengan segera memanggil keluarganya yang lebih berhak untuk menjadi sultan menurut adat lembaga Kerajaan Pasir. Mendengar kejadian itu, keluarga sultan sangat marah atas perbuatan Pangeran Mangku Jaya yang bersekongkol dengan residen untuk mengkhianati rajanya, Pangeran Ratu Raja Besar.

Beberapa waktu kemudian tiba di Pasir tiga buah kapal perang dengan seorang overste dan asisten residen sebagai wakil residen Banjarmasin meminta kepada Sultan Pasir Pangeran Ratu Raja Besar untuk mengadakan serah terima kekuasaan pada Pangeran Mangku Jaya, sesuai dengan bunyi surat yang ditandatangani di Banjarmasin. Sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman menyatakan bahwa pengangkatan Pangeran Mangku Jaya Kesuma menjadi sultan Pasir itu bertentangan dengan adat lembaga kerajaan yang selama ini dengan taat dilaksanakan oleh para bangsawan dan seluruh rakyat Pasir. Untuk menjelaskan pernyataannya itu, sultan menunjukkan silsilah raja-raja Pasir dan menjelaskan siapa yang patut menjadi sultan apabila Pangeran Ratu Raja Besar mengundurkan diri. Pangeran Nata meminta supaya serah terima itu diundurkan dan mendesak asisten residen agar melaporkan hal itu kepada residen di Banjarmasin.

Residen menyatakan bahwa timbang terima antara Pangeran Ratu Raja Besar dengan Pangeran Mangku Jaya Kesuma harus dilaksanakan karena hal itu adalah kemauan sultan sendiri. Keputusan itu tidak bisa diubah lagi, karena sudah mendapat persetujuan dari gubernur jenderal Hindia Belanda di Betawi. Untuk melaksanakan serah terima kekuasaan dan pengangkatan Pangeran Mangku Jaya menjadi sultan Pasir, residen sendiri datang ke Pasir dengan kapal perang lengkap dengan pasukannya.

Dalam keadaan terpaksa Pangeran Ratu Raja Besar menandatangani surat serah terima itu. Dengan demikian tercapailah maksud residen sebagai alat pemerintah kolonial untuk mengadudomba raja-raja dan rakyat Pasir. Pangeran Mangku Jaya dan mertuanya, La Maraja, mencapai cita-citanya.⁴

Pangeran Mangku Jaya gelar Sultan Ibrahim Khaliluddin memerintah tahun 1900 -- 1908. Pemerintahan Sultan Ibrahim Khaliluddin tidak dapat berjalan lancar, karena banyak bangsawan dan rakyat yang tidak menyetujui pengangkatannya sebagai sultan Pasir. Di antara para bangsawan yang besar pengaruhnya di kalangan raja-raja dan rakyat Pasir adalah Pangeran Panji Nata Kesuma, putra almarhum Sultan Abdurrahman yang pernah menjadi menteri kerajaan pada zaman Sultan Pangeran Ratu Raja Besar, Aji Nyesei gelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat putra Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, dan Panglima Sentik. Uang kepala atau *belasting* tidak dibayar rakyat. Sultan Ibrahim tidak berdaya menghadapi perlawanan rakyat. Mereka membenci Sultan. *Pertama*, karena rakyat tahu bahwa Sultan Ibrahim bersekongkol dengan residen Belanda untuk mengkhianati Sultan Pangeran Ratu Raja Besar. *Kedua*, karena Sultan Ibrahim telah berani melanggar tradisi raja-raja mereka dan menjadi raja dengan tidak menerima pusaka kerajaan dari rakyat secara adat. *Ketiga*, karena ada beberapa bangsawan Pasir yang lebih berhak atas tahta daripada Sultan Ibrahim.

Untuk mengatasi perlawanan rakyat, agar *belasting* tetap dibayar oleh rakyat, Sultan Ibrahim mengangkat saudaranya, Pangeran Menteri, menjadi menteri kerajaan. Meskipun demikian rakyat tetap patuh kepada Pangeran Panji dan kawan-kawannya.⁵

Untuk melemahkan perlawanan Pangeran Panji, Sultan Ibrahim mengajukan usul ke Gubernemen Belanda, agar Aji Nyesei gelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, putra bekas Sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, menjadi raja muda. Sebagian rakyat yang menjadi pengikut Aji Nyesei menghentikan perlawanan, tetapi kemudian Sultan Ibrahim pun merasa khawatir karena Raja Muda Aji Nyesei bertambah pengaruhnya.

Surat keputusan pengangkatan Aji Nyesei menjadi raja muda Pasir diminta dengan alasan residen Banjarmasin meminta dibuatkan salinannya. Beberapa kali raja muda meminta surat keputusan pengangkatannya, tetapi oleh Sultan Ibrahim selalu dijawab, belum dikembalikan residen.

Raja Muda merasa bahwa ia dipermainkan oleh Sultan Ibrahim; karena itu ia bergabung dengan Pangeran Panji menentang sultan. Pertentangan antara keluarga Sultan Ibrahim di satu pihak dan pengikut-pengikut Pangeran Panji serta Aji Nyesei Raja Muda di lain pihak menjadi semakin buruk, sehingga Sultan Ibrahim tidak dapat menguasai keadaan. Rakyat tidak mau membayar uang kepala sehingga pajak itu macet sama sekali. Kedudukan Sultan Ibrahim menjadi semakin sulit. Gubernur Belanda menganggap ia terlalu lemah, sehingga pembayaran pajak tidak masuk sedikit pun, sedangkan di pihak lain para bangsawan dan rakyat tidak mematuhi perintah dan peraturan gubernemen. Dalam keadaan yang sulit itu Sultan Ibrahim mengundang mertuanya, La Maharaja, dan saudaranya Pangeran Menteri, serta kaum keluarganya yang berpihak kepadanya untuk memusyawarahkan situasi yang gawat itu. Dalam perundingan itu, sultan dan keluarganya berpendapat bahwa mereka tidak mungkin seterusnya mempertahankan kedudukan Sultan Ibrahim sebagai pemimpin pemerintahan Kerajaan Pasir. Mereka sependapat lebih baik pemerintahan kerajaan itu diserahkan saja kepada Gubernur Belanda dengan meminta ganti rugi. Sebelum usul penyerahan diajukan ke Gubernur Belanda, terlebih dahulu harus diadakan musyawarah dengan para bangsawan dan raja-raja Pasir yang berhak atas tahta kerajaan.

Pada suatu hari Sultan Ibrahim mengundang para menteri serta para pemimpin Kerajaan Pasir. Dalam pertemuan itu Sultan Ibrahim mengemukakan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi kemudian hari, terutama dengan adanya peraturan baru dari gubernemen untuk mengadakan peraturan *heerendiensts* atau rodi, yang mewajibkan rakyat kerja paksa setiap tahun selama 20 hari di samping kewajiban membayar uang kepala. Jika pera-

turan ini dilaksanakan, rakyat akan menentang, karena jelas rakyat tidak akan menurut saja peraturan yang sangat memberatkan beban dan kehidupan mereka. Sebaliknya kalau peraturan ini tidak dilaksanakan, pasti gubernemen akan menghukum, karena hal ini jelas melawan peraturan gubernemen. Selanjutnya dianjurkan agar para menteri dan para bangsawan menyerahkan saja pemerintahan Kerajaan Pasir kepada Gubernemen Belanda dengan meminta ganti rugi bagi para bangsawan yang berhak mewarisi tahta kerajaan.

Dalam perundingan itu, masing-masing mengeluarkan pendapat. Di pihak Aji Nyesei sebagai sultan muda dan sebagai menteri tidak bersedia menyerahkan kepada Pemerintah Belanda, karena pada suatu saat ia dapat menjadi sultan. Pangeran Panji Nata Kesuma bin almarhum Sultan Abdurrahman tidak setuju, karena Kerajaan Pasir adalah pusaka turun-temurun yang harus diperintah oleh juriat raja-raja Pasir. Aji Meja Pangeran Menteri, Pangeran Mas, dan Pangeran Dipati sebagai menteri-menteri Kerajaan Pasir menyetujui untuk menyerahkan Kerajaan Pasir kepada Belanda dengan ganti rugi. Kalau ganti rugi sudah disetujui Gubernemen Belanda, uangnya dibagi-bagi kepada menteri-menteri kerajaan dan para bangsawan Pasir yang berhak atas tahta kerajaan. Pendapat yang terakhir ini disokong oleh Sultan Ibrahim Khaliluddin. Selanjutnya mereka membuat surat pernyataan yang akan dikirim kepada residen di Banjarmasin dan diteruskan kepada pemerintah di Betawi. Residen Banjarmasin mengirim surat balasan yang isinya gubernemen di Betawi setuju menerima penyerahan Pasir dan bersedia mengganti kerugian atau *schadeloosstelling* kepada sultan, para menteri, dan para bangsawan Pasir yang berhak atas tahta Kerajaan Pasir dengan perjanjian bahwa sultan dan para menteri harus meletakkan jabatan dan melepaskan segala kekuasaannya atas Kerajaan Pasir. Demikian juga para bangsawan Pasir tidak berhak lagi atas Kerajaan Pasir.

Mendengar berita tersebut Pangeran Panji, Panglima Sentik, dan para bangsawan yang menentang usul itu mengadakan

pula gerakan bersama-sama rakyat. Mereka mengakui sultan Pasir dengan para menterinya sebagai penguasa pemerintah Kerajaan Pasir yang sah. Sebagian besar dari mereka mendukung Pangeran Panji dan kawan-kawannya.⁶

Setelah surat balasan dari pemerintah di Betawi diterima, Sultan Ibrahim Khaliluddin, saudaranya Pangeran Menteri, dan mertuanya La Maharaja, berlayar ke Banjarmasin. Entah bagaimana pembicaraan dan perundingan Sultan Ibrahim dan residen di Banjarmasin, tak seorang pun mengetahui, selain Pangeran Menteri dan mertuanya La Maharaja.⁷

Dalam bulan Oktober 1908, dengan perantaraan *Civil Gezaghebber Tanda Grogot* Kapten Droest, Residen J. Van Weerk memberitahukan kepada sultan Pasir bahwa permohonan minta ganti rugi seluruh hak atas Kerajaan Pasir diterima baik oleh pemerintah di Betawi. Tidak lama lagi uang ganti rugi sebesar N.F. 377.267 (tigaratus tujuh puluh tujuh ribu duaratus enam puluh tujuh rupiah Belanda), akan dikirim ke Tanah Grogot dan diserahkan kepada sultan, para menteri, dan para bangsawan yang berhak atas Kerajaan Pasir, yakni: Sultan Ibrahim Khaliluddin sebesar N.F. 101.945, Pangeran Nata Panembahan Sulaiman sebesar N.F. 85.000, Aji Nyesei Raja Muda sebesar N.F. 66.267, Pangeran Panji bin Sultan Abdurrahman sebesar N.F. 28.855, Pangeran Perabu sebesar N.F. 25.200, Pangeran Menteri sebesar N.F. 10.000, Pangeran Dipati sebesar N.F. 10.000, Pangeran Mangku Tg. Aru sebesar N.F. 10.000, Pangeran Mas sebesar N.F. 10.000, Pangeran Singa Jaya sebesar N.F. 10.000, Pangeran Ratu Raja Besar sebesar N.F. 10.000, dan Pangeran Suria Nata sebesar N.F. 10.000. Jumlah N.F. 377.267. (Tigaratus tujuh puluh tujuh ribu duaratus enam puluh tujuh gulden).⁸ Selain itu, diterangkan pula oleh *gezaghebber* kepada Sultan Khaliluddin, apabila orang-orang tersebut masing-masing telah menerima uang bagiannya, dengan sendirinya sultan Pasir bersama-sama dengan menterinya, serentak melepaskan jabatannya. Begitu pula para

bangsawan Pasir menyerahkan segala hak kekuasaannya atas Kerajaan Pasir kepada Gubernemen Belanda.

Berita ini disampaikan pula oleh Sultan Ibrahim kepada Pangeran Nata Panembahan Sulaiman dan Pangeran Ratu Raja Besar, tetapi dengan cara lain. Dikabarkannya bahwa Pemerintah Belanda akan mengirimkan uang ganti kerugian kepada para bangsawan Pasir terutama kepada Pangeran Nata Panembahan Sulaiman jika ia bersedia melepaskan haknya untuk menjadi sultan Pasir sebesar N.F. 85.000 dan kepada Pangeran Ratu Raja Besar sebesar N.F. 10.000 jika ia juga bersedia meletakkan jabatannya.

Para bangsawan lainnya yang melepaskan haknya, artinya tidak turut bekerja pada pemerintahan, akan mendapat bayaran juga. Sultan Ibrahim juga melepaskan haknya. Ia mendapat ganti rugi sebanyak N.F. 100.000. Mendengar kabar itu, para bangsawan Pasir sangat gembira karena akan mendapat uang masing-masing sebesar N.F. 100.000, dengan syarat melepaskan haknya atas Kerajaan Pasir, yaitu tidak turut bekerja pada pemerintahan Pasir.

Dalam bulan April 1908 uang sebesar N.F. 377.267 yang dikirim Gubernemen Belanda diterima oleh *Gezaghebber Tanah Grogot* dalam bentuk uang perak terdiri atas rupiah dan ringgit yang akan dibagikan kepada sultan, para menteri, dan bangsawan Pasir yang berhak atas Kerajaan Pasir.

Gezaghebber Tanah Grogot mengundang Sultan Ibrahim, para menteri, dan para bangsawan Pasir yang berhak atas Kerajaan Pasir. *Gezaghebber* menerangkan bahwa Pemerintah Belanda telah setuju menerima penyerahan Kerajaan Pasir dari sultan Pasir, para menteri, dan para bangsawan Pasir yang berhak atas Kerajaan Pasir dengan ganti rugi. Gubernemen Belanda telah mengirim uang sebesar N.F. 377.267 yang masing-masing akan diserahkan kepada yang berhak. Sultan Ibrahim juga menjelaskan kepada hadirin dalam bahasa Pasir, bahwa pembayaran ini

adalah ganti rugi untuk para bangsawan Pasir yang melepaskan haknya atas pemerintahan Kerajaan Pasir.

Selanjutnya *gezaghebber* mengeluarkan suatu akte penyerahan kerajaan dan surat bukti penyerahan yang harus ditandatangani setelah penerimaan uang menurut haknya masing-masing. Yang pertama-tama menandatangani surat akte penyerahan dan daftar penerimaan uang ganti rugi ialah Sultan Ibrahim disertai penerimaan uang sebanyak N.F. 101.945 berupa uang perak dan ringgit. Kedua, Pangeran Nata Panembahan Sulaiman sebanyak N.F. 85.000. Ketiga, Pangeran Perabu Kampung Semuntai menerima uang sebanyak N.F. 25.200. Keempat, Pangeran Menteri sebanyak N.F. 10.000. Kelima, Pangeran Dipati sebanyak N.F. 10.000. Keenam, Pangeran Ratu Raja Besar, menerima uang sebanyak Rp. 10.000,—. Ketujuh, Pangeran Mas menerima uang sebanyak N.F. 10.000. Kedelapan, Pangeran Mangku Tg. Aru menerima sebanyak N.F. 10.000. Kesembilan, Pangeran Suria Nata menerima uang N.F. 10.000. Kesepuluh, Pangeran Singa Muara Adang menerima uang sebanyak N.F. 10.000, dan kesebelas Pangeran Panji Nata Kesuma bin Sultan Abdurrahman disuruh menandatangani menerima uang sebanyak N.F. 28.855, tetapi ia tidak mau menandatangani surat tersebut serta tidak mau menerima uang sebanyak N.F. 28.855 serta menyatakan kepada *gezaghebber* bahwa ia tidak mau menjual negerinya. Mendengar pembicaraan Pangeran Panji itu, *gezaghebber* menjadi marah dan menerangkan bahwa keluarganya yang sama-sama dengan dia telah menandatangani dan menerima uang sebagai bukti penyerahan hak atas Kerajaan Pasir.

Sultan Ibrahim menerangkan kepada *gezaghebber*, bahwa dalam perundingan antara para menteri dan para bangsawan, Pangeran Panji juga menyetujui penyerahan kerajaan kepada Belanda. Pangeran Panji menyangkal, sehingga terjadi pertengkaran antara Sultan Ibrahim dan Pangeran Panji. *Gezaghebber* berusaha mengatasinya. Pangeran Panji tidak senang, lalu meninggalkan sidang dengan tidak menandatangani surat penyerahan hak dan tidak menerima uang ganti rugi.

Sultan Ibrahim berunding dengan para bangsawan, para menteri yang hadir. Keputusannya, uang ganti rugi itu diserahkan kepada Pangeran Ratu Agung Luasi.

Penandatanganan yang keduabelas dilakukan oleh Aji Nyesei Raja Muda. Raja muda sangat bimbang, sehingga ia meminta pertimbangan kepada ayahandanya, Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, yang hadir pada waktu itu. Ia berpikir kalau uang itu tidak diterima tentu gezaghebber akan marah seperti terhadap Pangeran Panji dan uang itu tentu diserahkan pula kepada orang lain. Kalau diterima uang itu, berarti menyerahkan pangkatnya sebagai menteri dan raja muda. Karena sudah banyak yang menandatangani dan menerima uang ganti rugi itu, terpaksa Aji Nyesei Raja Muda menandatangani dan menerima uang ganti rugi penyerahan haknya atas Kerajaan Pasir serta menerima uang perak dan ringgit seharga N.F. 66.267.

Dengan penandatanganan akte penyerahan Kerajaan Pasir kepada Gubernemen Belanda dan menerima uang ganti kerugian seperti tersebut di atas, maka pada hari itu pula tenggelamlah Kesultanan Pasir untuk selama-lamanya. Pada hari itu Sultan Ibrahim Khaliluddin dan para menteri serentak meletakkan jabatannya dan menyerahkan segala hak dan kekuasaan kepada Wakil Gubernemen Belanda Kapten Van Droest, gezaghebber di Tanah Grogot.

2.6 Perlawanan Pangeran Panji

Setelah Pangeran Panji bertengkar dengan Kapten Droest, karena menolak menandatangani surat penyerahan atas Kerajaan Pasir dan tidak mau menerima uang ganti kerugian untuk melepaskan haknya atas kerajaan, ia meninggalkan sidang. Pada tahun 1908 juga ia bermusyawarah dengan pengikut-pengikutnya seperti Panglima Sentik, Singa Negara dari Pasir Tengah, Kepala Suku Dayak Kaka Degu Aji Mujub, dan lain-lain.⁹ Pangeran Panji adalah seorang yang ramah-tamah. Ia juga pemeluk Agama Islam yang taat menjalankan amal ibadah. Di Banjarmasin, ia banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh agama

dan anggota-anggota Sarikat Islam yang baru saja berdiri di Banjarmasin.

Sekembalinya ke Tanah Grogot, ia berdiam di pedalaman bersama adiknya, Aji Mojo. Ia menemui keluarganya di pedalaman dan menerangkan kebusukan politik Pemerintah Kolonial Belanda dengan mengadudomba para bangsawan dan rakyat Pasir.

Kepala Suku Dayak Pasir Kaka Degu beserta ribuan pengikutnya dengan sukarela menjadi pengikut Pangeran Panji menentang pemerintah. Di antaranya kemudian banyak yang menjadi pemeluk Agama Islam yang taat. Mereka sepakat untuk menyerbu serdadu-serdadu Belanda yang ada di Tanah Grogot.

Berita akan timbulnya pemberontakan diketahui oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Tanah Grogot pada tahun 1912. Belanda segera mengirim sepasukan serdadu dengan persenjataan yang lengkap untuk menangkap Pangeran Panji dengan kawan-kawannya. Keberangkatan serdadu-serdadu Belanda yang dikirim dari Tanah Grogot diketahui oleh Pangeran Panji. Bersama saudara-saudaranya seperti Aji Mojo, Aji Bensonno dan Panglima Sentik, serta beberapa kepala suku Dayak Pasir mengadakan persiapan untuk melawan serdadu Belanda.

Di Sungai Kandilo dengan diam-diam Pangeran Panji dan kawan-kawannya menghadang serdadu-serdadu Belanda. Dari tempat persembunyian mereka, kelihatan 6 buah perahu besar membawa serdadu-serdadu Belanda. Begitu serdadu-serdadu Belanda mendarat di tempat yang tidak jauh dari persembunyian mereka, Pangeran Panji dengan kawan-kawannya serempak menyerang dengan bersenjatakan tombak, sumpitan, mandau dan perisai. Terjadilah pertempuran sengit antara serdadu-serdadu Belanda yang bersenjatakan pistol dan senapan dengan pasukan Pangeran Panji yang bersenjatakan mandau, tombak dan sumpitan. Karena persenjataannya tidak memadai, Pangeran Panji dan kawan-kawannya tertangkap. Pangeran Panji dan Panglima Sentik kemudian diasingkan ke Banjarmasin.¹

Meskipun Pangeran Panji telah dibuang Belanda ke Banjarmasin, tetapi gerakan untuk mengusir Belanda dari Pasir masih diteruskan oleh pengikutnya. Pada tahun 1913 pengikutnya yang bernama Matjanang mengadakan pula perlawanan terhadap Pemerintah Belanda. Gerakan itu terhenti dengan tertangkapnya Matjanang. Pada tahun 1914 saudara Pangeran Panji, dengan pengikutnya yang terdiri atas orang Pasir dan Dayak yang beragama Islam mengadakan pemberontakan lagi. Ia tertangkap oleh serdadu-serdadu Belanda dan kemudian ditahan di Kota Baru. Meskipun beberapa pemimpinnya tertangkap dan diasingkan, rakyat Pasir tidak gentar. Rakyat Pasir bertekad bulat untuk mengadakan pemberontakan. Pada bulan Juni 1915 terjadi perlawanan bersenjata di Pasir. Mula-mula di beberapa kampung, kemudian meluas ke seluruh daerah Pasir sehingga merupakan pemberontakan total. Beberapa pemuka rakyat Pasir dan kepala-kepala suku Dayak bersatu mengadakan perlawanan. Pemimpin-pemimpinnya terdiri atas Wana, Sebaya, dan Uma Bongkat dari daerah suku Biu Pasir Selatan, Kaka Degu kepala suku Dayak dari Hulu Tuyu, Singa Negara, dan Walik. Kedua orang yang disebut terakhir adalah kepala-kepala suku dari Satiu Pasir Tengah yang banyak memperoleh pengikut dengan perjanjian akan membebaskan mereka dari pajak kepala dan rodi. Mereka bersumpah untuk melaksanakan wasiat dari Pangeran Panji. Ketika Pangeran Panji mendekati akhir hayat di tempat pembuangannya di Banjarmasin, ia bersumpah bahwa ia dan pengikutnya akan melakukan pembalasan terhadap pegawai gubernemen yang berkebangsaan Eropa dan mengharap pemerintah kerajaan dapat kembali memerintah rakyat Pasir.

Sezaman dengan pemberontakan Pasir, Partai Sarikat Islam mulai berkembang di seluruh tanah air. Sejak berdirinya cabang-cabang Sarikat Islam tahun 1914, organisasi ini mendapat sambutan yang baik dari rakyat Pasir. Seorang anggota pengurus organisasi ini sengaja datang dari Surabaya ke Pasir untuk mempropagandakan maksud dan tujuan Sarikat Islam. Dalam rangka kunjungan pengurus Sarikat Islam itu ia memperoleh kesempatan

an untuk berkenalan dengan Sultan Ibrahim Khaliluddin dan bekas menteri, Pangeran Menteri, serta para bangsawan Pasir lainnya. Para bangsawan Pasir merasa tertarik, sehingga banyak yang masuk menjadi anggota Sarikat Islam bahkan Sultan Ibrahim pun bersedia menjadi presiden Sarikat Islam di Tanah Grogot dan adiknya, Pangeran Menteri, menjadi wakil presiden. Dengan masuknya Aji Nyesei Raja Muda dan Pangeran Ratu Raja Besar menjadi anggota, Sarikat Islam semakin bertambah maju.

Melalui penerangan-penerangan politik Sarikat Islam, para bangsawan mulai mengerti dan memiliki kesadaran berpolitik serta insyaf bahwa selama ini mereka dijadikan alat dan diadu-domba dengan sesama bangsanya oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka mulai mengerti mengapa Pangeran Panji tak mau menyerahkan haknya atas kerajaan dan tanah airnya kepada penjajah Belanda. Secara diam-diam mereka mendukung dan bergabung dengan kelompok Pangeran Panji di daerah pedalaman. Hampir semua menteri dan sultan yang telah menandatangani akte penyerahan Kerajaan Pasir berbalik menentang Gubernemen Belanda.

Pangeran Ratu Raja Besar, Andin Ngoko, Andin Gedang, dan Andin Dek bersama-sama memimpin gerakan bawah tanah di daerah Teluk Apar. Pangeran Singa bersama Wana dan Sebaya memimpin gerakan bawah tanah di daerah Teluk Adang. Aji Nyesei gelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat bersama Pangeran Perwira mengadakan gerakan bawah tanah di daerah Pasir Benua sampai pedalaman Kali Kandilo.¹¹ Dengan adanya perlawanan bersenjata dari pengikut Pangeran Panji dan gerakan politik Sarikat Islam di bawah pimpinan Sultan Ibrahim, Pangeran Menteri, Pangeran Raja Muda, Pangeran Ratu Raja Besar, serta para bangsawan Pasir, dapat dikatakan roda pemerintahan kolonial Belanda tidak berjalan sama sekali. Patroli-patroli, serdadu-serdadu Belanda kerap kali diserang dengan tiba-tiba, sehingga mereka tidak berani memasuki pedalaman Pasir.

Mula-mula patroli Belanda dibantu serdadu patroli dari Kandangan. Pada bulan Agustus tiba bantuan pasukan dari Banjarmasin. Pertempuran dengan kelompok pejuang Wana dan Panglima Singa pun terjadi. Kedua pemimpin ini kemudian tertangkap serdadu Belanda. Pada bulan November 1915 datang pula dua pasukan infanteri dari Banjarmasin untuk mengamankan daerah pemberontakan yang dipimpin oleh Andon Ngoko dan Andin Gedang. Bulan Desember 1915 datang pula bala bantuan serdadu-serdadu Belanda dari Jawa untuk memadamkan pemberontakan tersebut.

Pada tahun 1916 barulah serdadu-serdadu Belanda dengan bala bantuan dari Banjarmasin, Kandangan, dan Jawa bergabung untuk mengadakan serbuan ke pedalaman Pasir. Mula-mula serdadu-serdadu kolonial Belanda menangkap pemimpin-pemimpin Sarikat Islam. Sultan Ibrahim, Aji Nyesei Raja Muda, Pangeran Menteri, dan Pangeran Perwira dibawa ke Banjarmasin. Sarikat Islam cabang Tanah Grogot dianggap berbahaya untuk kepentingan umum. Dengan surat keputusan gubernemen 19 November 1917 No. 43, Partai Sarikat Islam dibubarkan. Semua pengurusnya dinyatakan bersalah, karena menghasut rakyat Pasir mengadakan pemberontakan. Dengan surat keputusan gubernemen 31 Juli 1918 No. 25 Pemerintah Belanda menetapkan:

- (1) Sultan Ibrahim Khaliluddin, mantan sultan Pasir, dihukum buang seumur hidup di Teluk Betung,
- (2) Pangeran Menteri, mantan menteri Kerajaan Pasir, dihukum seumur hidup dan diasingkan ke Padang,
- (3) Pangeran Perwira dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Banyumas,
- (4) Aji Muyub diasingkan ke Bengkulu,
- (5) Aji Nyesei Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, raja muda Pasir, dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Banjarmasin (sesudah itu operasi militer Belanda digiatkan terus sehingga hampir

semua pemimpin pemberontakan tertangkap dan dijatuhi hukuman),

- (6) Pangeran Singa dihukum buang 10 tahun di Garut,
- (7) Andin Dek dan Andin Ngoko dihukum masing-masing 10 tahun dan diasingkan ke Aceh dan Sawah Lunto, dan
- (8) Andin Gedang, Sebaya, dan Wana masing-masing dihukum 10 tahun serta diasingkan ke Semarang, Cilacap, dan Blitar.

Sesudah beberapa tahun di Teluk Betung, Sultan Ibrahim selalu menderita sakit sehingga kemudian dipindahkan ke Cimahi. Karena sakitnya bertambah parah, beberapa tahun kemudian meninggal dunia di tempat pembuangan itu. Pangeran Menteri yang menjalani hukumannya di Padang, beberapa tahun kemudian meninggal dunia di tempat pembuangannya.

Para pejuang lain yang senasib semuanya meninggal dunia dalam pembuangan. Hanya Andin Dek dan Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, mantan sultan muda, dengan selamat kembali ke Pasir sesudah menjalani hukumannya. Pangeran Panji yang ditahan di Banjarmasin, dengan Surat Keputusan Gubernemen 22 April 1914 No. 14, dibuang ke Padang, tetapi sebelum berangkat ke tempat pembuangannya ia meninggal di Pasir.

2.7 Akibat Perlawanan Rakyat di Kerajaan Pasir terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Tahun 1800 -- 1907

Setelah perlawanan Sultan Salehuddin di Tenggara tahun 1844 dapat dipatahkan pasukan Belanda dan memaksakan kedaulatannya atas kerajaan, tiba pula giliran Kerajaan Pasir. Mengingat kekuatan pasukan Belanda yang dipersenjatai dengan alat modern, Sultan Adam dari Kerajaan Pasir terpaksa menandatangani suatu perjanjian pengakuan kedaulatan Belanda pada bulan Oktober 1844. Sejak itu Belanda menjalankan politik *divide et impera* guna mengadudomba bangsawan Kerajaan Pasir. Keluarga raja-raja Pasir pun terpecah menjadi dua, yaitu golongan Sultan Ibrahim Khaliluddin dan golongan Pangeran Panji yang menentang kekuasaan Belanda.

Pertentangan yang berlarut-larut itu menjadi alasan Belanda untuk menghapuskan Kerajaan Pasir dengan membayar ganti rugi kepada golongan Sultan Ibrahim Khaliluddin. Pada bulan Mei 1908, Kerajaan Pasir dihapuskan dan langsung diperintah oleh Gubernemen Belanda. Karena tindakan Belanda ini, Pangeran Panji dan kawan-kawannya semakin gigih mengadakan perlawanan, sehingga Belanda kewalahan dan mendatangkan bantuan serdadu-serdadu dari Banjarmasin dan Jawa. Berkat usaha Sarikat Islam yang berdiri di Pasir pada tahun 1914, kedua golongan Pasir yang tadinya saling bertentangan bersatu kembali dan bersama-sama mengadakan perlawanan terhadap Belanda.

Setibanya bala bantuan Belanda dari Jawa dan Banjarmasin, perlawanan Pasir dapat dipatahkan. Pada tahun 1917 raja-raja dan pemimpin Kerajaan Pasir dibuang ke Jawa dan Sumatera. Sejak itu Belanda memberi tekanan kepada rakyat Pasir. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk maju, sehingga tidak ada putra daerah Pasir yang memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah menengah maupun sekolah tinggi seperti *Kweekschool*, *Normaalschool*, dan *Osvia*.

Sampai pecah Perang Dunia II, rakyat Pasir hidup dalam tekanan, kemiskinan, dan kebodohan. Hampir semua pemimpin rakyat ditangkap dan berpuluh-puluh pejuang mati di tempat pembuangannya. Sesudah tahun 1917, rakyat Pasir tidak mampu lagi mengadakan perlawanan.

CATATAN

1. J. Hagemann. Joz: *Aanteekeningen Omtrent een gedeelte Nan der Oost kust van Borneo*, Tijdschrift Indische Taal en Land volken kunde, deel 4, 1885, hal. 28.
2. Dr. J. Eisen berger, op. cit. hal. 16.
3. *Ibid*, hal. 27.
4. *Ibid*, hal. 32.
5. *Ibid*, hal. 27.
6. *Ibid*, hal. 48.
7. *Ibid*, hal. 78.
8. *Ibid*, hal. 52.
9. *Loc. cit.*
10. *Ibid*, hal. 88.
11. *Ibid*, hal. 78.

BAB III PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN KUTAI TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME

3.1 Identifikasi

Sejak pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martapura (1605 - - 1635) wilayah Kerajaan Kutai meliputi Kabupaten Kutai, Kotamadya Samarinda, dan Kotamadya Balikpapan sekarang. Di sebelah utara berbatasan dengan Kerajaan Berau (sekarang Kabupaten Berau) dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kerajaan Pasir (sekarang Kabupaten Pasir)

Luas wilayahnya 89.413 km, dengan jumlah penduduk dewasa ini hampir 400.000 jiwa. Suku-bangsa yang terbanyak ialah Suku-bangsa Kutai yang tersebar hampir di seluruh daerah itu. Selain itu, berdiam pula suku-bangsa pedalaman yang terdiri atas beberapa suku-bangsa seperti Suku-bangsa Tuntung, Suku-bangsa Bahau, Suku-bangsa Kenyah, Suku-bangsa Benuaq, Suku-bangsa Modang, Suku-bangsa Leng Gelat, Suku-bangsa Basap, dan Suku-bangsa Punan.

Kerajaan Kutai terletak di 1,5° LS dan 1° LS dan antara 114° BT - - 119° BT. Di sebelah utara tumbuh bermacam-macam jenis kayu yang banyak menghasilkan devisa. Tempat-tempat yang menghasilkan minyak bumi ialah Sanga-Sanga dan Balikpapan. Batubara didapat di Loa Kulu, Separi, Batu Din-

ding, dan Loa Tebu. Emas dihasilkan di hulu Sungai Mahakam, dekat Long Iram. Di sebelah timur terdapat Selat Makasar yang kaya ikan laut. Karena kekayaan sumber alamnya, maka pada permulaan abad ke-19 Kutai menjadi rebutan penjajah bangsa Eropa terutama Inggeris dan Belanda.

3.2 Pertumbuhan Kerajaan Kutai

Sampai sekarang para sejarawan masih sependapat bahwa kerajaan yang tertua di Nusantara ini adalah Kerajaan Kutai Mulawarman. Pendapat ini berdasarkan penemuan prasasti Yupa yang merupakan prasasti tertua dari seluruh prasasti yang pernah diketemukan di Indonesia. Di prasasti-prasasti itu pun tidak disebutkan nama kerajaan. Batu bertulis itu diketemukan di Muara Kaman, daerah Kutai. Nama raja yang terkenal seperti yang tersebut dalam prasasti tertulis Mulawarman, sehingga para penulis sejarah menamakan kerajaan itu Kutai Mulawarman.

Berdasarkan cerita rakyat Kutai, Prof. Kern mengatakan sebagai berikut :

Menurut sumber-sumber itu, "Kutai" sudah terkenal di India. Orang India (Hidu) bukan saja mengunjungi negeri itu, tetapi juga tinggal menetap di kutai. Hal itu terbukti dengan benda-benda purbakala yang ditemukan di Kutai yang berasal tahun 400 Masehi.¹

Selanjutnya dijelaskan oleh Prof. Kern, berdasarkan sumber-sumber tertulis dalam bahasa Sangsakerta sebagai berikut:

Sekitar tahun 520 pada sumber-sumber tertulis bahasa Sangsakerta, Kutai disebutkan "Koti" diucapkan "Jawa Koti" yang dimaksudkan bukan jawa tetapi Kutai, yang dianggap sebagai jalur penghabisan dari pelayaran bangsa Hindu pada zaman itu.²

Sedangkan Dr. Eisenberger menuliskan sebagai berikut:

Pada abad kelima kutai mengalami pengaruh langsung dari India. Hal itu nyata dari benda-benda peninggalan sejarah yang didapat di Gua Kombeng, di Kota Bangun dan di Muara Kaman. Pengaruh Hindu untuk beberapa generasi

tidak tampak lagi. Dari beberapa prasasti yang ditemukan, ditulis ada seorang raja bernama mulawarman, putra dari Aswawarman, cucu dari Maharaja Kudungga. Raja itu sangat kasih kepada para Brahmana.³

Dalam Kroniek Cina, dari abad-abad pertama Masehi, dikatakan bahwa orang-orang Cina berdagang ke daerah ini dan menamakannya *Kho Thay*, artinya bagian besar dari pulau.⁴ Berpedoman pada sumber-sumber autentik tersebut pada sejarah menamakan kerajaan di Kutai pada abad kelima itu "Kutai Mulawarman".

Dari tujuh buah batu bertulis ini ada dua di antaranya yang dianggap penting, dan yang pertama berbunyi:

Crimatah crinarendrasya
Kudungasya mahatmanah
Putrovavarme vikhiyatah
Vanca karta yatham cuman
Tasya putra mahatmanah
Trayas traya ivayah
Tesan trajana pravarah
Tapo bola dananvitah
Cri Mulawarman rajendro
Yastro bahusuvarnakam
Tasya yaqasya yupoyam
Dvijedrais samprakal pita⁵

Terjemahannya, 'Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia, mempunyai putra yang mashur Sang Ancawarman namanya, seperti Sang Ancuman (dewa Matahari) menjadi pendiri keluarga Ancawarman, mempunyai putra tiga orang yang seperti api (sinarnya) yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman raja yang besar yang berbudi baik, kuat dan kuasa yang telah mengadakan upacara korban yang disebut 20 mas amat banyak untuk memperingati upacara korban itu lah tugu itu didirikan oleh para pendeta".

Prasasti yang satu lagi berbunyi:

Crimato hypmukhysya
Rajnah cri Mulavarmanah

Danam puy natame kstre
 Yad dattam vaprakecvare
 Dwijatibhyo dnikalpbhyah
 Vincatir ggosahasrikan
 Tasya punysya yu puyam
 Karto vripair lha gataih

Terjemahannya, "Sang Mulawarman raja yang mulia dan terkenal telah mengadakan upacara korban 20.000 ekor sapi di tempat yang suci. Vaprakecwara untuk memperingati upacara korban itulah maka tugu dibuat para pendeta yang datang."

Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dari India Selatan, memakai bahasa Sangsakerta, disusun dalam bentuk syair, dan tidak disebutkan angka tahunnya. Perkiraan prasasti tersebut berasal dari abad ke-4 Masehi adalah dengan membandingkan huruf yang terdapat dalam prasasti itu dengan huruf Pallawa seperti yang terdapat di India yang kebetulan terdapat angka tahun.

Menurut tulisan salah seorang keturunan sultan Kutai Kertanegara yang disusun secara ringkas berdasarkan catatan dan cerita-cerita yang dikumpulkan, asal-usul Kerajaan Kutai Mulawarman adalah sebagai berikut.⁶ Pada abad ke-3 Masehi terjadi peperangan antara Kerajaan Petaliputra dan Kerajaan Kalingga di India. Maharaja Kalingga kalah perangnya, sehingga ia mundur ke tanah Malaya. Di sana ia mendirikan kerajaan baru. Ibukotanya Kota Perak. Raja yang pertama bernama Maharaja Salendra Rajendra Warman dan mempunyai tiga orang putra, yakni:

- (1) Maharaja Mulawarman Nala Dewa, yang mendirikan Kerajaan Kutai I di Martapura, Muara Kaman. Inilah kerajaan Hindu pertama (yang tertua) di Indonesia dalam tahun 400 Masehi,
- (2) Maharaja Gunawarman, yang kemudian mendirikan kerajaan dan menjadi raja Taruma Negara di Jawa Barat, dan
- (3) Maharaja Jayawarman, yang kemudian menjadi raja di Kota Perak, Champa, dan Kamboja.

Pada akhir abad ke-4 Sang Maharaja Mulawarman Nala Dewa pergi berkelana ke luar negerinya beserta sebagian rakyatnya dengan menggunakan perahu-perahu layar. Suatu hari sampailah mereka pada sebuah pulau di sebelah timur Nusantara. Pulau tersebut bernama Nala Dwipa (sekarang Kalimantan). Kemudian mereka mengudik Sungai Mahakam dan berhenti di suatu tempat yang bernama Martapura. Di sana mereka mendirikan kerajaan. Ibukotanya diberi nama Muara Kaman dan kerajaannya dinamai Martapura. Berdasarkan cerita inilah ada beberapa penulis sejarah daerah yang cenderung menamakan Kerajaan Kutai Mulawarman itu sama dengan Kerajaan Martapura dan rajanya Mulawarman Nala Dewa.

Menurut cerita tersebut, urutan raja-raja yang memerintah Kerajaan Martapura mulai dari Mulawarman sebanyak 25 orang sampai kepada raja yang penghabisan disebut "Tiga Raja Sekali Nobat", yaitu Maharaja Darma Setia, Maharaja Setia Gunia, dan Maharaja Setia Yuda. Pada permulaan abad ke-17 Muara Kaman ibukota Kerajaan Martapura dikalahkan oleh Aji Pangeran Sinom Mendapa (1605 -- 1635), raja ke-7 Kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri pada abad ke-14 di Kutai Lama. Sesudah raja ini mengalahkan Kerajaan Martapura atau Martadipura, ia bergelar Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martapura.

Dalam naskah *Silsilah Kutai* yang disusun oleh Encik Muhammad Thaib dan ditulis dengan aksara Arab tahun 1284 H, sudah disebutkan nama "Martapura" dikaitkan dengan nama Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa, tetapi tidak pernah dicantumkan nama Mulawarman.

Sekarang naskah itu disimpan di Museum Kutai Mulawarman, Tenggarong, tetapi ada beberapa lembar yang hilang termasuk lembar pertama. Dalam naskah itu tercantum nama pengarangnya.

3.3 Kerajaan Kutai Kertanegara

Sekitar abad ke-14, muncul pula sebuah kerajaan baru di suatu tempat yang sekarang bernama Kutai Lama. Nama aslinya

Tepian Batu, tetapi dalam cerita rakyat disebut pula Jahitan Layar. Kerajaan ini kemudian bernama Kerajaan Kutai Kertanegara, dan pernah pula disebut oleh penulis sejarah lokal Kutai II, untuk membuat perbedaan dengan Kerajaan Kutai Mulawarman atau Kerajaan Martapura yang disebut sebagai Kerajaan Kutai I.

Raja yang pertama ialah Aji Batara Agung Dewa Sakti. Karena letaknya yang strategis, maka dekat muara Sungai Mahakam, tidak jauh dari Selat Makasar, ibukota kerajaan itu ramai disinggahi oleh perahu-perahu layar, pedagang-pedagang Bugis, Makasar, Jawa, Sulu, dan Cina. Keadaan demikian sangat menguntungkan kerajaan yang baru berdiri itu dan menjadikannya maju pesat.

Pada tahun 1365, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dengan patihnya, Gajah Mada, seluruh Kalimantan menjadi wilayah Kerajaan Majapahit termasuk Pasi, Kutai, dan Berau.

Untuk menjalankan pemerintahan, Kerajaan Majapahit mengadakan pungutan pajak. Dalam usaha memajukan perdagangan diadakan hubungan dengan Jawa, yang dilaksanakan oleh menteri-menteri dari Jawa dengan bantuan armada angkatan laut.⁷

Untuk melancarkan roda pemerintahan sesuai dengan politik kebijaksanaan pemerintah pusat, Aji Batara Agung Dewa Sakti diundang ke Majapahit dengan kendaraannya yang bernama Lembu Suana, langsung tiba di rumah Patih Gajah Mada.⁸

Hubungan dengan Kerajaan Majapahit masih berlangsung sampai kepada pemerintahan raja Kutai ke-3 yaitu Maharaja Sultan (1450 -- 1500). Ia mengunjungi Jawa pada masa pemerintahan Brawijaya, antara tahun 1468 dan 1478. Sekembalinya dari Jawa ia memakai gelar Sang Ratu.⁹

Pada waktu Maharaja Sultan berkunjung ke Majapahit, pengaruh Islam sudah mulai kuat di pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Gresik, Tuban, Pati, Kudus dan Demak. Di bawah pimpinan kerajaan Islam Demak, Kerajaan Majapahit

akhirnya hilang pengaruhnya. Pengaruh dan perkembangan Islam masuk pula ke Kerajaan Kutai Kertanegara sehingga pada masa pemerintahan raja Kutai ke-4, Aji Mandarsyah, Islam telah berkembang di Kerajaan Kutai (1500 -- 1530).¹⁰ Seorang Arab bernama Tuan Tunggang Parangan memiliki peran besar dalam mengembangkan Agama Islam di Kutai. Pada masa pemerintahan raja Kutai ke-6, Makuta (1565 -- 1605), pengaruh Islam berkembang sampai ke Loa Bakung, ke utara sampai Pulau Manubar, Sangkulirang, dan ke selatan sampai ke Balikpapan.

Hubungan dengan Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, bertambah erat dengan dikirimnya seorang aulia bernama Abdul Makmur Chatib Tunggal atau Dt. R. Bandang yakni seorang ulama asal Minangkabau. Setelah sekian lama ulama ini menyebarkan Agama Islam di Kutai, ia kembali ke Makasar.¹¹

Kerajaan Kutai Kertanegara semakin bertambah pengaruhnya sesudah Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa menduduki Kota Muara Kaman, ibukota Kerajaan Martapura. Dengan jatuhnya Muara Kaman, seluruh kerajaan kecil di hulu Sungai Mahakam menggabungkan diri ke Kerajaan Kutai Kertanegara. Pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa inilah Kerajaan Kutai mencapai puncak kebesarannya.

Kerajaan ini sudah mempunyai sistem pemerintahan dengan ketatanegaraan yang baik. Hal ini terbukti dengan diadakannya undang-undang yang disebut Panji Selaten dan undang-undang Maharaja Nanti atau Beraja Niti. Kedua undang-undang dibuat sesudah Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa dapat mempersatukan Kerajaan Kutai Kertanegara dengan Kerajaan Martapura di Muara Kaman. Kerajaan diatur dengan sistem pemerintahan yang teratur, mulai dari dusun, kampung, negeri, dan kerajaan. Menurut undang-undang Panji Selaten, yang dinamakan kerajaan ialah yang beraja, bermenteri, berorang, berhulubalang, dan berhukum dengan adatnya. Yang berpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dengan teluk rantaunya, dan berpanglima dengan angkatan perangnya.

Sedangkan undang-undang Beraja Niti yang mengatur hubungan rakyat dengan rakyat dalam kerajaan itu, memuat hukum-hukum baik sifatnya perdata maupun pidana, misalnya:

Pasal 8

Jikalau orang yang mencuri sampai sepuluh real harta yang dicurinya itu dipotong tangannya, dan jika kurang dari sepuluh real dipotong semua jarinya.

Pasal 40

Bab ini peri hukumnya orang membagi pusaka yaitu dua bagian pada anaknya yang laki-laki dan sebagian pada anak bininya. Jika anak laki-laki semuanya sama saja bagiannya. Jika anak bininya semuanya saja bagiannya, jikalau tiada anaknya, maka hartanya dibagi tiga sebagian pada bininya dan dua lagi kepada raja, demikianlah hukumnya.

Pasal 41.

Sebermula tiga perkara anak yang tidak menerima pusaka orang tuanya atau ibu bapaknya, pertama anak yang disumpahi ibu bapaknya serta dipersaksikan pada hari jum'at kedua anak yang membunuh ibu bapaknya, ketiga anak yang masuk agama kafir atau ke luar dari agama Islam.

Pasal 33

Bermula segala orang yang tidak memberi zakat, karena hak Allah taala, maka dipintanya kepadanya jika ia tiada memberi zakat, maka dia dikreasi, Jika ia menurut kata maka binasakan juga harta harus diganti. Ada pun harta zakat itu orang yang memelihara mesjid itu yang mempunyai makanan zakat fitrah itu. Ada pun orang yang lapar itu seperti api makan padang yang kering.

Dari kutipan pasal-pasal undang-undang Beraja Niti tersebut, banyak unsur-unsur hukum Islam yang diterapkan dan menjadi pandangan hidup rakyat Kutai pada masa itu.

3.4 Hubungan dengan Kerajaan-kerajaan di Nusantara

Hubungan erat antara Kerajaan Kutai Kertanegara dan kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dilihat dari kutipan berikut:

1. Kerajaan Kutai Kertanegara, sangat erat hubungannya dengan kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Gowa, Wajo dan Paneki. Pangeran Dipati tua ing Martapura yang disebut juga pangeran Jembayan, kawin dengan seorang putri Makasar yang terkenal yaitu Karaeng Bonto Rambo pada tahun 1705. 12

Sultan Muhammad Idris Alias Sultan Maslahuddin Idris (1735 -- 1780) Kawin dengan putri Aji Doya Senggeng Ri Sompacucu dari La Madukelleng Arung Matowa Wajo (1736 -- 1754), Perkawinan dengan putri Wajo ini, melahirkan Aji Imbut yang kemudian menjadi Sultan Muslihuddin (1770 -- 1816) yang mendirikan dan membangun kota tenggarong. Keturunan Sultan inilah yang menjadikan raja-raja dan bangsawan Kutai sekarang.

2. Hubungan Kutai dengan Kerajaan Pasir.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Aji Doya Sengeng Ri Sempa dari Pasir adalah anak dari Petta Sibangerang putra La Madukelleng. Petta Sibangerang menikah dengan seorang putri bangsawan Pasir yang bernama anden Ajeng. Dari perkawinan inilah lahir Aji Doya Senggeng Ri Sempa. Karena percampuran perkawinan inilah antara kerajaan Kutai dengan Rakyatnya Erat hubungannya dengan kerajaan Pasir.

3. Hubungan dengan Kerajaan Berau.

Selagi Mudanya Sultan Zainal Abidin kemenakan sultan Aji Kuning dari kerajaan Berau berkelana ke Kutai pada jaman Pemerintahan Pangeran Anom Panji Mendapa Alias Marhum Pamarangan. Dalam menghadapi bajak laut Solok, Zainal Abidin memberikan Bantuannya kepada Kerajaan Kutai. Karena Jasanya itulah ia dikawinkan dengan Putri Dari Pangeran Mangkubumi cucu Marhum Pamarangan yang bernama Aji Galuh Besar sesudah zainal Abidin mangkat ia terkenal dengan nama Marhum di Muara Bangun dan Dikeramatkan rakyat Berau. Beliau dianggap berjasa mempertahankan Berau dari Penggurap Soloi, mengamankan Baddil Kuning Alat Pusaka Kerajaan dan mengembangkan Agama Islam.

Raja Alam Sultan sambaliung di daerah Berau menikah dengan Aji Antu Putri dari Petta Pangeran Dengan Aji Bungsu Putri Bangsawan Kutai.

Dari perhubungan Perkawinan inilah terjadi hubungan yang baik dengan raja-raja Berau. Terakhir Sultan Siranuddin Sultan Gunung Tabur (1892 -- 1921) Menikah dengan Aji Nasibah anak sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850 -- 1888), dari kerajaan Kutai.

3.5 Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme

Di bawah pimpinan raja-rajanya yang berpandangan luas Kerajaan Kutai berkembang terus serta bersahabat dengan kerajaan-kerajaan lain berdasarkan prinsip saling hormat-menghormati. Kerajaan Kutai mengadakan hubungan bukan saja dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Wajo, Gowa, Berau, Singasari, Kediri, dan Majapahit, tetapi juga dengan luar negeri seperti Cina dan India sejak zaman Kerajaan Majapahit, baik di bidang perdagangan maupun pemerintahan. Hubungan dengan luar negeri semakin bertambah pesat, terutama sesudah pusat pemerintahan Kerajaan Kutai Lama dipindahkan ke Kota Tenggarong semasa pemerintahan Sultan Muslihuddin. Pada tahun 1792 hubungan perdagangan diperluas dengan negara-negara Eropa, Rusia, dan Asia dengan prinsip saling hormat-menghormati atas kedaulatan negara masing-masing.

Hampir bersamaan waktu, yakni pada saat-saat Kerajaan Kutai Kertanegara membenahi diri di dalam pergaulan inter-

nasional sebagai suatu kerajaan yang merdeka, negara-negara Eropa seperti Portugis, Belanda, Spanyol dan Inggris, mencari daerah-daerah baru di segenap pelosok bumi ini, termasuk Belanda, melalui Kompeni Hindia Timur (VOC) yang terkenal dengan pedagang yang bertongkat senapan.¹³

Pada tahun 1634 Kompeni mengirim tiga buah kapal dagangnya ke Kutai dan Pasir. Dengan mengharapkan bantuan dua kerajaan ini, Kompeni berusaha mengusir pedagang-pedagang Makasar dan Jawa. Tentu saja maksud ini ditentang oleh raja Kutai Kertanegara, karena melanggar prinsip dasar hubungan antara Kutai Kertanegara, Kerajaan Gowa, dan kerajaan-kerajaan di Jawa. Selain itu sikap VOC jelas mengadudomba raja-raja di Nusantara dan memaksakan sistem monopoli perdagangan yang merugikan pihak Kutai. Sikap Kerajaan Kutai Kertanegara dan Kerajaan Pasir ini merupakan awal dari sejarah menentang kolonialisme Belanda.

Pada tahun 1635 VOC mengirim Gerrit Thomassen Pool ke Kutai untuk memperingatkan Kutai akan kewajibannya membayar upeti pada Banjarmasin.¹⁴ Peringatan yang disampaikan oleh Gerrit Thomassen Pool itu tentu tidak diterima begitu saja oleh Kerajaan Kutai dan Pasir. Kerajaan Kutai sudah mengetahui taktik kotor VOC untuk mengadudomba Kerajaan Kutai dan Banjarmasin seperti yang dilakukannya terhadap kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Raja Kutai marah terhadap sikap VOC, karena sudah dua kali mengadudomba Kutai. Pertama terhadap Makasar dan Jawa, dan kedua terhadap Kerajaan Banjarmasin.

Pada tahun 1671 Kompeni mengirimkan Paulus de Beck dengan kapal Chialop de Noorman ke Kutai dan ke Berau untuk mengadakan hubungan dagang. Di Kutai, Paulus de Beck menemui Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martapura, tetapi tidak berhasil mengadakan hubungan dagang.¹⁵

Untuk ketigakalinya VOC tidak berhasil membujuk Kutai dan Berau untuk mengadakan hubungan dagang sebagai kedok

untuk memaksakan sistem monopolinya. Takut oleh munculnya pemukiman baru orang Inggris di Banjarmasin pada tahun 1747, Kompeni mengirimkan ekspedisi yang terdiri atas tujuh buah kapal di bawah pimpinan Van der Heyden untuk menghadang perahu-perahu Cina dan kemudian menuju ke Banjarmasin. Van der Heyden juga mendapat tugas untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang Kutai dan Pasir. Dua kerajaan ini dianggap baik sebagai partner dagang tetapi bagi orang-orang Eropa dirasakan sangat berbahaya untuk mencobanya.¹⁶ Dalam laporan Van der Heyden ada dua hal yang tidak diungkapkan. Pertama, Kutai dan Pasir dapat dijadikan teman berdagang yang baik serta menguntungkan. Kedua, sangat berbahaya bagi orang Eropa untuk mencobanya.

Untuk memajukan kerajaan serta rakyatnya, Kerajaan Kutai Kertanegara sejak berdirinya telah mengadakan hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun dengan negara-negara lain di luar negeri seperti India, Cina, dan Pilipina. Hubungan tersebut didasarkan atas saling hormat-menghormati kedaulatan secara masing-masing. Terhadap VOC pun pernah dilakukan hubungan dagang pada tahun 1672. Kutai dan Pasir pernah mengirim barang-barang dagangannya ke Makasar, tetapi atas perundingan bilateral yang tidak merugikan salah satu pihak. Kasus yang kedua sangat berbahaya bagi orang Eropa, karena mereka mencoba berhubungan langsung dengan rakyat Kutai dan Pasir. Tindakan itu jelas melanggar kedaulatan kedua kerajaan. Jika VOC diberi kesempatan langsung berdagang dengan rakyat Kutai dan Pasir, Belanda dengan akal liciknya akan memanfaatkan kesempatan untuk mengadudomba rakyat dengan pemimpin-pemimpin kerajaan itu seperti yang dilakukannya terhadap Kerajaan Pasir.

Masalah penting yang menjadi pertimbangan ialah bahwa Kerajaan Kutai Kertanegara adalah sekutu erat Kerajaan Wajo pada masa pemerintahan La Madukelleng Arung Matowa Wajo (1736 -- 1754). Ia juga seorang pahlawan Wajo yang sangat anti penjajah, terutama sekali terhadap VOC. La Madukelleng dengan anak buahnya menguasai pelayaran di Selat Makasar.

Menurut Asisten Residen Bone L.A. Emanuel, La Madukelleng adalah "bajak laut" yang paling ditakuti di perairan Selat Makasar. Ia memiliki 40 kapal layar dengan ratusan anak buah.

S sejak umur 14 tahun, jadi selama 22 tahun, La Madukelleng tinggal menetap di Kalimantan Timur, terutama di Pasir. Selama 22 tahun itu ia berkelana di perairan Selat Makasar dan Berunai sampai ke Malaya. Sesudah kembali, ia diangkat menjadi raja Wajo pada tahun 1736. Dua orang putranya yang terkenal ialah Petta Turawe dan Petta Siberangeng. Keturunannya banyak yang menikah dengan keturunan raja Kutai, Pasir dan Berau.¹⁷ Putra ketiga yang juga terkenal ialah Petta To Siangka. Ia berdagang ke Sulawesi Tengah dan kemudian menurunkan raja-raja di daerah itu.

Selain itu La Madukelleng juga dibantu oleh beberapa bangsawan menengah seperti La Mohang Daeng Mangkona yang menguasai perairan Kutai dan Selat Makasar, La Pallawa Daeng Marowa yang menguasai perairan Pasir, Puanna Dekko yang menguasai perairan Pulau Laut dan Pegatan, La Siredjo Daeng Menambong yang pergi ke Kalimantan Barat kemudian kawin dengan saudara raja Matan Nyai Tua dan perahu-perahu layarnya menguasai lautan di pesisir pantai pulau itu, dan La Mandja Daeng Lebby yang pergi ke Riau kemudian tinggal di Kampung Penyengat serta kawin dengan saudara Bendahara, raja Riau.

Dengan mempertimbangkan kekuatan Kerajaan Kutai Kertanegara yang dibantu oleh pelaut-pelaut suku Bugis inilah, Van der Heyden menganggap belum saatnya untuk mengadakan hubungan dengan Kerajaan Kutai dan Pasir. Hingga jatuhnya VOC tahun 1799, Kompeni Hindia Timur tidak dapat menguasai Kutai Kertanegara dan Kerajaan Pasir. Tidak seorang bangsa Eropa pun yang berani bermukim di kedua kerajaan itu. Tak satu pun kerajaan di Kalimantan Timur yang mengadakan perjanjian persahabatan, apalagi kontrak pengakuan kedaulatan Belanda. Semua kerajaan dapat mempertahankan kemerdekaan-

nya sampai masa Pemerintah Hindia Belanda tahun 1800.

3.6 Perlawanan Sejak Tahun 1800

3.6.1 Perlawanan pada Tahun 1825

Dalam Konvensi London tahun 1814, (perjanjian antara Inggris dan Belanda), Inggris menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda. Pemerintah Belanda mengirimkan komisararis jenderal untuk memantapkan kekuasaannya di Indonesia. Hampir seluruh pelosok tanah air menolak kedatangan penjajah Belanda itu.

Pada tahun 1825, Pemerintah Belanda di Betawi mengirimkan utusannya yang bernama George Muller.¹⁸ Karena akal licik utusan Belanda itu, Sultan Salehuddin (1816 -- 1845) bersedia mengadakan perjanjian. George Muller sebagai orang Eropa pertama yang mencoba menjelajahi dan menyelidiki Kerajaan Kutai Kertanegara melalui Sungai Mahakam. Jika misinya itu berhasil, ia bermaksud meneruskan petualangannya ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Sikap dan tindakan George Muller dianggap oleh Kerajaan Kutai Kertanegara sebagai suatu perbuatan yang melanggar kedaulatan dan kehormatan kerajaan. George Muller dianggap sebagai utusan sekaligus mata-mata Belanda. Bersama pengikutnya kemudian ia dibunuh dekat Muara Kaman. Kapten Gravesome dengan sebagian besar anak buahnya juga dibunuh oleh prajurit Kutai. Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat melakukan pembalasan, karena sedang memusatkan tentaranya menghadapi Perang Paderi (1821 -- 1837) dan Perang Diponegoro (1825 -- 1830).

3.6.2 Perlawanan terhadap Inggris Tahun 1844

Sebagian dari orang-orang Inggris tidak dapat menyetujui isi dari Konvensi London. James Brooke menduduki Kalimantan Utara tahun 1826. Ia mengangkat dirinya sebagai raja Kalimantan Utara. Di antara beberapa orang Inggris ada yang mencoba mengikuti jejak James Brooke untuk menjadikan

Kalimantan Timur seperti Kalimantan Utara. Seorang Inggris bernama John Dalton, secara diam-diam telah mengadakan penyelidikan di daerah Kutai. Dengan cara menetap sementara pada suatu tempat kemudian berkeliling ke tempat lain selama sebelas bulan, yakni dari bulan Desember 1827 sampai Oktober 1828. Ia dapat mengumpulkan data-data tentang Kerajaan Kutai. Menurut laporannya, yang dianggap penting antara lain ialah tentang kematian Mayor George Muller. Dalton berpendapat bahwa Sultan Salehuddin terlibat dalam perencanaan pembunuhan Muller. Bagi gubernemen, sebenarnya tidak terlalu sukar untuk menempatkan Kutai di bawah pemerintahannya, walaupun untuk orang Eropa sangat berbahaya dan tidak mudah bepergian di daerah ini dalam keadaan selamat. Dalton sendiri dengan susah-payah melarikan diri dari daerah Kutai. Ia selamat sampai di Sulawesi.

Tujuhbelas tahun kemudian, seorang Inggris bernama J. Erskine Murray mencoba mengadu untung mengikuti jejak James Brooke. Tujuannya ialah Kutai, Kalimantan Timur. Di Hongkong ia berhasil menyewa dua buah *brig* (sejenis perahu dagang). Pada bulan Pebruari 1844, ia datang ke Kutai dengan sekunarnya, *The Young Queen* dan *The Anna*. Sultan Salehuddin menyambut baik kedatangan orang Inggris itu. Sultan mengharapkan bahwa kedatangan J.E. Murray akan membuka jalan bagi datangnya saudagar-saudagar Inggris berdagang ke Kutai, tetapi setelah J.E. Murray meminta sebidang tanah untuk mendirikan sebuah *factorij* (kantor dagang bagi pemukiman orang Inggris) dengan alasan melindungi pedagang-pedagang Inggris, Sultan Salehuddin tidak dapat menyetujuinya. J.E. Murray bersikeras memaksakan kemauannya sehingga terjadi perselisihan. Dengan penolakan Salehuddin ini, maka gagallah rencana petualangan J.E. Murray untuk menguasai Kutai.

Sultan beserta rakyat Kutai sangat marah atas tindakan dan sikap J.E. Murray. Ia dianggap telah melanggar kedaulatan Kerajaan Kutai. Para perajurit Kutai bersiap-siap menjaga segala

kemungkinan. J.E. Murray memerintahkan kedua *sekunar* dagangnya mudik ke Kota Tenggarong. Orang-orang Inggeris itu mengancam sultan. Mereka akan memusnahkan Kota Tenggarong apabila permintaannya tidak dipenuhi.

Sultan dan rakyat Kutai yang sebelumnya belum pernah menemui sikap orang Eropa sekasar itu, segera memerintahkan supaya menghukum orang-orang Inggeris itu dengan jalan menembaki *sekunar* dagang Murray di Sungai Mahakam. Orang-orang Inggeris itu dapat dikalahkan dan J.E. Murray sendiri tewas bersama dua orang anak buahnya.

Peristiwa J.E. Murray ini, oleh W. Gave Thomas dalam buku karangannya yang berjudul *Murray Expedition to Borneo* yang diterbitkan di London pada tahun 1893, isinya antara lain adalah sebagai berikut:

In February 1844 the young queen and the anna two british trading brigs chartered and Commanded by an enterprising cot name the moon, erakine murray arrived at koetei on the east of borneo the local sultan Gave warm welcome to murray and his companion and expressed the hope that the re would be first of many smilar visits by british merchants but the leader on the expedition asket permission to take up permancent residence at koetei, in order to protect british trade, his request was premtorily refused.

This should undoubtedly have served as warning but murray very foolisbly allwed his ships to be lured up to mahakam river ti tenggarong a small twon some twenty five miles from samarinda.

The sultan immediately stand up betteries of gims along the rivers banks to provent their escape, murray threaten to destory the town if not alloved to proceed, but his bluff failed and his men had to fight their way down the coast amid a strom of hostile fire.

There, when they had almost succeed in the gauntlet of sultans coms, they were engaged by alarge flotilla of pirates and three number's of the expeditions, including its commanders were killed. 19.

Peristiwa kekalahan Murray ini diketahui oleh Pemerintah Inggeris, Pemerintah Inggeris memutuskan untuk mengirimkan angkatan lautnya untuk menghukum Kutai. Pemerintah Inggeris juga menuduh Pemerintah Belanda tidak mampu memelihara ketertiban dan keamanan jajahannya. Keputusan Pemerintah Inggeris ini diprotes oleh Pemerintah Belanda. Melalui kedutaannya di London, dikemukakannya bahwa keputusan

Inggeris untuk mengirimkan angkatan lautnya ke Kutai bertentangan dengan Konvensi London 1814 dan Traktat London 1824. Pemerintah Belanda menyanggupi untuk menerbitkan jajahannya. Kejadian-kejadian ini menyebabkan merosotnya pandangan luar negeri atas ketidakmampuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pelaksanaan Konvensi London.

Kasus Kutai dengan terbunuhnya J.E. Muray menjadi peristiwa yang sangat penting di mata internasional, terutama bagi bangsa Inggeris dan Pemerintah Hindia Belanda. Dengan berakhirnya perlawanan Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol, angkatan perang Belanda mulai bertindak memerangi Kerajaan Kutai Kertanegara.

3.6.3 Perlawanan terhadap Belanda Tahun 1844

Pada awal Pebruari 1844 Pemerintah Hindia Belanda mengirimkan angkatan lautnya di bawah pimpinan Letnan T. Hoofd ke Kutai.²⁰ Utusan Belanda meminta supaya sultan menandatangani suatu kontrak tentang pengakuan sultan terhadap kedaulatan Pemerintah Belanda atas Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Kertanegara yang sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit pada awal abad ke-15, jadi lebih dari 300 tahun sebagai kerajaan yang merdeka, tentu tidak akan begitu mudah menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah asing.

Permintaan Belanda itu ditolak oleh Sultan Salehuddin dengan seluruh angkatan perangnya. Terjadilah peperangan antara Kerajaan Kutai Kertanegara dengan angkatan perang Kerajaan Belanda. Sultan Salehuddin yang dalam tubuhnya masih mengalir darah La Madukelleng Arung Matowa Wajo, pantang menyerah sebelum bertempur. Armada Belanda menembaki Kota Tenggarong dari kapal perang dan dari Kampung Prijiwa di seberang ibukota yang sudah diduduki angkatan laut Belanda. Rakyat Kutai dibantu oleh pejuang-pejuang Bugis Wajo yang terkenal keberaniannya. Pada 17 April 1844 Kota Tenggarong dibumihanguskan Belanda termasuk keraton. Banyak pahlawan Kutai tewas dalam pertempuran hebat itu.

Sultan Salehuddin memindahkan markasnya ke Kota Bangun karena keraton sudah habis terbakar. Pertempuran berkurban terus. Kota Tenggarong dikepung Belanda dari segenap penjuru. Serdadu-serdadu Belanda yang sudah terlatih mempergunakan alat senjata modern, terus menggempur prajurit Kutai dan Bugis yang bertahan dengan semangat juang berkobarkobar mengimbangi kekuatan lawan. Dalam pertempuran ini dua orang putra Sultan Salehuddin yaitu Pangeran Surya Manggala dan Pangeran Dipati dapat ditangkap oleh Belanda. Menurut cerita rakyat, konon seorang panglima perang Kutai bernama Awang Long yang sudah tua tewas ditimpa reruntuhan kayu ulin.

Sesudah kematian panglima perangnya dan tertangkapnya kedua putra Sultan Salehuddin, perlawanan prajurit diteruskan secara kecil-kecilan. Dengan akal liciknya kedua putra sultan dijadikan sandera oleh Belanda. Pimpinan perang Belanda menancam putra sultan akan dihukum dan dibawa ke Betawi jika rakyat tidak menghentikan perlawanan.

Mangkubumi Kerajaan Kutai Nyi Raden Bangsa yang sudah berumur 90 tahun merasa cemas kalau-kalau kedua putra sultan dibawa Belanda ke Betawi dan dibunuh di sana. Karena itu Nyi Raden Bangsa mudik ke Kota Bangun untuk bermusyawarah dengan sultan. Para pemimpin serta sebagian menteri kerajaan berpendapat, agar untuk sementara waktu diadakan gencatan senjata. Pertama, Kota Tenggarong telah dibakar musuh dan prajurit banyak yang tewas. Kedua, obat pasang telah habis, sedang nakhoda Lembay dan Daeng Pasereg yang ditugaskan ke Singapura memberi mesiu belum juga datang. Ketiga, khawatir kedua putra akan dihukum mati oleh tentara Belanda. Kalau peperangan diteruskan, lebih banyak ruginya dari pada keuntungannya. Di pihak rakyat akan bertambah korban yang jatuh. Sultan Salehuddin terpaksa ke Tenggarong untuk mengadakan perundingan dengan Wakil Gubernemen Belanda Komisaris A.L. Weddik.

Pada 11 Oktober 1844 diadakan penandatanganan perjan-

jian, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :²¹

- (1) Sultan Salehuddin mengakui Pemerintah Belanda sebagai pemerintah tertinggi lagi sah,
- (2) Pemerintah Kerajaan Kutai Kertanegara harus menaati gubernemen Belanda, dan
- (3) Pemerintah Kerajaan Kutai Kertanegara berjanji akan menjaga ketertiban dan keamanan daerahnya dari gangguan perampok dan menghukumnya.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, lenyaplah kedaulatan Kerajaan Kutai sebagai suatu kerajaan merdeka.

Setelah itu gubernemen Belanda memerintahkan Gezaghebber Van de Wall mengadakan perjalanan dari Banjarmasin ke Pasir dan Kutai dari 1 November 1946 sampai 2 September 1947 untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun garis kebijaksanaan politik bagi pemerintah Kerajaan Kutai. Beberapa bulan sudah penandatanganan perjanjian itu Sultan Salehuddin meninggal dunia (1845).

Laporan perjalanan Van De Wall yang berjudul *Overzicht van het Rijk van Koetei, terjemahannya adalah sebagai berikut*:²²

11 DESEMBER 1846

Kota tenggarong terletak di dataran rendah. Rumah dibangun tinggi di atas tanah, sebanyak 25 buah di darat dan 97 buah rumah sakit. Penduduknya 700 orang suku Kutai, 100 orang suku Bugis dan 3 orang cina, di mana-mana nampak bekas-bekas kebakaran sebagai akibat peperangan. Tiang-tiang Keraton kelihatan hangus akibat terbakar. setelah peperangan itu sultan salehuddin meninggal dunia di kota. bangun yang jauhnya 3 hari mudik dari tenggarong jenazahnya dimakamkan di tenggarong, di tempat pemakaman raja-raja dari kerajaan Kutai. Pada waktu pemakaman itu, banyak sekali rakyat dan keluarga Sultan berkumpul di Tenggarong. Pada kesempatan itulah rakyat dan keluarga Sultan dapat melihat dan terkenang kembali bekas kediaman mereka. Selesai pemakaman sultan, rakyat kembali membangun rumah kediaman mereka di atas puing-puing reruntuhan kota tenggarong.

Van de Wall kemudian diangkat menjadi asisten-residen yang pertama di Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Palaran dekat Kota Samarinda Seberang.²³ Perjanjian yang

dibuat oleh A.L. Weddik pada 11 Oktober 1844 hanya berlaku sampai 19 Oktober 1850. Sesudah itu dibuat pula perjanjian baru oleh J.A. Gallois, residen Selatan dan Timur Pulau Borneo dengan perwakilan Kerajaan Kutai Kertanegara, karena Sultan Aji Muhammad Sulaiman masih di bawah umur. Pada 17 Juli 1863 dibuat pula kontrak baru yang ditandatangani oleh residen Selatan dan Timur Pulau Borneo Kolonel E.C.F. Happe dengan Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Pada 12 Juli 1896 dibuat perjanjian tambahan mengenai kewajiban untuk memasukkan dan mengeluarkan senjata dan mesiu di Kerajaan Kutai haus mendapat izin dari residen Selatan dan Timur Pulau Borneo. Pada 16 Maret 1898 Gedr. St. 1898, 1899, 166 No. 31 dibuat pula suatu ketetapan tentang hak gubernemen Belanda untuk mengusir orang-orang yang dianggap berbahaya bagi ketertiban dan keamanan umum di Kerajaan Kutai. Akhirnya pada 27 Agustus 1898 ditandatangani oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman penyerahan penguasaan pelabuhan dan polisi pelabuhan kepada gubernemen Belanda.²²)

Perjanjian, kontrak tambahan, dan pelaksanaan hak kekuasaan kepada gubernemen bertujuan untuk memantapkan penjajahan Pemerintah Belanda atas Kerajaan Kutai. Dengan tidak diizinkannya Kutai memasukkan dan membeli senjata, Kerajaan Kutai tidak berkesempatan lagi untuk mengadakan perlawanan bersenjata. Diberlakukannya ketentuan dan hak gubernemen untuk mengusir orang-orang yang dianggap berbahaya bagi ketertiban dan keamanan umum, mengakibatkan tokoh-tokoh pergerakan politik ataupun partai politik tidak dapat hidup subur di Kerajaan Kutai Kertanegara. Partai politik hanya dapat hidup di daerah yang langsung diperintah oleh gubernemen, seperti Kota Samarinda, daerah *rechtstreeks gouvernement bestuurs gebied* dari tahun 1896 -- 1942. Di kota ini partai politik Parindra dan Gerindo dapat hidup dan berkembang.

Selama satu generasi yaitu pada masa pemerintah dan Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850 -- 1899), gubernemen Belanda telah dapat menancapkan kukunya untuk meman-

tapkan penjajahannya di Kerajaan Kutai Kertanegara. Namun demikian di bidang ekonomi Sultan Sulaiman masih mempunyai hak untuk memungut segala cukai masuk dan keluar kerajaannya dan masih dapat mengadakan hubungan dagang ke Singapura serta ke Hongkong, sehingga rata-rata pendapatannya setelah lebih kurang satu setengah juta gulden, menjadikan sultan kaya raya.

Pada 2 Desember 1899, Sultan Aji Muhammad Sulaiman meninggal dunia. Putranya, Aji Muhammad Alimuddin Ali Adil Khalifatul Mukminin, dengan Surat Keputusan Gubernemen 22 Maret 1900 No. 9, ia diakui sebagai sultan Dengan sultan yang baru ini gubernemen Belanda mulai mengadakan perjanjian yang menguntungkan di bidang keuangan. Pada 25 Juli 1900, Geds. St. 2 de Kamer St Gen 1900 – 1901, 169 No. 6 ditandatangani kontrak penyerahan hak dari Kerajaan Kutai kepada gubernemen Belanda tentang :

- (a) Hak pemungutan cukai barang masuk dan keluar dari Kerajaan Kutai Kertanegara,
- (b) Hak untuk memasukkan dan menjual candu di kerajaan itu,
- (3) Hak untuk memasukkan dan menjual garam,
- (4) Hak untuk menghapuskan cukai di Tenggarong,
- (5) Dan lain-lain.

Dengan dihapuskannya pemungutan cukai dan penyerahan kepada gubernemen serta hak-hak lain seperti tersebut di atas, Sultan Muhammad Alimuddin mendapat ganti rugi berupa pemberian gaji cukai tambang minyak, ganti pemungutan cukai, dan lain-lain sejumlah F. 622.900 (Enamratus duapuluh duaribu sembilanratus gulden) setahun. Demikian pula menteri Kerajaan Kutai Kertanegara mendapat gaji yang cukup besar.

Pada 28 April 1910 Sultan Muhammad Alimuddin meninggal dunia. Karena putra mahkota Pangeran Adipati Anom Soeria masih di bawah umur maka dengan Surat Keputusan Gubernemen 26 September 1911 no. 17 diangkat Pangeran Mangku Ngoro sebagai *Regent van Koetei*. Setelah Pangeran

Adipati Anom Soeria Adiningrat akil baliq, berdasarkan Surat Keputusan Gubernemen 14 November 1920, ia diangkat menjadi Sultan Muhammad Parikesit di Kerajaan Kutai Kertanegara. Gaji dan pendapatan lain diterima dari kas kerajaan sebesar f. 322.900 (tigaratus duapuluh duaribu sembilanratus gulden), setahun. Dengan sultan penghabisan ini dibuat pula suatu perjanjian yang disebut *Zelfbestuur regelen Staatsblad 1930* No. 529 di Samarinda yang sisanya mengenai sistem pemerintahan untuk kepentingan Belanda.

Dengan politik penjajahannya yang licik dan memberikan fasilitas yang menyenangkan, gubernemen Belanda dapat menjinakkan sulta-sultan dengan orang kepercayaan sehingga sesudah Sultan Salehuddin meninggal dunia, tidak ada lagi perlawanan bersenjata dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Perjanjian dan kontrak yang mengikat raja-raja itu menyebabkan rakyat tidak dapat bergerak untuk mengadakan perlawanan baik dengan senjata maupun melalui bidang politik. Betapa kuatnya ikatan dan cengkeraman Belanda terhadap Kerajaan Kutai sehingga Kerajaan Kutai tak dapat bergerak kecuali memilih alternatif untuk menaati perjanjian demi perjanjian yang telah ditandatangani.

Keadaan ini berlangsung terus sampai masuknya tentara Jepang tahun 1942. Pada masa awal pemerintahan imperialisme Jepang terutama dengan semboyan Tiga A-nya, rakyat Kalimantan Timur menunjukkan simpatinya khususnya di daerah Kutai Tetapi setelah Jepang menunjukkan sikap yang bertentangan dengan janjinya, sikap rakyat pun berbalik menjadi antipati. Saat-saat Jepang menghadapi kehancurannya, rakyat Muara Muntai di hulu Sungai Mahakam mempunyai kesempatan untuk mengadakan perlawanan dengan membunuh beberapa orang tentara Jepang.

3.6.4 Akibat Perlawanan Rakyat di Kerajaan Kutai terhadap Imperialisme dan Kolonialisme.

Politik :

- (1) Kerajaan kutai Kutai tidak dapat berbuat sebagai suatu kerajaan yang berdaulat penuh dengan telah ditandatangani perjanjian yang mengakui kedaulatan Belanda atas Kerajaan Kutai.
- (2) Keadaan sebagaimana butir 1, memberikan peluang besar kepada penjajah untuk mengadakan suatu peraturan yang menguntungkan baginya.
- (3) Pemecahan wilayah Kerajaan Kutai menjadi dua pola pemerintahan, yaitu daerah yang langsung dikuasai oleh Belanda (*hechstreeksbestuurgebied*) dan daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kutai (*Zelfsbestuurgebied*)

Sosial Ekonomi :

- (1) Monopoli perdagangan oleh Belanda.
- (2) Kerajaan Kutai tidak boleh melakukan hubungan dagang legal/ilegal dengan luar negeri kecuali Belanda.
- (3) Keadaan ekonomi rakyat tertekan

3.7 Perlawanan Rakyat Samarinda

3.7.1 Lahir pada Berkembangnya Kota Samarinda.

Meskipun Samarinda dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Kutai, namun perlu disoroti secara khusus karena kegiatan partai-partai di sana relatif lebih leluasa dari pada di wilayah Kerajaan Kutai sendiri seperti di ibukota Tenggarong. Hal ini dapat kita baca dari *Suppletoire Centracketen* antara Sultan Aji Muhammad Sulaiman dengan Pemerintah Hindia Belanda. Pada 16 Maret 1888, karena haknya, Pemerintah Hindia Belanda dapat mengusir orang-orang yang dianggap berbahaya bagi ketertiban umum ke luar Kutai dengan keputusan gubernur jenderal Hindia Belanda.

Kotamadya Samarinda sekarang wilayahnya seluas 2727 km² ²⁴ dan terbelah oleh Sungai Mahakam; sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Timur. Sungai ini berasal dari sebuah desa kecil yang didirikan oleh pengungsi-

pengungsi Bugis dari Sulawesi Selatan. Desa itu bernama Samarinda dan sekarang menjadi Samarinda Seberang. Sampai sekarang Samarinda Seberang penduduknya terutama terdiri atas suku bangsa Bugis. Di bagian kota yang bernama Samarinda, penghuninya terutama suku bangsa Banjar. Namun demikian banyak pula suku-suku bangsa Kutai, Jawa, Madura, Meksar, dan lain-lain. Perdagangan antarpulau maupun ekspor-impor dikuasai orang-orang Cina.

Bagian Sungai Mahakam yang membelah Kota Samarinda lebih lebar dari pada bagian Sungai Mahakam lainnya sehingga mudah bagi kapal-kapal besar berlabuh di sana.

Asal mula Kota Samarinda hanyalah bagian kota yang sekarang bernama Samarinda Seberang terutama orang-orang Bugis yang pindah dari tempat asalnya, Sulawesi Selatan.

Mengapa mereka pindah ke tempat yang sekarang bernama Samarinda Seberang? Pada tahun 1710, suatu perkawinan agung akan dilaksanakan antara putra mahkota Kerajaan Gowa dan Tallo (Makasar) dengan putri raja Bone. Dalam kesibukan penyelenggaraan perkawinan agung terjadi kerusuhan yang berpangkal pada matinya anak Mattola Bone atau bangsawan tinggi tersebut ditikam oleh La Madukelleng putra Arung Paneki dari Kerajaan Wajo (Engkang). Peristiwa tersebut terjadi pada saat diselenggarakan acara menyabung ayam dalam suatu gelanggang khusus di depan istana raja Bone. Pada masa itu bila ada perhelatan besar, terutama perkawinan raja-raja, maka dipancarkanlah gelanggang sabung ayam. Para penonton terutama raja-raja, mengikutinya dengan taruhan yang besar. Dalam kesempatan tersebut raja Bone mengundang raja-raja tetangganya, termasuk juga raja Wajo. Raja Wajo mengutus putra dari Paneki yaitu anak Petta Cakkuridi. Petta Cakkuridi adalah menteri Kerajaan Wajo, tetapi ia juga *arung* dari Paneki.

Raja-raja yang diundang ikut menyabung ayam dengan taruhan besar-besaran. Perutusan Kerajaan Wajo terdiri atas 28 orang putra bangsawan Wajo dikepalai oleh La Madukelleng.

Rombongan ini tak mau ketinggalan ikut menyabung. Malang bagi rombongan utusan Wajo tersebut. Ayam jago mereka kalah dan mati. Para penonton dalam gelanggang tersebut bersorak-sorai, bahkan ada yang mengejek dan mencemoohkan utusan Wajo tersebut dengan kata-kata yang menyakitkan hati.

La Madukelleng yang duduk berdampingan dengan putra Makadanggi Tana dari Kerajaan Bone (bangsawan tinggi Bone), merasa tersinggung karena mendengar kata-kata hinaan tersebut. Ia menghunus kerisnya dan menikam Makadanggi Tana. Putra bangsawan Bone tersebut tersungkur dan meninggal di tempat itu juga.

La Madukelleng beserta pengikut-pengikutnya meninggalkan gelanggang penyabungan dengan menunggang kuda pulang ke Wajo. Lima hari kemudian datang utusan Kerajaan Bone ke Wajo. Utusan itu langsung menghadap raja Bone yang sudah berumur 90 tahun, Petta Arung Ma Towa Ra Salengeng Ta Tenri Puajung. Mereka menuntut agar La Madukelleng beserta rombongannya diserahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia bukan saja telah menyebabkan matinya putra seorang bangsawan tinggi, tetapi juga telah mencemarkan majelis raja Bone dan menodai sauraja Bone.

Tuntutan raja Bone tersebut disertai ancaman apabila La Madukelleng serta anggota rombongannya tidak diserahkan untuk diadili di Bone, maka daerah Tancung dan Impa Kimpa yang merupakan bagian Kerajaan Wajo akan diduduki dan dinyatakan sebagai milik Kerajaan Bone. Tuntutan itu dijawab oleh raja Wajo Petta Arung Matowa La Salengeng Tenri Rua dengan penuh bijaksana. Baginda meminta waktu sehari semalam untuk mengadakan sidang dewan Kerajaan lebih dahulu. Utusan Bone kembali dan menunggu jawaban Wajo di perbatasan kerajaan.

Raja Wajo mengundang menteri-menterinya yang disebut *Arung Ennengnge* yang terdiri atas *Petta Ranceng Betteng* (Perdana Menteri merangkap Kehakiman dan Keamanan), *Petta Ranreng I Tua* (Menteri dalam Negeri), *Petta Ranreng*

Salo Tenreng (Menteri Keuangan dan Perekonomian), *Petta Cakkuridi* (Menteri Luar Negeri), *Petta Pila* (Menteri Pertanian), *Petta Pattola* (Menteri Pertahanan), dan tiga orang penasihat agung yang disebut *Arung Suro Ri Basa*²⁵.

Dalam rapat kerajaan (*aduppa rapang*) tersebut setelah terjadi perdebatan, sesuai dengan hukum adat Kerajaan Wajo, diputuskan untuk tidak menyerahkan penduduknya pada kerajaan lain untuk diadili. Kerajaan Wajo sendiri tidak akan menjatuhkan hukuman kepada La Madukelleng. Adalah kelalaian dan kesalahan aparat Kerajaan Bone sendiri tidak dapat menangkap atau membunuhnya sekaligus pada waktu terjadinya insiden tersebut. Dalam peristiwa tersebut, La Madukelleng dianggap sudah mati. Maka tidaklah mungkin menghukum orang yang sudah mati.

Keputusan sidang Kerajaan Bone tersebut disampaikan kepada utusan Kerajaan Bone yang menunggu di perbatasan. Sekembalinya utusan Kerajaan Wajo, tentara Kerajaan Bone bergerak memasuki daerah Wajo. Tentara Kerajaan Wajo sudah dipersiapkan untuk menyongsong tentara Bone di perbatasan kerajaan. Tentara Kerajaan Wajo bukanlah imbalan tentara Bone yang kuat dan besar jumlahnya, namun Desa Kerajaan Wajo telah mengeluarkan putusan yang bunyinya, "*Amomuna maiwa tedokeppang makarana pura napuelo ade pura anrona Wajo, tampedding riappisonangata pa'banuana Wajo, nakarana nateppa elo datu manua seliwanna Wajo*"²⁶ artinya, "Meskipun kita melawan laksana kerbau pincang, tetapi kita mempertahankan undang-undang dasar Kerajaan Wajo yang mempertahankan tidak menyerahkan rakyatnya pada kerajaan lain yang menggagahinya." Maka terjadilah perempuran antara kedua pasukan kerajaan itu. Karena jumlahnya yang lebih besar dan berpengalaman dalam berperang maka tentara Bone makin lama makin mendesak ke wilayah Wajo.

Atas keputusan Dewan Kerajaan Wajo, La Madukelleng serta ketiga anaknya masing-masing *Petta To Si Berangeng*, *Petta To Rawe*, dan *Petta To Singka* disertai delapan orang bangsa-

wan menengah yaitu : La Mohang Daeng Mangkona, La Pallawa Daeng Marowa, Puanna Dekke', La Siraj' Daeng Menambong, La Mandja' Daeng Lebbi', Puanna Terang, La Sawedi Daeng Sagala, dan La Manrapi' Daeng Punggawa harus meninggalkan kerajaan dan keluar Pulau Sulawesi. Mereka disertai oleh 200 orang dalam empat buah perahu layar. Tujuan mereka semula ialah ke wilayah Kerajaan Kutai, namun karena kehabisan perbekalan terutama air minum, armada La Madukelleng kemudian membuang sauh di Muara Pasir, sebuah tempat di Kabupaten Pasir sekarang²⁷

Di Muara Pasir mereka membuat perkampungan sambil menangkap ikan. Pekerjaan ini merupakan keahlian mereka, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan hidup. Kira-kira sebulan kemudian, berdatangan ribuan orang Wajo dan Soppeng. Mereka membawa kabar bahwa Kerajaan Wajo sudah dikalahkan oleh Bone. Rakyat Wajo dikerjapaksakan oleh pembesar-pembesar Bone. Karena tidak tahan, maka mereka melarikan diri. Raja Wajo yang sudah lanjut usianya itu tetap menjadi tawanan.

Semakin banyaknya pengungsi ke Muara Pasir mengakibatkan semakin sukar penghidupan. Karena itu La Madukelleng mengadakan musyawarah besar yang disebut *Aduppa rappang*. Melihat tanah pertanian di sekeliling Muara Pasir itu semakin sempit, maka mereka harus dipencar untuk mencari daerah yang masih luas. Dalam musyawarah itu disepakati : ²⁸

- a) La Mohang Daeng Mangkona disuruh pergi ke Kutai. Pada masa itu Kerajaan Kutai diperintah oleh Pangeran Dipati Mojokusumo yang setelah wafat bergelar Marhum Pamanayan,
- b) La Pallawa Daeng Marowa tetap di Muara Pasir. Keturunannya kemudian mengadakan perkawinan dengan raja-raja Pasir,
- c) Puanna Dekke pergi ke Tanah Bumbu (Kalimantan Tenggara) dan mendirikan kampung di sana. Kampung tersebut

dinamai Kampung Baru, tetapi kemudian diganti dengan Kampung Pegatan,

- d) La Sira Daeng Menambong ke Kalimantan Barat kemudian kawin dengan saudara raja Matan dan mendirikan Kerajaan Mempawah,
- e) La Manja' Daeng Lebbi' pergi ke Riau
- f) Puanna Tereng dan La Sawedi Daeng Sagala tetap di Muara Pasir, dan
- g) La Manrapi Daeng Punggawa berdagang antarpulau, yaitu dari Kutai dan Pasir ke kota-kota di Jawa.

Anak-anak La Madukelleng yaitu Petta To Siberangeng, Petta To Siangka, dan Petta To Rawe juga berkumpul di Muara Pasir. Petta To Siberangeng kawin dengan putri raja Pasir bernama Anden Ajang. Dari perkawinan ini lahirlah seorang putri bernama I Sengong Daeng Sirompa atau Aji Doja Putri Agung. Putri ini kelak bersuamikan Sultan Muhammad Idris dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Petta To Siangka pergi berdagang ke Sulawesi Tengah dan kawin di sana. Keturunannya kelak menjadi raja-raja Donggala, Banawa, Tawaili, dan lain-lain.

Petta Torawe tidak menetap di suatu tempat. Ia selalu mengembara disertai pengiringnya sebanyak 250 orang. Mereka sambil merampok dengan menggunakan armada yang terdiri atas delapan buah perahu layar.²⁹ Dalam pengembaraan serta perampokan itu, mereka pernah menyerang daerah Malinau dan menawan raja Tidung yang bergelar Panglima Muda. Kemudian mereka masuk ke Berau dan menjalin persahabatan dengan sultan Sambaliung untuk menghadapi perampok-perampok dari Sulu.

La Moha Daeng Mangkona yang diperintahkan ke daerah Kutai oleh La Madukelleng diterima oleh raja Kutai Lama yang merupakan pusat Kerajaan Kutai Kertanegara. Pada tahun 1700 La Moha Daeng Mangkona pindah ke arah udik Sungai Mahakam yang kemudian dinamai Samarinda. Ia mengepalai orang-orang Bugis. Mereka bertempat tinggal di rumah-rumah

yang dibangun di atas rakit-rakit. Ia diizinkan mendirikan pemerintahan sendiri semacam republik. Yang menjadi kepala pemerintahan ialah La Mohang Daeng Mangkona sendiri dengan gelar Pua Ado'.

Tahun 1703,³⁰ Pua Ado' pertama La Mohang Daeng Mangkona mendirikan pemukiman di dataran yang menjadi Samarinda Seberang sekarang. Semua orang Bugis yang tadinya tinggal di rakit diperintahkan membangun rumah di darat.³¹ Raja Kutai yang memberikan daerah Samarinda kepada La Mohang Daeng Mangkona ialah Pangeran Dipati Mojokusumo (Marhum Pamarangan). Tanah itu diberikan dengan perjanjian bahwa orang-orang Bugis itu setia kepada raja Kutai dan apabila terjadi serangan terhadap Kutai yang datang dari muara Sungai Mahakam menjadi tanggung jawab orang-orang Bugis untuk memerangnya.

Pua Ado' La Mohang Daeng Mangkona yang tidak lain adalah saudara dari isteri La Madukelleng, berusaha sekuat tenaga agar Samarinda berkembang menjadi pelabuhan yang ramai. Karena itu perdagangan ke Tanah Ulu (pedalaman Mahakam) diberikan pula kepada orang Bugis. Mereka membuat pos-pos tempat berdagang di kampung-kampung: Long Iram Melak, Muara Pahu, Kota Bangun, Tabang, Muara Wahau, Muara Ancalong, dan Tenggarong. Hasil bumi yang terkumpul seperti damar, rotan, jelutung, dan lain-lain dibawa dan dikumpulkan di Samarinda dan selanjutnya dibawa dengan perahu layar ke Surabaya dan Singapura. Kapal-kapal dari Singapura pun datang ke Samarinda dan pedagang-pedagang besar bangsa Cina Singapura itu menempatkan perwakilannya di Samarinda seperti Gowan Hi dan Ban Seng.³²

Kota Samarinda diperintah oleh pua ado' (yang karena berjanji setia kepada Kutai pengangkatannya dengan persetujuan raja Kutai) didampingi oleh sebuah majelis bernama Ade' Lompo yang beranggota 15 orang dan 3 orang penasihat yang disebut Matowa Ri Bate. Pada tahun 1730, Samarinda dibagi menjadi lima kampung, yaitu Kampung Daeng, Kampung

Wajo, Kampung Baru, Kampung Polewali, dan Kampung Pada E Lo'. Tiap kampung diperintah oleh seorang kapitan didampingi oleh seorang panglima dan seorang *anderi guru*.

3.7.2 Perlawanan dalam Abad ke-19

Janji setia orang-orang Bugis penduduk Samarinda dengan kepada pemerintahannya Pua Ado' La Mohang Daeng Mangkona dipatuhinya, begitu pula pua ado'-pua ado' penggantinya kemudian. Kesetiaan ini terlihat ketika penyerangan perampok-rampok Solok (Filippina) di ibukota Kutai, Pamarangan. Dalam peristiwa itu tentara Bugis membantu Kutai sehingga perampok Solok tersebut dapat dikalahkan.

Pada tahun 1844 sebuah armada Inggris di bawah pimpinan Erskine Murry menyerang Tenggarong yang menjadi ibukota Kerajaan Kutai sejak tahun 1781. Pertempuran ini terkenal dengan nama Perang Maris. Orang-orang Bugis dari Samarinda bahu-membahu dengan tentara Kutai menghadapi serangan itu. Karena menemui kesukaran hubungan antara Pemerintah Belanda dengan Kerajaan Kutai, maka pada tahun 1846 Belanda menempatkan seorang asisten residen di Palaran.³³ Namun karena tempat tersebut kurang baik letaknya, maka dibukalah pemukiman baru di daerah Samarinda seberangan dengan Samarinda Seberang tempat pemukiman orang-orang Bugis.

Pada tahun 1870 diusahakan pemindahan pusat pemerintahan ke Samarinda. Di Samarinda dibuka daerah permukiman, jalan-jalan, dan pelabuhan. Samarinda yang dibuka Belanda untuk menandingi Samarinda Seberang makin lama makin berkembang menjadi tempat yang ramai. Apalagi pelabuhannya baik letaknya. Orang-orang Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan bermukim di sana. Mereka bergiat di bidang pertanian dan perdagangan.

Pada 16 Agustus 1896 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 75 yang menetapkan, bahwa daerah yang bernama *Vierkante Paal* itu ialah lahan yang

terletak antara Sungai Karang Asam Besar di hulu dan Sungai Karang Munus di hilir. Surat keputusan itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ADH. Heringa.³⁴ Kedudukan asisten residen dipindahkan ke Samarinda. Demikianlah Samarinda makin berkembang menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan.

Surat keputusan tersebut diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 25, 28 April 1903 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal CB. Nederberg.³⁵ Dengan keputusan tersebut, wilayah *Vierkante Paal* lebih luas lagi yaitu antara Sungai Karang Asam Besar dan Sungai Kerbau dengan 800 meter ke dalam menurut alur Sungai Mahakam. Dengan surat keputusan gubernur jenderal tersebut maka Samarinda dengan batas-batas seperti tersebut di dalam surat keputusan berada langsung dalam kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Keadaan tersebut tidak berubah sampai kedatangan Jepang pada tahun 1942. Mengenai pergerakan rakyat, praktis lebih bebas bergerak di Samarinda dari pada di wilayah Kerajaan Kutai sendiri seperti ibukotanya Tenggarong; sebab itu perlawanan rakyat di Kota Samarinda dalam bentuk pergerakan rakyat tidaklah dapat diabaikan.

3.7.3 Perlawanan pada Zaman Pergerakan Rakyat (1918 -- 1942)

Pergerakan rakyat yang tumbuh pada awal abad ke 20 terutama di Jawa, berpengaruh juga sampai ke Kalimantan Timur. Semangat untuk merdeka dan memiliki negara sendiri telah tumbuh di dalam masyarakat terutama di kalangan orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan baik pendidikan Barat maupun Islam. Karena itu semangat kemerdekaan yang tumbuh dan berkembang di Jawa dengan mudah dapat tumbuh di Kalimantan Timur terutama di Samarinda. Semangat kebangkitan nasional dalam jiwa masyarakat Kalimantan Timur mendapat penyalurannya dalam bentuk organisasi-organisasi politik, antara lain : ³⁶

3.7.3.1 Sarikat Islam

Dalam tahun 1917 di Samarinda berdiri Sarikat Islam (SI). Anggota pengurusnya antara lain H. Abdul Manap, M. Yusuf Arief, Kamaluddin, dan Y.M. Halid. Seorang anggota pengurusnya yaitu Y.M. Halid pernah diutus ke Jawa untuk menghubungi HOS. Tjokroaminoto (ketua umum SI).³⁷ Sarikat Islam dalam pengembangan organisasinya membentuk pula Yong Mohamman (YM) atau bagian pemuda. Organisasi pemuda Sarikat Islam giat dalam bidang olah raga dan kesenian terutama musik. Di samping itu mereka giat mendidik anggota dalam memperdalam Agama Islam.

Untuk membiayai organisasi, Sarikat Islam mendirikan sebuah toko yang diberi nama *Sarikat Dagang Islam*. Toko ini dibuka untuk umum. Pernah pula diselenggarakan pasar malam yang pendapatannya dipergunakan untuk membangun gedung Sarikat Islam yang sampai sekarang masih berdiri di Jalan Panglima Batur, Samarinda.

3.7.3.2 Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Samarinda pada tahun 1927. Anggota pengurusnya antara lain H. Abdul Manap dan M. Siddik. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang tidak berpolitik, giat dalam bidang agama dan sosial serta pendidikan.³⁸ Sebagai wadah pembentukan kader organisasi, dibentuk kepanduan *Hizbul Wathan* (HW). Muhammadiyah pernah pula mengumpulkan dana dengan menyelenggarakan pasar malam amal seperti yang dilakukan Sarikat Islam.

Muhammadiyah giat pula menyebarkan ajarannya yang merupakan pembaharuan dalam melaksanakan ibadah Agama Islam. Dalam mulut rakyat disebut *Kaum Muda*, namun karena pada umumnya rakyat belum dapat menerima paham baru tersebut, maka perkembangan Muhammadiyah sangat lambat.

3.7.3.3 Nahdlatul Ulama

Organisasi yang berdasarkan Agama Islam juga, yaitu

Nahdlatul Ulama, membuka cabangnya di Samarinda pada awal 1925³⁹. Pengurus cabangnya antara lain H. Abdussamad dan Abd. Madjid. Selanjutnya pengurusnya dipercayakan kepada KH. Abdullah Marisi, H. Ismail, dan H. Abdul Gani.

Nahdlatul Ulama juga mempunyai organisasi kepanduan yang bernama *Anshor*. Dalam agama, Nahdlatul Ulama melaksanakan ibadah secara tradisional yang biasa disebut aliran *Kaum Tua*.⁴⁰ Karena ajaran-ajarannya tidak bertentangan dengan pengetahuan agama rakyat yang sudah ada dan beberapa tradisi yang hidup di kalangan rakyat tetap lestari, maka dengan cepat Nahdlatul Ulama dapat merebut hati rakyat.

3.7.3.4 Persatuan Bangsa Indonesia (PBI)

Dalam tahun 1933 sekelompok pemuda yang berjiwa kebangsaan berusaha mendirikan cabang PBI di Samarinda. Pelopornya seorang yang datang dari Kota Baru, Pulau Laut (Kalimantan Selatan) bernama Horas Siregar. Ia menjadi pemimpin redaksi dan penanggungjawab sebuah surat kabar mingguan yang bernama *Panggilan Waktu*.

Karena koran ini selalu menerompetkan suara-suara keras yang bernada non-kooperasi, Pemerintah Hindia Belanda selalu waspada dan bertindak cepat agar suara-suara non-kooperasi tersebut tidak meluas. Akibatnya H. Siregar selalu berurusan dengan polisi. PBI adalah partai yang mau bekerjasama atau kooperator.⁴¹

3.7.3.5 Partai Indonesia Raya (Parindra)

Pada tahun 1934 salah seorang tokoh PBI di Kota Baru (Kalimantan Selatan) pindah ke Samarinda, yaitu Rustam Effendi.⁴² Pengurus cabang PBI di Samarinda direorganisasi. Rustam Effendi duduk sebagai ketua, sedangkan wakil ketua adalah Achmad Noor (sebelumnya, sekretaris). Dalam tahun 1934 itu M. Rasyad, bekas anggota Partindo Surabaya, pindah ke Samarinda. Ia menggabungkan diri dengan PBI. PBI cabang Samarinda makin bersemangat dan anggotanya makin bertambah.

Dalam tahun 1935 PBI dilebur dengan beberapa organisasi lainnya menjadi Partai Indonesia Raya sejalan dengan kebijaksanaan pengurus pusat PBI di Jakarta. Pengurus cabang Parindra Samarinda disusun kembali. Ketuanya tetap Rustam Effendi (ketua PBI) dan wakil ketuanya H. Arief Rachim, sedangkan Achmad Noor kembali menjadi sekretaris.

Sebagai wadah pembentukan kader, dibuka gerakan kepanduan *Suryo Wirawan*. Parindra giat pula di bidang pendidikan, antara lain membuka kursus pemberantasan buta huruf dan pendidikan politik. Pada tahun 1936 didirikan pula *Menhak School* setingkat HIS, untuk menyaingi sekolah yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda.

M. Hoesni Thamrin, anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat), salah seorang pengurus besar Parindra, berkunjung ke Kalimantan Timur pada tahun 1937. Sehubungan dengan itu diadakan rapat di Balikpapan dan Samarinda. Parindra makin berkembang dan pegawai negeri ada yang berani memasukinya.

Supir-supir bangsa Indonesia bergabung dalam organisasi *Bond Indonesische Chouffeurs* (BIC) yang menjadi *onderbouw* Parindra.⁴³

Pada tahun 1939, seorang anggota Suryo Wirawan, Bustani Hs, turut berbicara pada rapat umum yang diselenggarakan Parindra di Sangkulirang. Karena pidatonya berapi-api, Bustani Hs terkena *sprekdelict* dan dituduh melanggar pasal 153 bis dan ter. Pada bulan Januari 1940, Bustani Hs ditangkap di Samarinda. Ia diajukan ke pengadilan dalam sidangnya 14 Mei 1940⁴⁴ Bustani Hs dijatuhi hukuman penjara dua tahun yang harus dijalankannya di Nusakambangan.

3.7.3.6 Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Pemimpin-pemimpin di Jawa yang kurang puas terhadap Parindra, pada tahun 1937 mendirikan partai baru bernama *Gerakan Rakyat Indonesia* (Gerindo). Para pemimpinnya antara lain Mr. Moh. Yamin, Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. A.K. Gani, dan Sarmidi Mangunsarkoro.⁴⁵

Pada tahun 1937 itu juga berdiri cabang Gerindo di Samarinda atas prakarsa Aswin Toyo, Ishak Sani, Oemar Dahlan, dan M. Djunaedi. Meskipun Gerindo bersifat koperator, namun lebih revolusioner dibandingkan dengan Parindra. Karena sifatnya yang lebih tegas itu, maka hampir tidak ada pegawai negeri yang menjadi anggota Gerindo.

Pada tahun 1938 Dr. AK. Gani, ketua besar Gerindo, berkunjung ke Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu diadakan rapat umum di Balikpapan dan Samarinda.⁴⁶ Dalam tahun 1939 salah seorang anggota pengurus besar Gerindo lainnya juga berkunjung ke Kalimantan Timur. Meskipun penjagaan polisi Belanda baik selama di jalan maupun di penginapan, mengingat keadaan kritis menjelang pecahnya Perang Dunia II, namun rapat-rapat umum di Samarinda dan Balikpapan berhasil juga.

3.7.3.7 Penyadar

Karena perbedaan pendapat tentang siasat perjuangan di kalangan Partai Serikat Islam Indonesia, maka sebagian anggota pengurus besarnya mendirikan partai baru yang dinamai *Penyadar*. Pada tahun 1939 tumbuh cabang Penyadar di Kalimantan Timur. Salah seorang pengurusnya ialah AM. Sangaji.⁴⁷ Ia adalah pemimpin lama Sarikat Islam yang tinggal di Tenggara (Kabupaten Kutai sekarang) pada tahun 1917 sampai awal tahun duapuluhan. Ia diusir dari Kutai karena perjanjian antara gubernur jenderal Hindia Belanda dengan Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman seperti tertulis pada awal karangan ini.

AM. Sangaji tinggal di Samarinda karena lebih bebas bergerak dari pada di wilayah Kerajaan Kutai. Ia berhasil membentuk beberapa cabang Penyadar.

3.7.3.8 Gabungan Politik Indonesia (Gapi).

Pada tahun 1940 partai-partai politik yang terdiri atas PSII, Parindra, Gerindo, Pasundan, Partai Katolik, dan Partai Islam Indonesia (PII) menggabungkan diri dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia).⁴⁸ Pengurusnya berbentuk presidium terdiri atas enam orang yang diperjuangkan oleh GAPI

ialah Menuntut Indonesia Berparlemen. Bangsa Indonesia menghendaki parlemen yang nasionalistis, mewakili partai-partai dan tidak hanya sebagai penasihat seperti Dewan Rakyat (*Volksraad*). Parlemen itu mempunyai hak menentukan nasib sendiri.

GAPI mempunyai cabang-cabang di Samrinda dan Balikpapan. Hanya ada dua partai pendukungnya di Kalimantan Timur, yaitu Gerindo dan Parindra, karena partai-partai lain memang tidak ada cabangnya di daerah ini. Namun demikian dukungan moral dan material datang dari organisasi-organisasi non-politik seperti Muhammadiyah.

Pada awal tahun 1940, Gapi berhasil mengorganisasi suatu rapat umum di Samarinda,⁴⁹ yang dikunjungi oleh berbagai lapisan rakyat.

3.7.3.9 Majelis Islam a'la Indonesia (MIAI)

Suatu badan federasi partai dan organisasi Islam didirikan di Surabaya bernama Majelis Islam a'la Indonesia (MIAI). Partai dan organisasi yang bergabung di dalamnya ialah PSII, Partai Islam Indonesia, NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan pergerakan-pergerakan Islam lainnya. Yang dipercayai memimpin ialah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim.⁵⁰ Federasi itu didirikan pada 21 September 1937.⁵¹

Di Kalimantan Timur berdiri juga cabang MIAI. Ketuanya M. Soejono dan Oemar Dahlan sebagai sekretaris. Kedua tokoh ini adalah tokoh politik, karena MIAI di Samarinda didukung oleh partai politik. Kegiatan MIAI Kalimantan Timur antara lain mengumpulkan uang dari para dermawan untuk disumbangkan kepada mukmin Indonesia yang terlantar di tanah suci Mekkah melalui MIAI pusat.

Demikianlah perlawanan rakyat Samarinda terhadap penjajahan yang dilakukan melalui organisasi pergerakan politik. Dari partai-partai politik yang pernah mempunyai cabang di Samarinda hanya Partai Sarikat Islam yang benar-benar tersebar sampai ke daerah Berau.

Sarikat Islam Pasir didirikan karena pengaruh cabang Ban-

jarmasin dianggap berbahaya bagi ketenteraman umum oleh pemerintah. Pernyataan ini diperkuat dengan surat keputusan pemerintah 9 November 1917 nomor 43. Dinyatakan pula bahwa partai ini memegang peranan dalam pemberontakan raja-raja Pasir⁵² Yang termasuk radikal namun kooperator adalah Gerindo, sehingga tak ada pegawai negeri yang berani menjadi anggotanya karena takut kehilangan pekerjaanya.

Petisi Sutarjo yang menuntut suatu Negara Indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda, tidak mendapat perhatian dari rakyat Kalimantan Timur. Menjelang pecahnya Perang Pasifik, partai-partai seolah-olah beku karena ketatnya penjagaan pemerintah dan karena diadakan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap membahayakan pemerintah.

3.7.4 Perlawanan pada Zaman Jepang.

Pada 8 Desember 1941 secara tiba-tiba Jepang melancarkan serangan ke Pearl Harbour; sebuah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik.⁵³ Lima jam setelah penyerangan atas Pearl Harbour, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborng Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang.⁵⁴ Tentara Jepang kemudian bergerak ke selatan menuju Filipina dan Indonesia. Pada 10 Januari 1942 tentara Jepang telah sampai di Tarakan. Komandan KNIL di Tarakan menyerahkan diri pada 13 Januari 1941⁵⁵

Meskipun jauh-jauh sebelumnya Pemerintah Hindia Belanda telah bersiap-siap menghadapi kedatangan tentara Jepang dengan menambah kekuatan tentara KNIL yang ada di Tarakan, Balikpapan, dan tempat-tempat lain dengan *landwacht* untuk menjaga daerah dan *stadwacht* serta milisi,⁵⁶ namun karena kekuatan tentara KNIL sendiri kecil, maka tak ayal lagi kota demi kota jatuh ke tangan Jepang.

Kapitulasi Pemerintah Hindia Belanda terjadi pada 8 Maret 1942, dilakukan oleh Letjen. H. Ter Poorten, panglima angkatan perang Sekutu di Indonesia kepada angkatan perang Jepang di bawah pimpinan Letjen. H. Imamura.⁵⁷ Dengan demikian

tentara KNIL yang ada di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Samarinda II pun berkapitulasi kepada tentara Jepang.

Selama pendudukan Jepang, semua partai dilarang, hukum militer yang dijalankan sangat keras. Di samping itu kehidupan rakyat makin mengalami kesukaran. Bahan makanan sangat kurang, begitu pula barang-barang keperluan lainnya. Karena hal-hal tersebut maka pergerakan rakyat pun mati. Perlawanan dan gerakan di bawah tanah pun tidak dapat tumbuh akibat tekanan Pemerintah Balatentara Jepang.

CATATAN :

1. S.C. Knappent, *Baschrijving van de Onderaf deeling van Kutai*, Gravenhage, 1905, halaman 575.
2. S.C. Knappent, op. cit., hal. 567.
3. Dr. J. Eisenberger, *Kroniek Zuider en Ooster afdeeling van Borneo*, Banjarmasin 1936, halaman 3.
4. Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 7,8
5. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dep. P dan K, Proyek Penelitian Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah*, Jakarta 1978, hal. 7.
6. Aji Bambang Abdurrachman, *Sedikit Kutipan Catatan Sejarah Kutai*.
7. Dr. J. Eisenberger, op. cit. halaman 3
8. Dr. C.A. Mees, *Kroniek van Koetai*, Santpoort, halaman 187
9. Dr. J. Eisenberger, op. cit, halaman 5.
10. A.L. Weddik, *Beknopt. overzicht van het Rijk Koetai, Indisch Archief*, I, 1, 1849, halaman 90
11. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*, Jakarta 1978, op. cit. hal. 49
12. E. Muhammad Tayib, *Silsilah Kerajaan Kutai Kertanegara Keraton Kutai*, 1284 N, halaman 163
13. Dr. J. Eisenberger, op. cit, halaman 6
14. *Ibid*, halaman 7
15. *Ibid*, halaman 13

16. *Loc. cit.*
17.?
18. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.*, hal. 20
19. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah Daerah Kalimantan Timur*, Dep. P & K, Jakarta 1978, hal. 40, 41.
20. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.*, halaman 26
21. S.C. Knoppert, *op. cit.* hal. 582.
22. *Ibid*, halaman 583
23. *Loc. cit.*
24. BAPPEDA Tingkat I, Kalimantan Timur, *Kalimantan Timur dalam angka*, Samarinda, 1982 halaman 5.
25. Moh. Noor. *Lontara Samarinda*, saduran tidak dipublikasikan, Samarinda, 1964, halaman 1.
26. *Ibid*, halaman 2
27. *Loc. cit.*
28. Moh. Noor, *op. cit.* hal. 3
29. *Loc. cit.*
30. Moh. Noor. *op. cit.* hal. 4.
31. Sebagian besar orang berpendapat bahwa karena xmelihat tanah yang datar, daerah itu dinamai *Samarendah* akhirnya Samarinda.
32. *Loc. cit.* halaman 4
33. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.* hal. 3.
34. Dahlan Sjahrani, *Samarinda dengan perkembangan Dakwah Islam*; Samarinda 1981. hal. 4.
35. *Ibid*, halaman 4
36. Drs. Sjahbandi dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur*, Jakarta, 1928, hal.26
37. *Ibid*, hhal. 27.

38. *Ibid*, halaman 28
39. *Loc. Cit*
40. *Loc.*
- Ibid*,
41. *Ibid*, halaman 40
42. *Ibid*, halaman 50
43. *Ibid*, halaman 53
44. *Ibid*, halaman 54
45. Drs. Soeroto, *Indonesia di tengah-tengah Dunia dari abad ke abad*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1961, halaman 56.
46. Drs.Syahbandi dkk, *op. ccit. halaman 56.*
47. *Ibid*, halaman 57
48. Drs. Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Almaarif, Bandung, Cetakan ke V, 1981. ha. 625
49. Drs. Sjahbandi dkk. *op. cit.* hal. 60
50. K.H. Sjaifuddin Zuhri, *op. cit.* hal. 624
51. Drs. Sjahbandi, *op.cit.* hal. 60.
52. Dr. J. Eisenberger, *op. cit*, hal. 98
53. Sartono Kartodirdjo dkk: *Sejarah Nasional* jilid VI, Dep. P dan K, Jakarta, 1975, hal. 1
54. *Loc. cit.*
55. *Loc. cit.*
56. Drs. Asnawi Anang Acil, dkk, *op. cit.* hal. 20
57. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* jilid 6 halaman 5.

BAB IV PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN BERAU TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALIS- ME TAHUN 1673 – 1945

4.1 Identifikasi

Untuk mengetahui latar belakang timbulnya perlawanan rakyat Kerajaan Berau, terlebih dahulu diuraikan pertumbuhan Kerajaan Berau (Berayu), sebab dalam perkembangannya akan terlihat suasana politik, ekonomi dan budaya masyarakat, serta perhubungannya dengan kerajaan-kerajaan tetangganya yang mempengaruhi sifat struktur dan bentuk perlawanan.

Menurut Residen Selatan dan Timur Pulau Borneo J.G. Gallois (1849/m April 1851) dikutip dari *de Bijdragen Koninklijk Instituut van 1856* yang berbunyi, "Cukup jelas bahwa Bulungan dahulunya merupakan bagian dari Kerajaan Berau, kemudian memisahkan diri. Keterangan Residen J.G.A. Gallois ini dibenarkan oleh peneliti/penulis bangsa Belanda J. Hageman Joz dalam *Tijdschrift Bataviaasche genootschap* (TBG) deel 4, tahun 1885, halaman 79, H.J. Grijzen di dalam tulisannya yang berjudul "*Onze Dajak-Politiek in Noord-Oost Borneo*", tahun 1925 halaman 116, dan Dr. J. Eisenberger di dalam *Kriniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*, tahun 1936 halaman 17. Bahkan oleh H.J. Grizen dan J.S. Krom controleur van Beraoe (1940),

dikatakan bahwa landschap Alas dan Tungku di Maláysia Timur berbatasan dengan Kerajaan Berunai termasuk daerah Kerajaan Berau pada zaman dahulu.

Persatuan dan kesatuan kerajaan ini dikukuhkan pula ketika kekuasaan Majapahit memasuki daerah ini pada tahun 1365, dengan menetapkan Aji Surya Nata Kesuma menjadi kepala pemerintahan wilayah itu.

Sesudah Kerajaan Majapahit menjadi lemah, Berau dengan seluruh wilayahnya mendirikan kerajaan sendiri yang dapat dipertahankan sampai penjajah Belanda mendudukinya pada tahun 1834. Letak Kerajaan Berau pada waktu jayanya ialah antara $1\frac{1}{2}^{\circ}$ - - 7° dan 116° - - 119° BT. Luas Kerajaan Berau termasuk Bulungan dan Tidung sebesar tiga kali Negeri Belanda, dengan jumlah penduduk pada tahun 1848 sebanyak 100.000 jiwa di daerah Bulungan (*Belchers Voyage, London 1848*) dan Berau sekitar 20.000 orang.

Wilayahnya cukup luas dan mempunyai potensi yang sangat besar dengan sumber alam yang cukup banyak. Hutan yang sangat luas dengan hasil seperti kayu ekspor, sarang burung, rotan, kayu gaharu, hasil tambang minyak tanah di Pulau Tarakan dan Bunyu, batubara di Teluk Bayur (Berau), dan emas di Sungai Kelay yang pernah ditulis oleh J. Hagemam dalam laporan perjalanannya. Lautan yang kaya dengan bermacam-macam ikan, penyu, teripang yang pada abad ke-19 menjadi salah satu bahan komoditi perdagangan pada masa itu. Sungai-sungainya besar, yaitu Sungai Berau (Kuran), Sungai Kayan, Sungai Sekatak, Sungai Sembakung, dan Sungai Sebuk. Dataran rendah yang sangat luas diselang-seling oleh gunung-gunung yang ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang tetap menghijau sepanjang tahun.

Berau pernah dilukiskan oleh seorang pengunjung bangsa Eropa sebelum abad ke 19 yang diungkapkan kembali oleh H. Van de Wall dalam bukunya yang berjudul, *Aantekeningen omtrent de Noordoostkust van Borneo* (TBG) deel 4, 1885, halaman 428, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Daerah-daerah ini memberikan sepanjang Sungai-sungai yang dapat dilayari dengan pemandangan-pemandangan yang romantis, liar dengan kesuburan yang melimpah ruah. Berau pernah dinamai oleh seorang pengunjung sebagai Zwisnya Borneo, betul-betul merupakan tempat yang layak bagi masyarakat yang rajin.

Berhubung dengan keadaan alam yang kaya akan mineral dan pemandangan alamnya yang romantis serta letaknya yang strategis, beberapa avonturir bangsa Inggeris seperti James Brooke mencoba mengadu untung di Kalimantan Utara. Selain itu kapten Angkatan Laut Inggeris bernama E. Belcher pada tahun 1834 juga memasuki Berau dengan alasan untuk menyelidiki tenggelamnya kapal Inggeris Premier di dekat Pulau Panjang, sebuah pulau di wilayah Kerajaan Berau.

Semenjak zaman VOC/1602, Belanda merasa belum cukup kuat untuk menundukkan Kerajaan Berau, Bulungan, Tidung dan Kerajaan Sulu di Filipina Selatan, karena kerajaan-kerajaan ini dibantu oleh Kerajaan Wajo dengan tokohnya La Madukelleng. Mereka bersatu-padu menentang penjajah termasuk Spanyol, Inggeris, dan Belanda yang masing-masing hendak merebut daerah itu. Kesatuan pandangan raja-raja itu terikat oleh kesatuan iman yang berlandaskan ajaran Islam yang sudah mendarahdaging sejak Makdum Baginda Raja menyebarkan dakwah Islamiyah pada tahun 1380 - - 1390 di Sulu dan Kalimantan Utara. Ketaatan dan kefanatikan inilah yang mendorong dia untuk mempertahankan tanah air.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka Kovensi London 1814 dan Traktat London 1824 serta berakhirnya Perang Diponegoro, mengusik angkatan perang Kerajaan Belanda untuk memerangi Berau dengan sekutu-sekutunya.

4.2. Pertumbuhan Kerajaan Berau

4.2.1 Zaman Sriwijaya

Berdininya Kerajaan Berau belum dapat diketahui secara pasti. Dilihat dari bentuk wajah, bahasa, adat istiadat, dan kesenian penduduk pribumi daerah Berau, banyak persamaannya

dengan suku-suku bangsa Melayu di Sumatera Selatan dan Sumatera Timur. Menurut Prof. Dr. Ahmad Ramali ketika bertugas sebagai dokter pada tahun 1938 bersama-sama J.S. Krom di daerah itu, suku bangsa Berau berasal dari Deutro Melayu Sumatera yang beberapa abad lampau membuat daerah permukiman di tempat itu. Kemungkinan besar peristiwa itu terjadi ketika Kalimantan menjadi wilayah dari Kerajaan Sriwijaya antara abad ke-7 sampai abad ke-14. Namun demikian sampai kini belum diketemukan sumber-sumber sejarah mengenai hubungan antara Kerajaan Berayu atau Berau dengan Kerajaan Sriwijaya.

4.2.2 Zaman Majapahit

Sesudah pertengahan abad ke-14, Kerajaan Berau menjadi wilayah Kerajaan Majapahit.² Wilayah Berau mulai dari Tanjung Mangkalihat ke utara berbatasan dengan Kerajaan Brunai, yang terdiri atas Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Sabah Malaysia Timur sekarang.³ Untuk memimpin wilayah itu, diangkat Aji Raden Surya Nata Kesuma yang dalam Legenda Berau terkenal dengan nama Baddit Dipattung. Raja inilah yang menurunkan raja-raja Sambaliung, Gunung Tabur, Bulungan, dan sebagian turunannya bermukim di Sabah sekarang.

Untuk mengatur pemerintahannya di daerah yang luas itu diangkat para wazirnya yang berkedudukan di beberapa tempat yang penting, antara lain:

- (1) Ranga Batara berkedudukan di Negeri Pantai, Rantau Berawan, dengan beberapa orang tua seperti Rantai Tumiang Panas Karamian, Ujian Barari, dan Unjit-unjit Raja. Ranga Batara mempunyai seorang putri yang arif bijaksana bernama si Kannik Berau Sanifah.
- (2) Tumanggung Macan Nagara berkedudukan di Benua Kuran.
- (3) Angka Yuda berkedudukan di Negeri Bulalung dan berputra si Kuripan.
- (4) Si Patungut gelar Kahar Janggi dan Si Balamman gelar Kahar Pahlawan, mengurus pemerintahan di Sungai Kelai, Ke-

camatan Sambaliung dan Kecamatan Muara Lasan sekarang.

- (5) Laya Pati mengurus pemerintahan di Negeri Bunyut. Ia mempunyai seorang putri yang terkenal bernama Si Dayang Bunyut.
- (6) Nini Barituk mengurus pemerintahan di Sungai Ulak, Sungai Lati, dan Panguawan.

Mereka masing-masing menguasai daerah sendiri-sendiri. Untuk mengatur ketertiban dan keamanan, diadakan semacam undang-undang perdata dan pidana yang selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa itu. Setiap raja dapat menambah pasal-pasal yang dianggap perlu, menurut kondisi atau situasi politik dan sosial budaya di dalam kerajaan itu. Peraturan perdata dan pidana itu dinamai Pamatang Ammas. Peraturan itu dibuat secara mufakat dan musyawarah bersama-sama para pemimpin kerajaan dan kepala-kepala administrasi pemerintahan.

Majapahit mewajibkan penduduk membayar pajak yang dipergunakan untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan. Perhubungan dengan Pulau Jawa diatur oleh para menteri yang dibantu oleh angkatan laut dan armada perdagangan. Pengaruh Majapahit di daerah ini tidak terlalu lama, karena pada abad ke-15 pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa mulai berkurang kewibawaannya. Raja-raja kecil di daerah menyatakan dirinya bebas dan melaksanakan pemerintahan sendiri.

Dari sekian banyak penguasa kerajaan, ada sembilan raja yang berwibawa dan dapat memelihara keutuhan peraturan seluruh wilayah kerajaan dari Tanjung Mangkalihat sampai ke perbatasan dengan Kerajaan Berunai yaitu Aji Raden Surya Nata Kesuma, Aji Nikullan, Aji Nikutak, Aji Nigindang, Aji Panjang Ruma, Aji Tumanggung Barani, Aji Sura Raja, Aji Surya Balindung, dan Aji Dilaya. Aji Dilaya berputra dua orang laki-laki, yang tua bernama Pangeran Tua dan yang muda bernama Pangeran Dipati. Untuk memelihara keutuhan kerajaan, kedua turunan pangeran itu berganti-ganti menjadi raja. Apa-

bila seorang menjadi raja, yang lain menjadi wakilnya. Untuk jabatan wakil, Gunung Tabur lebih senang memakai gelar *rijkbestuurder* (penguasa atau mangkubumi) sedangkan Sambaliung senang akan titel "Raja Muda". Masing-masing pangeran ini mempunyai wilayah sendiri-sendiri yang diwariskan kepada turunannya. Sesudah Aji Dilaya meninggal, dunia kerajaan berganti-ganti diperintah oleh: Pangeran Tua, Pangeran Dipati, Aji Busamma gelar Aji Kuning I, putra Pangeran Dipati, Sultan Hasanuddin, putra Pengeran Tua, Zainal Abidin, putra Ammas Sinasari, kemanakan Aji Kuning I, Sultan Badaruddin, cucu Sultan Aji Kuning I, Salehuddin putra Maharaja Laila, kemenakan Sultan Hasanuddin Marhum di Rijang, putra Hasanuddin, dan Aji Kuning II, putra Sultan Badaruddin.

Demikianlah, Kerajaan Berau diperintah berganti-ganti antara turunan Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Setelah Kerajaan Berau dikalahkan Belanda, kerajaan itu terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Sambaliung yang diperintah oleh Raja Alam Putra Amirilmukminin, cucu Sultan Hasanuddin dan Kerajaan Gunung Tabur diperintah oleh Gazi Mahyudin Aji Kuning II.

4.2.3. Hubungan dengan Kerajaan Wajo, Kutai dan Kerajaan Sulu Filippina Selatan.⁴

4.2.3.1 Hubungan dengan Kerajaan Wajo Sulawesi Selatan

Ketika Kerajaan Berau diperintah oleh Sultan Hasanuddin Marhum di Kuran, datang kunjungan muhibah dari Petta Torawe, putra La Madaukelleng Arung Matowa. (1736 - - 1754). Arung Matowa Wajo ini terkenal sebagai seorang raja yang gigih mengusir penjajah Belanda. Dengan sahabatnya, Karaeng Bontolangkasa dari Gowa, ia dapat mengalahkan tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor Steinmetz.

Sebagai tanda persahabatannya, Petta Torawe menuliskan suatu piagam di pintu gerbang Istana Sultan Sambaliung yang isinya antara lain berbunyi, "*Jika seorang telah berindung di*

halaman suraja (istana), ia telah menjadi seorang raja dan tidak boleh diganggu keamanannya”. Untuk memelihara kesinambungan hubungan Wajo dan Berau, seorang panglimanya berkediaman di Berau, yakni La Madu Daeng Pallawa yang keturunannya kemudian mendirikan Kampung Bugis di Tanjung Redeb. Cucu Petta Torawe ini kemudian kawin dengan Raja Alam, cucu dari Sultan Hasanuddin.

4.2.3.2. Hubungan dengan Kutai

Zainal Abidin Marhum di Muara Bangun pernah kawin dengan Aji Galuh Besar, putri Pangeran Mangkubumi, cucu Marhum Pamarangan dari Kerajaan Kutai. Sultan Sambaliung Raja Alam kawin dengan Aji Nantu, putra Pangeran Petta dengan Aji Bungsu, putri bangsawan Kutai.⁵

4.2.3.3. Hubungan dengan Kerajaan Sulu, Filippina Selatan

Dengan Kerajaan Sulu, Kerajaan Sambaliung mempunyai hubungan yang erat. Sultan Hasanuddin kawin dengan Dayang Lana, anak raja Sulu Filippina Selatan.⁷⁾ Empat orang putranya yaitu Datu Syaifuddin, Datu Jalaluddin, Si Dayang Bungsu, dan Si Dayang Bunyut pulang ke Sulu. Seorang putranya dari anak raja Sulu ini bernama Amirilmukminin, tinggal di Berau dan menjadi sultan sesudah Sultan Aji Kuning II, putra Sultan Badaruddin.

Karena perkawinan antarkeluarga ini, maka terjadi hubungan persahabatan yang kuat antara raja-raja Wajo, Kutai, dan Sulu dengan Kerajaan Berau. Mereka bantu-membantu di dalam menghadapi sesuatu kesulitan, terutama bagi Sulu dan suku bangsa Bugis yang banyak bermukim di daerah Berau.

4.2.4. Sosial Budaya dan Ekonomi

Dengan terjadinya asimilasi dan interaksi sosial budaya melalui perkawinan antarkeluarga pemimpin-pemimpin di kerajaan tersebut, keamanan serta ketertiban di kerajaan menjadi mantap. Pada tahun 1380, seorang ulama bernama Makdum mulai menyiarkan Agama Islam di Kalimantan Utara dan di Kepulauan Sulu, Filippina Selatan. Ia kemudian disusul oleh se-

orang ulama Minangkabau bernama Baginda Raja. Tak lama kemudian Kerajaan Berau mulai menerima Agama Islam (diperkirakan pada abad ke-15). Pada masa pemerintahan raja ke-6, Aji Tumanggung Barani, ajaran Islam mulai mendapat pengaruh yang luas di wilayah Berau yang kemudian menjadi agama kerajaan. Undang-undang perdata dan pidana "Pematang Ammas" dimasukkan unsur-unsur ajaran Islam sehingga hukum Islam ditetapkan di dalam pelaksanaan pengadilan kerajaan dan menjadi falsafah dalam kehidupan rakyat.

Barang-barang perdagangan pada waktu itu berupa hasil hutan seperti sarang burung putih, madu, lilin, dan hasil laut seperti ikan dan teripang.

4.3 Kedatangan Imperialisme dan Kolonialisme Spanyol dan Belanda

4.3.1 Kedatangan Spanyol di Berau

Hampir bersamaan waktu dengan kedatangan Belanda tahun 1596 di Kepulauan Nusantara ini, bangsa Spanyol telah menduduki Filipina dan bermaksud untuk meluaskan petualangannya ke selatan yaitu ke Kalimantan Utara dan Selat Makasar. Selain untuk menjajah, Spanyol juga bertujuan untuk menyiarkan Agama Kristen. Karena itu kedatangan bangsa Spanyol ditentang dengan gigih oleh rakyat di Kepulauan Sulu dan Mindanao yang fanatik bekerjasama dengan keluarganya, raja-raja dari Berau, yang sudah memeluk Agama Islam sebagai agama kerajaan.

4.3.2. Kedatangan , di Kerajaan Berau.

Pada tahun 1671 VOC mengirimkan misi perdagangannya di bawah pimpinan Paulus de Bock dengan kapal *de Noorman* ke Berau, tetapi tidak mendapat sambutan dari penduduk yang menaruh curiga terhadap bangsa Eropa terutama Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1756 VOC mengharapakan bantuan Kutaj untuk meluaskan pengaruhnya ke Berau, tetapi tidak berhasil.

Sampai masa jatuhnya VOC tahun 1799, tidak ada orang

Belanda atau bangsa kulit putih lainnya yang berdiam di daerah Kerajaan Berau termasuk Bulungan dan Tidung.

4.4. Jalannya Perlawanan terhadap Hindia Belanda (18.00 - - 1942)

Pada 13 Agustus 1814 diadakan perjanjian antara Pemerintah Inggris dan Belanda yang disebut *Conventie London*. Dalam konvensi telah disepakati bahwa Inggris menyerahkan kembali Nusantara kepada Belanda pada tahun 1816. Untuk melaksanakan penyerahan itu, Pemerintah Belanda mengirim tiga orang komisararis jenderal, yaitu Elut, Buyskes, dan Van der Capellen untuk menerima penyerahan itu dari Pemerintah Inggris. Van der Capellen kemudian diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda berusaha keras untuk menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia, tetapi di mana-mana mendapat tantangan dan perlawanan yang hebat dari pemimpin-pemimpin, raja-raja, dan rakyat Indonesia. Di Sumatera terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Imam Bonjol dan terkenal dengan Perang Padri (1821 - - 1837). Di Jawa terjadi perang besar yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825 - - 1830).

Untuk memantapkan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Van der Capellen datang ke Ujung Pandang untuk meminta raja-raja Sulawesi Selatan menandatangani pembaharuan Perjanjian Bungaya. Raja-raja Bone, Wajo, Luwu, Soppeng, Suppa, dan kerajaan-kerajaan di daerah Mandar tidak mau menandatangani perjanjian itu.

Beberapa kali Pemerintah Kolonial Belanda mengirim serdadunya menindak raja-raja yang menentang perjanjian itu, semuanya gagal. Karena itu tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor Van Geen pada tahun 1825 mengirim ekspedisi dengan persenjataan yang modern, tetapi gagal menangkap raja putri I Maning Aru Data Matinrowe Ri Kessi, raja Bone. 25 sehingga Van Geen terpaksa kembali ke Makasar.

Pada tahun 1825 Van der Capellen mengirim utusan Mayor George Muller untuk membuat perjanjian dengan Sultan Salehuddin dari Kerajaan Kutai. Isinya supaya mengakui kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda atas Kerajaan Kutai. Utusan Belanda itu dibunuh oleh rakyat Kutai di Muara Kaman.⁶ Pemerintah Hindia Belanda belum melanjutkan usahanya untuk melanjutkan ekspedisinya ke Kerajaan Berau karena dua peristiwa yang harus dihadapinya. Pertama, tentara Belanda masih menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro dan perang Imam Bonjol di Sumatera Barat serta perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Kedua, Kerajaan Berau terutama Raja Alam mempunyai persekutuan dengan pejuang-pejuang Bugis yang dipimpin oleh mertuanya, Pangeran Petta anak Petta Torawe atau cucu dari La Madukelleng raja Wajo, dan Paneki yang terkenal anti VOC. Mereka berjuang bahu-membahu dengan Kerajaan Gowa untuk mengusir penjajah Belanda. Demikian pula Raja Alam bersekutu dengan orang-orang Sulu yang dipimpin oleh Syarif Dakula, menantunya, keturunan dari Syarif Bungsu, raja Kepulauan Sulu dan Mindanao, Filippina Selatan yang sejak abad ke-16 anti kepada penjajah kulit putih (Spanyol dan Belanda). Mereka semuanya tidak rela diperintah oleh orang kafir. Sebelum Belanda mengirimkan ekspedisi untuk menduduki Berau, lebih dahulu Pemerintah Kolonial Belanda menjalankan politik adu-domba untuk memecahbelah persekutuan Kerajaan Berau yang terdiri atas Kerajaan Gunung Tabur, Samballiong (Tanjung), dan Bulungan.

Mula-mula diusahakan untuk memisahkan Kerajaan Bulungan dari persekutuan Kerajaan Berau. Pada tahun 1800, Bulungan dan Tanah Tidung telah memisahkan diri dengan mendirikan kesultanan sendiri.⁷ Kemudian Belanda mendekati Sultan Gunung Tabur Aji Kuning II (1833 -- 1850), putra Sultan Badaruddin. Pemerintah tahu bahwa kedua kerajaan itu tidak terdapat kesatuan pendapat.

Raja Alam dengan sekutu-sekutunya mengerti akan siasat licik Belanda; karena itu ia mengadakan persiapan dengan

memperkokoh kesatuan antara rakyatnya dengan suku bangsa Bugis dan orang-orang Sulu. Raja Alam beristana di Batu Putih (Kecamatan Talisayan Sekarang). Di daerah itu banyak bermukim pejuang-pejuang Bugis yang disebut Belanda sebagai bajak laut. Persekutuan Raja Alam dengan suku bangsa Bugis semakin erat, karena Raja Alam kawin dengan Andi Nantu, putri Pangeran Petta dengan Aji Bungsu, putri Aji Pati Tuha raja Kutai. Seorang anak dari Pangeran Petta ini menjadi pangeran mangkubumi Kerajaan Kutai. Anak perempuan Raja Alam dengan putri Bugis bernama Pangeran Ratu Ammas Mira yang kemudian kawin dengan Syarif Dakula, pemimpin bangsa Sulu yang juga memperkuat pertahanan Raja Alam di Batu Putih.

Baik Raja Alam beserta segenap rakyatnya maupun pejuang-pejuang suku bangsa Bugis dan orang Sulu, sudah bertekad bulat untuk tidak menerima bangsa Belanda sebagai "yang dipertuan" di tanah air mereka. Menurut pendirian dan kepercayaan mereka, bangsa Belanda adalah penjajah yang tergolong orang kafir. Setelah Pemerintah Hindia Belanda dapat mematahkan perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, mereka mulai mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi perlawanan raja-raja dan rakyat di luar Pulau Jawa.

Selain perlawanan rakyat di Nusantara, Belanda juga khawatir terhadap orang-orang Inggris yang bermaksud meluaskan pengaruhnya di Kalimantan Timur seperti James Brooke di Kalimantan Utara dan kemudian oleh Kapten Laut Inggris E. Belcher yang pada tahun 1834 dan 1848 dengan kapal perang serta lima perahu pinisi ke Berau dan Bulungan.⁸ Karena itu Belanda memberikan prioritas pertama untuk menundukkan Berau yang bersekutu dengan pejuang-pejuang Bugis, Wajo, dan Sulu.

Perlawanan Kerajaan Berau ini, dipimpin oleh Raja Alam dari Sambaliung. Raja Alam mempunyai istana di Tanjung dan sebuah lagi dekat Kampung Bugis di Tanjung Redeb sekarang. Di tempat ini ia dibantu oleh seorang panglima sukubangsa Bugis bernama Panglima Limbuti, keturunan Panglima La Madu

Daeng Pallawa yang mendirikan Kampung Bugis di Tanjung Redeb.⁹ Pertahanan yang kuat dibangun dekat laut di Batu Putih, Tanjung Mangkalihat, tempat gabungan sukubangsa Berau, sukubangsa Bugis, dan Sulu pimpinan Syarif Dakula, menantu Raja Alam. Armada Bugis dan Sulu inilah yang dianggap sangat berbahaya bagi kapal-kapal Belanda.

Untuk menghancurkan armada persekutuan Berau, Bugis dan Sulu ini, pihak militer Belanda mempersiapkan angkatan lautnya sejak bulan April 1834 dengan perlengkapan persenjataan di markas angkatan lautnya di Makasar. Dengan dalih pengaduan Sultan Gunung Tabur Aji Kuning (Gazi Mahyudin), bahwa raja Alam bersekutu dengan bajak laut Bugis yang mengganggu ketertiban pelayaran di perairan Berau, Pemerintah Hindia Belanda menyetujui permintaan Sultan Aji Kuning.¹⁰

Pada bulan September 1834, Belanda mengirim ekspedisi guna menindak Raja Alam. Empat buah kapal perang yaitu *Korvet Heldin*, *brik Syiwa*, *sekuner Korokodil*, dan *Kastor*, serta berpuluh-puluh perahu pendarat di bawah pimpinan Kapten Laut Anemaelt, menyerang pertahanan armada laut Raja Alam di Batu Putih.¹¹

Untuk menghadapi serangan Belanda, Raja Alam dengan sekutu-sekutunya dari sukubangsa Bugis, dan orang-orang Sulu di bawah pimpinan menantunya, Syarif Dakula, membuat kubu-kubu pertahanan, di antaranya di Batu Putih, daerah Tanjung Mangkalihat yang menghadap arah ke laut dan ke darat, dan sebuah benteng di daerah pedalaman sepanjang 40 x 40 m, yaitu di Sungai Dumaring tidak jauh dari Batu Putih. Di Tanjung yang sekarang bernama Tanjung Redeb, Raja Alam dibantu oleh panglima Bugis bernama Panglima Limbuto, keturunan La Madu Daeng Pallawa. Kubu-kubu pertahanan mereka diperkuat dengan meriam-meriam besar dan kecil yang sampai sekarang masih ada di daerah Berau. Senjata api dibeli dari Singapura dengan perantaraan perahu-perahu Bugis.

Dengan perahu-perahu pendaratnya pasukan Belanda mengadakan serangan terhadap pertahanan Raja Alam di Batu

Putih dengan dilindungi oleh tembakan meriam dari kapal-kapal perang Belanda. Pejuang-pejuang Berau, Bugis dan Sulu mempertahankan Batu Putih dengan gigih. Karena perlengkapan Belanda sudah dipersiapkan selama enam bulan di Makasar dan pasukannya telah berpengalaman dalam Perang Diponegoro dan Perang Imam Bonjol, maka Rajam Alam terpaksa mengundurkan diri ke Tanjung untuk mempertahankan istananya. Ia dibantu oleh Panglima Limbutu, putranya Hadi, menantunya Syarif Dakula, dan orang-orang Bugis. Mereka bertahan di Sungai Dumaring, daerah Tanjung Mangkalihat.

Raja Alam dapat dikalahkan Belanda dan bertahan di Muara Lasan. Di tempat ini Raja Alam ditangkap Belanda dengan putranya, Hadi, yang kemudian menjadi Sultan Hadi menggantikan Raja Alam. Raja Alam dengan keluarganya dijadikan sandera oleh Belanda. Pemimpin tentara Belanda Kapten Anemaelt meminta agar Syarif Dakula dan orang-orang Bugis menghentikan perlawanan dengan jaminan keselamatan Raja Alam dan keluarganya. Untuk itu diminta Syarif Dakula dengan pengikutnya datang menghadap di kapal perang Belanda.

Syarif Dakula dan keluarganya datang di kapal Belanda. Di kapal perang Belanda itu Syarif Dakula berunding dengan tentara Belanda. Karena Syarif Dakula tetap tidak mau bekerjasama dengan Belanda, ia ditangkap dan diasingkan ke Makasar, sedangkan Syarif Dakula mengadakan perlawanan, hingga akhirnya tewas. Mayatnya dibuang ke laut. Melihat peristiwa itu, isterinya, Pangeran Ratu Ammas Mira yang sangat setia pada suaminya, melompat ke laut bersama-sama anaknya yang masih kecil. Ia dengan anaknya dapat diselamatkan. Karena Raja Alam dengan keluarganya antara lain putranya, Hadi Jalaluddin, Pangeran Ratu Ammas Mira, isteri dari Syarif Dakula, dianggap berbahaya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, mereka diasingkan ke Makasar sebagai tawanan negara (*staatgevangene*). Adapun Sultan Bongkoch, salah seorang putra Raja Alam dapat melepaskan diri.

Setelah perlawanan Raja Alam dengan sekutu-sekutunya berakhir, Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan perjanjian

dengan Sultan Gunung Tabur pada 27 September 1834 yang isinya sebagai berikut.¹²

- (1) Batu Putih dan Berau sebagai negeri yang dikalahkan, menurut hukum perang masuk dalam kekuasaan Belanda;
- (2) Sultan Gunung Tabur Aji Kuning berjanji akan melindungi keamanan kerajaan dan perdagangan dari bajak laut dan akan menaati segala perintah dari gubernur Belanda di Makasar, berjanji akan menyerahkan bajak laut dan setiap tahun akan mengirim utusan ke Makasar,
- (3) Lansekap Sambaliung atau Tanjung untuk sementara pengurusannya diserahkan kepada sultan Gunung Tabur sebagai *vazal gubernemen Hindia Belanda*, sebagai tanah pinjaman (*als vazal van het Ned. Ind. Gouv. en als leen*), dan
- (4) Sultan Gunung Tabur harus segera menghadap gubernemen Belanda di Makasar.¹³

Selama Raja Alam dalam pembuangan di Makasar sejak 1834, Kerajaan Berau menjadi tidak aman. Pengikut-pengikut Syarif Dakula dan Pangeran Petta melakukan pengacauan di perairan Selat Makasar dan kampung-kampung di daerah Berau. Sungai Ulak dahulu bekas pusat pemerintahan Kerajaan Berau, dirampok oleh suku Bugis dan Sulu. Kampung Pujut, wilayah Gunung Tabur, diserang sukubangsa Bugis. Muara Bangun, kedudukan Sultan Gunung Tabur, diserang sukubangsa Bugis dan Sulu. Pemimpin pejuang sukubangsa Bugis ialah Tuassa dan pemimpin bangsa Sulu yang mengadakan perlawanan terhadap kerajaan yang diakui Belanda sebagai jajahannya itu ialah Datu Kamsah.¹⁴

Untuk mengatasi keadaan yang selalu tidak aman itu, Sultan Gunung Tabur meminta bantuan ipar Raja Alam, saudara isterinya yang menjadi pangeran mangkubumi Kerajaan Kutai dan memerintah di Batu Putih. Pangeran ini hanya dapat bertahan selama dua tahun di Batu Putih. Untuk menenteramkan keadaan yang tidak ada kepastian itu, Sultan Gunung Tabur dan Pangeran Mangkubuuu bersama-sama mengajukan permohonan kepada gubernur Belanda di Makasar, supaya Raja Alam dengan

keluarga serta putra-putri dan cucunya dikembalikan ke Berau.

Permohonan ini disetujui oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada 15 September 1836. Setahun kemudian, pada 24 Juni 1837, gubernemen Belanda mengizinkan Raja Alam beserta keluarganya kembali ke Batu Putih dengan ketentuan Raja Alam harus mengakui kedaulatan Belanda. Raja Alam memindahkan ibukota kerajaannya dari Batu Putih ke Tanjung, daerah Kampung Bugis (Tanjung Redeb sekarang).

Antara kedua kerajaan itu yaitu Gunung Tabur dan Sambaliung selalu saja terjadi peperangan. Karena Raja Alam tidak dapat memenuhi perjanjian yang didiktekan Belanda, ia kembali ke Batu Putih dan meninggal pada 7 Juli 1848.¹⁵ Ia dimakamkan di dekat Sungai Rindang, dekat Batu Putih.

Putranya, Sultan Hadi Jalaluddin yang diangkat Belanda sebagai sultan Sambaliung sejak tahun 1844, meninggal pada tahun 1852. Pada akhir pemerintahannya, yang berpengaruh ialah saudaranya, Sultan Asyik Syarafuddin, putra Raja Alam dengan isterinya, putri dari Bugis yang menggantikannya pada bulan April 1850. Raja ini pada tahun 1852 berumur 38 tahun. Ia adalah seorang sultan yang berpengaruh, memerintah dengan tidak ada penguasa (*rijkbestierder*) di sampingnya. Sultan Bongkoch, putra Raja Alam yang sejak semula tidak dapat ditawan oleh Belanda, tetap tidak bersedia bekerjasama dengan Belanda dan terus berjuang mengadakan pengacauan bersama-sama pejuang Bugis dan Sulu di perairan Berau, Laut Sulawesi dan Selat Makasar.¹⁶

4.5 Perlawanan HA. Kuning Gunung Tabur

Setelah Aji Kuning Gunung Tabur meninggal dunia, ia digantikan oleh kemenakannya, Sultan Amirilmukminin, putra Raja Muda Si Bandang. Saudara Sultan Amiril dua orang laki-laki; seorang bernama Raja Alam dan seorang lagi bernama Raja Muda Si Kinarang. Pada waktu pemerintahan Sultan Amiril, tidak seorang pegawai berkembangsaan Belanda pun yang berdiam di Berau. Pemerintahan kerajaan langsung dilak-

sanakan oleh sultan dibantu para menteri serta pegawai kerajaan. Walaupun Sultan Aji Kuning Gunung Tabur telah menandatangani kontrak yang mengakui *suprematie* dari gubernemen Belanda, tetapi gubernemen belum mempunyai kemampuan untuk mencampuri pemerintahan kerajaan. Kekuasaan pemerintahan dan urusan perdagangan langsung ditangani oleh pemerintah kerajaan.

Di antara para pembesar yang berpengaruh ialah dua orang saudara sultan, yaitu Raja Alam dan Raja Muda Si Kinarang. Kedua pembesar ini tidak mau tunduk pada perjanjian dagang yang telah ditetapkan Belanda. Raja Alam dicap sebagai penjudi dan pemadat. Ia tidak dapat dipegang janjinya. Ia mempunyai hutang tetapi hanya dibayar dengan janji-janji saja. Perjanjian 27 September 1834 itu rupanya hanya di atas kertas saja. Pemerintah Kolonial Belanda tidak mempunyai wibawa terhadap Kerajaan Gunung Tabur dan Kerajaan Sambaliung.

Pada tahun 1876 Amiril meninggal dunia dan digantikan putranya, Sultan Hasanuddin. Pada masa ini sering kali terjadi peperangan kecil dengan Kerajaan Sambaliung, tetapi kemudian dapat didamaikan oleh asisten residen dari Samarinda.¹⁷⁾

Pada tahun 1882, Sultan Hasanuddin Gunung Tabur, meninggal dunia dan digantikan oleh sepupunya, Aji Kuning, putra Raja Alam Gunung Tabur. Pada masa pemerintahan Aji Kuning ini, hubungan kerajaan dengan gubernemen Belanda kurang serasi. Setelah Aji Kuning menunaikan ibadah haji, kecurigaan Belanda semakin bertambah. Sultan Haji Aji Kuning kemudian pindah ke Sambaliung diiringi para pangeran, dan para pembesar kerajaan. Rakyat juga turut pindah ke Kerajaan Sambaliung dan membuat kampung di Tanjung Baru, Karang Embun, Gurimbang, Bebanir, dan Sepinang.¹⁸ Masalah pokok yang menyebabkan Belanda tidak senang ialah, karena Aji Kuning adalah seorang raja yang tidak mau menurut kehendak gubernemen Belanda. Ia berpendirian bahwa Kerajaan Gunung Tabur dengan gubernemen adalah dua pemerintahan yang menghormati persahabatan. Gubernemen tidak berhak mencampuri urusan

pemerintahan kesultanan misalnya pengangkatan atau penggantian sultan. Menurut adat istiadat kerajaan, Aji Kuning berhak menjadi sultan. Sebagian besar rakyat menyetujui kepemimpinannya sebagai raja. Tidaklah wajar apabila gubernemen Belanda mencampuri persoalan adat. Tindakan gubernemen dengan menggunakan kekuatan senjata tidak dapat diterima dengan akal sehat.

Sementara itu tersiar berita bahwa mantan wali negara Gunung Tabur telah mengadakan komplotan dengan Haji Aji Kuning di Sambaliung untuk mengadakan perlawanan terhadap gubernemen. Karena itu mulai 1 Mei 1887 pemerintah memperkuat penjagaan dengan mengganti kepala pos penjagaan pribumi dengan seorang kontroler Belanda.¹⁹ Dengan demikian setiap saat gubernemen dapat mengawasi tindak-tanduk bekas wali negara Kerajaan Gunung Tabur. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban di daerah Berau, sebelum Pemerintah Kolonial Belanda bertindak dengan kekerasan, dianjurkan melalui penguasa Kerajaan Sambaliung, agar bekas wali negara Haji Aji Kuning meninggalkan Berau. Dengan diiringkan para keluarganya yang setia Haji Aji Kuning meninggalkan Berau dan kemudian menetap di Tanah Kuning, perbatasan antara Kerajaan Bulungan dan Berau.

4.6. Perlawanan Abad Ke-20 (1900 – 1945)

4.6.1 Perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda

Kalau tadinya perjuangan untuk mengusir penjajah bangsa Eropa di seluruh Nusantara dilakukan secara lokal, mulai abad ke-20 para pemimpin mulai mengubah siasat perjuangannya. Kaum intelek mulai insyaf akan kesalahan siasat perjuangannya untuk melawan imperialisme dan kolonialisme.

Untuk membangun kekuatan yang besar, perlu menggalang kesatuan segenap suku bangsa di seluruh Nusantara. Dengan gagasan tersebut, maka terbentuklah organisasi-organisasi sosial dan politik seperti Budi Utomo dan SDI yang kemudian menjadi Partai Sarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lain-

lain. Masa ini disebut zaman kebangkitan nasional. Salah satu organisasi politik yang dapat menggerakkan dan menggelorakan hati nurani bangsa Indonesia ialah Partai Sarikat Islam. Hal itu disebabkan azas perjuangan organisasi ini sesuai dengan dasar keyakinan Agama Islam yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka merasa terpanggil untuk menjadi anggota Sarikat Islam. Hampir setiap pelosok tanah air berdiri cabang Sarikat Islam seperti di Banjarmasin, Pasir, Samarinda, dan di daerah Berau:

Pada tahun 1914 di Samarinda berdiri cabang Sarikat Islam. Di daerah-daerah lain pun Sarikat Islam lokal berdiri dan mendapat pengarahannya dari pemerintah.²⁰ Di daerah Berau berdiri cabang Sarikat Islam dengan pusatnya di Tanjung Redeb. Organisasi ini dapat berkembang dengan pesat karena tokoh-tokoh agama dan para bangsawan memasuki organisasi ini. Di antara tokoh-tokoh agama yang memimpin Sarikat Islam ialah Kadhi Kerajaan Sambaliung Haji Abdullah, Haji Junait, Pembekal Anang Dahlan dari Tanjung Redeb, Raden Kelana, Pangeran Perojo, Datu Bendahara dari Gunung Tabur, Datu Maharaja Dinda, dan Datu Raja Aji Raden Saparta dari Sumbaliung. Dengan masuknya tokoh-tokoh ini, seluruh kawasan Berau yang beragama Islam menjadi anggota Sarikat Islam. Sampai sekarang masih terdapat bekas gedung Sarikat Islam di Tanjung Redeb. Di Teluk Bayur, daerah perusahaan batubara SMP (*Steenkolen Maatschappij Parapatan*) tidak terkecuali terdapat pula anggota Sarikat Islam. Untuk memantapkan azas dan tujuan Sarikat Islam menggalang kesatuan dan persatuan, kaum muslimin pribumi, peranakan Cina, dan Arab memberikan pengarahannya perjuangan Sarikat Islam. Setiap tahun diadakan Kongres Sarikat Islam di Banjarmasin.

Di bawah pimpinan Maraja Sayuti Lubis dan Presiden Sarikat Islam Haji Muhammad Arif,²¹ Sarikat Islam Banjarmasin menjalin kerja sama dengan CSI dan PSI. Penduduk pribumi, Cina dan Arab bekerjasama mengadakan propaganda secara pesat. Setiap 31 Agustus diadakan kongres nasional di Kaliman-

tan. Sifat perkumpulan itu berubah menjadi gerakan nasional yang bertujuan untuk mengubah keadaan. Berhubung dengan sifat kegiatan perkumpulan itu, Tjokroaminoto dilarang mengunjungi Kalimantan.

Sayuti Lubis pindah ke Samarinda. Sarikat Islam mulai menunjukkan kegiatannya dengan semacam Biro Pengaduan tentang pajak-pajak yang tinggi, kerja rodi yang berat, dan berbagai tindakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat. Diterbitkan pula sebuah surat kabar bernama *Persatuan* yang tulisan-tulisannya membangkitkan semangat kebangsaan dan semangat persatuan untuk menyusun kekuatan guna mengubah perbaikan nasib bangsa Indonesia. Di daerah Kutai dan Berau dibuka tambang batubara untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi kapal-kapal KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschappij*); sebuah perusahaan pelayaran Belanda terbesar yang melayani pelayaran antarpulau di Nusantara.

Batubara ditambang oleh *Steenkolen Maatschappij* di daerah Kutai. Selanjutnya penambangan batubara "Parapatan" di Kerajaan Sambaliung (Berau) ditambang oleh Tuan Cools.²²

Pertambangan batubara Parapatan yang diusahakan Tuan Cools ini kemudian diambilalih oleh KPM dengan ganti rugi. Mulai saat itu perusahaan tambang batubara diperbesar dan dieksploitasi dengan alat-alat modern. Untuk pekerjaan itu mendatangkan buruh dari Pulau Jawa. Buruh-buruh itu dikontrak untuk beberapa tahun. Mereka tidak boleh berhenti sebelum kontraknya habis atau disebut *kuli kontrak*. Mulai pukul 07.00 sampai pukul 17.00 para buruh harus bekerja di dalam tambang berpuluh-puluh meter di bawah tanah. Selanjutnya diganti oleh buruh-buruh yang bekerja malam sampai pagi. Mereka harus bekerja keras memecah batubara dan mengangkutnya ke dalam lori di dalam kegelapan yang hanya diterangi lentera-lentera di kepala. Gaji yang diterima tidak seimbang dengan waktu dan tenaga yang diperas dari para buruh itu. Karena itu banyak buruh yang melarikan diri sebelum kontraknya habis. Apabila mereka tertangkap oleh *opas-opas*

(polisi) Belanda, mereka dipukuli kemudian dipenjarakan di rumah penjara kolonial Belanda tanpa diadili.

Perlakuan sewenang-wenang ini sangat melukai hati kaum nasionalis yang tergabung dalam Serikat Islam. Di antara pekerja pekerja batubara itu terdapat juga kaum intelek dari Jawa yang bekerja sebagai inspektur polisi, perawat rumah sakit, dan sebagai staf di kantor-kantor perusahaan itu. Karena selalu pulang-balik ke Jawa, mereka sering mendengar dan menyaksikan sendiri gerakan kebangsaan yang menentang perbuatan yang sewenang-wenang dari Pemerintah Kolonial belanda.

Anggota Serikat Islam yang bekerja secara bawah tanah untuk menggembleng semangat perjuangan kebangsaan di Tanjung Redeb dan Teluk Bayur akhirnya bisa mempengaruhi jiwa mereka. Ketidaksenangan para buruh tersebut pada tahun 1926 meningkat menjadi kemarahan dan keberanian. Mereka mengadakan pemogokan dan demonstrasi. Mereka tidak mau bekerja sebelum ada perbaikan jam kerja dan upah yang wajar.

Di pertambangan batubara N.V. Steenkolen Maatschappij Parapatan di Teluk Bayur terjadi kerusuhan pada 6 dan 7 November 1926. Kerusuhan itu baru dapat dipadamkan setelah pihak serdadu kolonial Belanda menembaki masyarakat yang berkerumun. Kerusuhan ini tidak ada hubungannya dengan politik.²³ Menurut saksi mata yang turut menyaksikan kerusuhan itu, selama dua hari itu pihak perusahaan tidak dapat menguasai keadaan, sehingga manager tambang batubara itu meminta bantuan Pemerintah Belanda untuk mendatangkan serdadu Belanda dan mengancam akan menindak mereka dengan senjata, tetapi para buruh melempari serdadu-serdadu itu dengan batu. Dengan kejamnya tentara Belanda menembaki khalayak ramai dengan peluru tajam. Berpuluh puluh rakyat luka dan tewas. Semua korban kemudian diangkut Belanda secara sembunyi-sembunyi dengan tidak diberitakan berapa jumlahnya.

Sebagai akibat kerusuhan di perusahaan tambang batubara itu, Partai Serikat Islam dilarang mengadakan kegiatan. Dengan

dibekukannya Partai Sarikat Islam di kawasan daerah Berau, kaum nasionalis banyak bergerak di bawah tanah. Mereka tidak putus asa untuk tetap menggerakkan semangat rakyat berorganisasi. Mereka mengubah siasatnya dan bergerak di bidang sosial. Mereka mengajak rakyat untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan hadis Nabi serta ajaran Al Qur'an.

Tokoh Muhammadiyah dari Sumatera bernama Yahya Siregar dan Maksum dari Banjarmasin mendirikan cabang Muhammadiyah dengan bantuan mantan tokoh Sarikat Islam seperti Haji Abdullah, kadhi Sambaliung, Haji Datu Raja, menteri Kerajaan Sambaliung, A.R. Perwira, kepala SDN Sambaliung, A.R. Suparta seorang pedagang, Soetomo, pensiunan kepala Distrik Tanjung Redeb, dan penghulu Anang Kuyak Teluk Bayur. Pada tahun 1928 mereka mendirikan Sekolah Muhammadiyah dan HIS Partikulir di Tanjung Redeb. Dengan didirikannya cabang-cabang organisasi Muhammadiyah di Banjarmasin dan di Amuntai, maka gerakan modernisasi Islam memasuki daerah ini. Cabang-cabang Muhammadiyah didirikan di Banjarmasin, Martapura (Riam Kanan), Kandangan Alabio, Rantau, Kuala Kapuas, Sampit, Samarinda, dan Tanjung Redeb, Balikpapan.²⁴

Pemuka-pemuka aliran tua mendirikan Nahdatul Ulama dan mengadakan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama. Gedung dan sekolahnya dibangun di Jalan Tanjung Redeb. Mereka yang beraliran maju mendirikan HIS partikulir. Di antara alumennya kemudian meneruskan di MULO Malang dan seorang lulus *Rechts hooge School* di Betawi (Jakarta). Beberapa orang di antaranya meneruskan ke sekolah perguruan di Makasar.

Demikianlah rakyat Berau membentuk dan memajukan pemuda-pemuda mereka sebagai kader perjuangan untuk mengubah keadaan karena penjajahan di daerah Berau. Lulusan yang mendapat didikan barat inilah yang kemudian mengadakan perlawanan dengan gerakan di bawah tanah melawan Pemerintah Jepang.

4.7. Perlawanan terhadap Pemerintah Jepang (1942 - - 1945)-

Setelah lapangan udara tentara Belanda di Tarakan dan di Samarinda II (Melak) dapat dihancurkan oleh angkatan udara tentara Jepang, pada bulan Januari 1942, tambang minyak Pulau Tarakan diduduki angkatan laut Jepang. Kota Tanjung Selor dan Tanjung Redeb kemudian jatuh pula ke tangan mereka. Berturut-turut daerah-daerah lain di Indonesia Bagian Timur satu demi satu dapat diduduki angkatan laut Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada angkatan perang Jepang di Kalijati, Bandung. Seluruh Indonesia secara resmi mengakui kekuasaan angkatan perang Jepang.

Seperti di tempat-tempat lain, rakyat kecil memuji-muji angkatan perang Jepang yang telah mengalahkan tentara Belanda dengan sekutu-sekutunya Inggris dan Amerika di Asia Timur Raya termasuk Indonesia. Mereka menyambut dengan gembira. Bangsa Jepang dianggap sebagai juru selamat yang membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan dan akan membawa rakyat ke pintu kemakmuran dan kebahagiaan. Rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan selama penjajahan Belanda menginginkan perubahan kehidupan yang makmur dan bahagia. Dalam pikiran mereka terlintas gagasan bahwa Pemerintah Jepang akan mengirimkan barang-barang melimpah ruah dengan harga yang murah.

Pada mulanya tentara Jepang bersikap simpatik pada rakyat. Di mana-mana mereka giat berpropaganda, bahwa kemenangan pasti di pihak angkatan perang Jepang, *Teikoku*. Tetapi kenyataan adalah sebaliknya. Baru setahun lebih Berau diduduki tentara Jepang, barang-barang keperluan hidup sehari-hari di toko-toko kian menipis, dan akhirnya kosong sama sekali. Kapal-kapal yang membawa barang dagangan dari Samarinda, Donggala, Makassar, dan Surabaya dapat dikatakan tidak datang lagi. Semua kapal KPM (satu-satunya maskapai pelayaran Belanda yang memegang monopoli pelayaran di Indonesia pada zaman penjajahan) telah mengalihkan pelayarannya ke luar negeri.

Angkatan Perang Jepang tidak mempunyai kesempatan memikirkan keperluan rakyat. Mereka sedang berperang sehingga harus memusatkan pikiran dan mengarahkan segala kekuatannya untuk menghadapi angkatan perang Sekutu. Kabupaten Berau bukan daerah yang bisa berswasembada. Makanan terutama beras, gula, dan lain-lain harus didatangkan dari daerah lain. Hasil hutan seperti damar, tengkawang, rotan, kayu dan lain-lain tidak laku lagi karena pedagang-pedagang hasil hutan antarpulau telah menghentikan kegiatannya. Pengumpul hasil hutan dan pedagang mengalihkan kegiatannya pada bertani dan berkebun.

Blokade Sekutu semakin hebat. Pada akhir tahun 1943 Laut Sulawesi dan Selat Makasar sepenuhnya dikuasai kembali oleh angkatan laut Sekutu. Kapal selam Amerika sekali-sekali muncul di permukaan Selat Makasar dekat Tanjung Mangkalihat, wilayah Berau. Hubungan Berau dengan daerah lain dapat dikatakan terputus sama sekali. Kapal-kapal Jepang banyak yang ditenggelamkan Sekutu, baik oleh kapal selam maupun oleh angkatan udara Sekutu. Armada Jepang menjadi lumpuh, hanya perahu kumpit sukubangsa Bajau dan perahu layar sukubangsa Bugis yang berani berlayar menghubungkan Sulawesi dan Kalimantan dengan membawa makanan ke Berau.

Bukan saja rakyat, tetapi tentara Jepang mengalami kekurangan makanan. Karena menghadapi kesukaran itu, tentara Jepang mulai memaksa rakyat menjual kebutuhan pokok seperti padi, ayam, telur ayam, dan minyak makan dengan uang kertas Jepang yang tidak bernilai di mata rakyat. Jepang membentuk suatu badan yang bernama *Yakaten*, yang mengumpulkan makanan untuk keperluan tentara Jepang dan sebagian dibagikan kepada rakyat dengan memakai kupon. Siapa yang berani menentang peraturan seperti tidak mau menjual padi atau keperluan lain yang ditentukan oleh Jepang, dicap anti Jepang dan diancam hukuman mati.

Sebagai kepala pemerintahan sipil diangkat seorang *kanrikan* sebagai ganti kontroler di zaman penjajahan Belanda. Pega-

wai-pegawai sipil Indonesia di zaman Belanda masih dipergunakan. Kedua sultan Gunung Tabur dan Sambaliung dengan pegawai-pegawainya masih dipakai Jepang, tetapi kedua pembesar Indonesia ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sultan Gunung Tabur dibantu oleh dua orang asisten wedana, yaitu asisten wedana Gunung Tabur dan sisten wedana Pulau Derawan. Sultan Sambaliung dibantu oleh asisten wedana Sambaliung dan asisten wedana Talisayan.

Pemuda-pemuda dan pegawai-pegawai diwajibkan masuk *seinendan*; suatu organisasi yang bersifat semi kemiliteran. Mereka diajar baris berbaris secara serdadu Jepang. Pemuda-pemuda dipaksa masuk organisasi bernama *Fujinkai* yang bertujuan membantu Jepang di garis belakang. Wanita-wanita muda yang turun-temurun hidup mewarisi adat tradisi, dipaksa ke-jepang-jepangan sehingga rakyat tidak senang. Selain dengan perantara *Yakaten*, kepada lurah-lurah diinstruksikan juga untuk mengumpulkan padi rakyat yang kadang-kadang tak dibayar. Karena keadaan ekonomi yang sudah sulit, ditambah pula kewajiban untuk menyerahkan padi pada Jepang, rakyat semakin susah dan melarat.

Rakyat tidak berani mengadakan perlawanan, sebab apabila ada satu atau dua orang warga kampung yang membangkang dan memelopori perlawanan, maka seluruh kampung akan dibumihanguskan. Semua penduduknya akan menjadi korban termasuk yang tidak berdosa. *Kempetai* (dinas rahasia Jepang) dibantu oleh *jum-po-jum-po* (polisi rahasia Indonesia) yang bekerja untuk Jepang, selalu siap mencari berita dan mengawasi sikap rakyat yang berani menentang kebijaksanaan Pemerintah Jepang; bahkan yang berani mencela dan mengejek Jepang akan ditangkap dan dibunuh. Di antara kaki tangan Jepang yang terkenal banyak memfitnah rakyat Berau ialah Raden Sukarna dan seorang *jum-po* bernama Garuda. Setelah Jepang menyerah, *jum-po* Garuda ditangkap dan dibunuh rakyat.

Kaki tangan Jepang inilah yang menggembor-gemborkan semboyan "Tiga A", yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. *Nippon Teikoku, Dai Toa* pasti mencapai kemenangan terakhir dan akan menghancurkan musuh Asia, Inggeris, Belanda serta Amerika. Tetapi semboyan demikian tidak mempan lagi di hati rakyat. Perut yang lapar tidak akan kenyang dengan di-uruk mengucapkan dan mendengarkan semboyan-semboyan kosong.

Sebagian dari golongan nasionalis terpelajar seperti dr. Lukardi, kepala Rumah Sakit Berau, Abidinsyah, asisten wedana Sambaliung, Aji Berui Massuarno, asisten wedana Talisayam, Haris asisten wedana Gunung Tabur, Datu Said Agil, putra Sultan Sambaliung, Raden Katamsi, Ibrahim Effendi, Haji Aji Umar, dan Tan Kim Long berpendapat bahwa pemerintah sebagai rezim fasis, tidak mungkin akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Setinggi-tingginya hanya akan memberikan pemerintahan otonomi yang merupakan bagian dari Dai Toa. Besar kemungkinan dr. Lukardi mempunyai hubungan dengan gerakan bawah tanah di Banjarmasin yang dipimpin oleh dr. Soesilo, inspektur Kesehatan Rakyat Kalimantan yang juga menjadi korban pembunuhan Jepang bersama pengikut-pengikutnya di daerah itu.

Haji-haji yang taat beribadat sangat jengkel terhadap tindak tanduk Jepang, karena dipaksa menyembah bendera Jepang dan karena murid-muridnya setiap hari dipaksa menghormati bendera di sekolah-sekolah.

Setelah kaum nasionalis di Banjarmasin ditangkap Jepang dan dibunuh secara massal, di antaranya dr. Susilo, lalu menyusul pembunuhan massal di Pontianak. Tibalah gilirannya penangkapan besar-besaran di Tanjung Redeb dan Sambaliung serta di Gunung Tabur. Mereka yang ditangkap adalah dr. Lukardi seke-luarga, Abidinsyah, asisten wedana Sumbaliung, Haris, asisten wedana Gunung Tabur, Datu Said Agil, putra Sultan Sambaliung, Haji Aji Umar, Raden Katamsi, Ibrahim Effendi, Tan Kim Long, Po Beh Wat, Aji Mamai, Abdul Manan, Abdul Manap

Usman Anang Kocot, dan lain-lain.

Pada akhir tahun 1944 tiba sebuah kapal perang Jepang di Talisayan untuk menangkap Asisten Wedana Aji Berni Mas-suarno dengan warga di Kampung Biduk-biduk, Labuan Kelembu, dan Kelindakan antara lain tokoh-tokoh masyarakat Wa Burhan, Kaldak Nanang dengan pengikut-pengikutnya sebanyak 45 orang. Mereka dicurigai selain mempunyai hubungan dengan gerakan bawah tanah pimpinan dr. Lukardi dengan kawan-kawan juga didakwa mempunyai hubungan dengan kapal selam Sekutu di Tanjung Mangkalihat. Mereka dibawa ke Balikpapan. Beberapa minggu kemudian datang pula sebuah kapal perang untuk melakukan penangkapan. Kali ini sekitar 15 orang dan dibawa ke Balikpapan. Ketigakalinya dikirim pula sebuah kapal perang Jepang tetapi kapal ini tidak sempat melakukan penangkapan karena ditenggelamkan angkatan udara Sekutu di Tanjung Mangkalihat.

Pada bulan Mei 1945 angkatan perang Sekutu menduduki kota minyak Tarakan. Beberapa orang Berau berkata, "Bilamana rakyat di Berau ini memakan susu mentega seperti rakyat Tarakan." Pembicaraan ini disampaikan oleh *jumpro-jumpro* tentara Jepang. Seorang haji bernama Debab dengan kawan-kawannya ditangkap *kempetai* tanpa diadili, kemudian dibunuh oleh tentara Jepang. Semakin mendekati akhir kekalahannya, *Kempetai* Jepang semakin ganas menangkap rakyat. Rakyat ditangkap dan dibunuh tanpa diadili.

4.7.1 Perlawanan di Kampung Biduk-biduk, Kecamatan Talisayan

Setelah penangkapan secara massal di Kecamatan Talisayan, rakyat menunggu kesempatan yang baik untuk melakukan pembalasan. Ketika Jepang mendekati akhir kekalahannya, pada bulan Juli dan Agustus 1945, penduduk Kampung Biduk-biduk mengundang tentara Jepang yang menjaga pos di kampung itu untuk selamatan. Mereka menyediakan nyiur muda yang menjadi kegemaran orang Jepang. Ketika sedang asyik meminum nyiur muda, orang-orang Jepang itu diserang sehingga tiga orang

tentara Jepang tewas. Perlawanan seperti ini dilakukan juga oleh penduduk Bulalung di Kecamatan Tanjung Batu (Derawan).

4.7.2 Perlawanan di Kampung Tabassau, Kecamatan Gunung Tabur

Selain bertindak sendiri, tentara Jepang juga mempergunakan polisi rahasia Indonesia yang disebut jumbo-jumbo dengan pemimpinnya Raden Sukarna, Garuda, dan lain-lain. Beberapa orang mengambil kesempatan keuntungan pribadi, Lurah-lurah juga terpedaya propaganda Jepang dan kaki tangannya. Seorang lurah di Kampung Tanjung Baru dengan beberapa warga kampungnya yang dapat dipengaruhi para jumbo, diperintah Jepang untuk mengumpulkan padi, ayam, telur di kampung-kampung. Di Kampung Sukan, lurah tersebut melakukan perampasan dan pembakaran rumah yang ditinggalkan penduduknya, karena takut pada tentara Jepang. Ketika lurah Tanjung Baru itu hendak melakukan perampasan terhadap makanan rakyat di Kampung Tabassau, rakyat dengan dipimpin oleh Raden Nata mengadakan perlawanan, sehingga lurah itu dengan lima orang anak buahnya mati dibunuh oleh rakyat. Yang lain sempat melarikan diri ke Tanjung Redeb. Jepang dengan jumbo-jumponya tidak berani melakukan pembalasan.

4.7.3 Akhir Masa Jepang

Setelah tentara Jepang meninggalkan Berau menuju Kutai melalui Muara Lesan di udik Sungai Kelay Sambaliung, jumbo-jumbo polisi rahasia dan kaki tangan Jepang ditangkap dan diadili rakyat. Seorang jumbo bernama Garuda ditangkap dan dibunuh rakyat. Raden Sukarna melarikan diri, dan sampai sekarang tidak diketahui ke mana perginya. Beberapa orang tokoh yang mendapat kedudukan yang baik pada waktu pemerintahan Jepang ditangkap dan ditahan di Tarakan.

Korban kekejaman tentara Jepang di Berau tercatat antara 500 sampai 600 orang. Tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh masyarakat yang menjadi korban antara lain ialah: dr. Lukardi dan keluarga, Datu Said agil putra sultan Sambaliung, Abidinsyah

asisten wedana Sambaliung, Aji Berni Massuarno asisten wedana Talisayan, Haris asisten wedana Gunung Tabur, Raden Katamsi kepala perawat rumah sakit, Haji Aji Umar Gunung Tabur, Ibrahim Effendi menteri kehutanan Tanjung Redeb, Haji Debab Tanjung Redeb, Tan Kim Long, Tanjung Redeb, M. Yunan Tanjung Redeb, Abdul Manan Tanjung Redeb, Matseh klerk Tanjung Redeb, Po Beh Wat Tanjung Redeb, Aji Mamai bin Aji Kuning, Anang Kocot, dan Abdul Manap Tanjung Redeb.

CATATAN

1. J.S. Krom, *Memorie van overgave*, Kantor Controleur Tanjung Redeb, 1940. hal. 41
2. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.* halaman 3.
3. J.S. Krom, *Sultan Ahmad Maulana; Sultan Aminudin c. catatan Silsilah Berau*.
4. Dr. J. Eisenberger, *Loc. cit.*
5. J. Hageman Joz: *Aanteekeningen omtrent een ge deelte van der Ooskust van Borneo*, TNI. 4, 1883, halaman 88.
6. Dr. J. Eisenberger; *op. cit.* hal. 21, 22
7. *Ibid*, halaman 17
8. J. Hageman, *op. cit.* hal. 104
9. *Catatan ringkas Sejarah Samarinda Seberang*, Samarinda 1882, hal 3.
10. Dr. J. Eisenberger; *op. cit.* hal. 21, 22.
11. J. Hageman, *op. cit.* hal. 102
12. *Ibid*, halaman 102
13. J. Hagemen, *op. cit.* hal. 103.

14. H. van Hoevell, "*Aanteekeningen omtrent de Noordkust van Borneo*" *TBG*, 4, 1885, halaman 426
15. J. Hageman: *op. cit.* hal. 88
16. *Ibid*, hal.99
Raja-raja berikutnya adalah Asyih Syarafuddin (meninggal tahun 1869), Sultan Adil Jalaluddin (meninggal tahun 1881), Sultan Bayanuddin (meninggal tahun 1902), dan Sultan terakhir Moh. Aminuddin memerintah sampai tahun 1860.
17. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.* hal. 64.
18. *Ibid*, hal. 72
19. *Ibid*, hal. 76
20. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.*, halaman 94
21. *Ibid*, halaman 102
22. *ibid*, halaman 92
23. *Ibid*, hal. 104, 105
24. *Ibid*, halaman 105

BAB V PENUTUP

Perlawanan rakyat Kalimantan Timur adalah reaksi terhadap politik Belanda yang berusaha dengan kekerasan militer untuk menyatukan wilayah jajahannya. Reaksi terhadap politik Belanda ini dimulai pada abad ke-17 sampai abad ke-20. Seluruh kerajaan di Kalimantan Timur bangkit melawan usaha yang dilancarkan oleh Belanda.

Perlawanan rakyat Kalimantan Timur merupakan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan daerah-daerah lainnya. Tujuannya sama, yaitu menentang imperialisme Belanda. Cara perlawanan pada beberapa daerah berbeda-beda, tetapi hakekat dari perlawanan sama, yaitu jiwa patriotik dalam menentang imperialisme dan kolonialisme.

Pengertian nasional didasari adanya rasa kesatuan dan prinsip yang sama dalam menentang penjajahan.

Pengaruh pergerakan nasional yang timbul di Pulau Jawa juga sampai ke pelosok Kalimantan Timur yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat politik maupun sosial seperti Partai Sarikat Islam, PARINDRA, GERINDO, Muhammadiyah, dan NU, yang begitu cepat mendapat tempat di hati rakyat di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurahman A.R., *Aji Nyesei Pangeran Raja Muda Kerajaan Pasir*, Catatan Sejarah Kerajaan Pasir, koleksi Mohd. Noor ex Asisten Perw. Dep. P dan K. Prop. Kaltim di Samarinda.
2. Aji Bambang Abdurrahman, *Sedikit Catatan Sejarah Kutai*.
3. Endo Harjasöewita, *Sejarah Indonesia jilid III*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
4. Eisenberger Dr. J., *Kroniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*, Banjarmasin 1936, halaman 3.
5. Hageman Joz J., *Aanteekeningen omtrent een gedeelte van der Oostkust van Borneo*, Tijdschrift Indische Taal en Land Volkenkunde deel. 4, 1885.
6. I Kiranan Ranreng Daeng Risompa, *Catatan Sejarah Ringkas Kedatangan orang Bugis di Samarinda*, koleksi Mohd. Noor ex Asisten Perw. P dan K. Prop. Kaltim di Samarinda.
7. Krom J.S., *Memorie Overgave dan Overname*, Ktr. Controleur Tanjungredek Kaltim., 1940.
8. Krom J.S., *Achmad Maulana Sultan Tabur, Muhammad Aminuddin Sultan Sabaliung cs.*, Silsilah Kerajaan Berau,

killeksi Mohd. Noor ex Asisten Perwakilan Dep. P dan K.
Prop. Kaltim di Samarinda.

9. Mees Dr. C.A., *Kroniek van Koetei*, N.V. Uitgeverij/Mees H.C.A. Santpoort.
10. Muhammd Tayeb E., *Silsilah Kerajaan Kutai Kertanegara Kraton Kutai 1284 H.*
11. Proyek Penelitian dan Pncatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Kaltim*, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen P dan K, 1978.
12. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Sumatera Barat*, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Dep. P dan K, 1978.
13. *Terjemahan Lontara Kedatangan Suku Bugis di Samarinda*, oleh I Kirana Kapitan Renreng Daeng Risompa, koleksi Mohd. Noor eks Asisten Perw. Dep. P dan K. Bidang Kebudayaan Provinsi Kaltim di Samarinda.
14. S.C. Knappert, *Beschrijving van de Onderafdeeling van Koetei*, Martinus Nijhoff, Gravenhage 1905.
15. Von de Wall, *Aanteekeningen Omtrent de Noordoostkust van Borneo*, Tijdschrift Bataviaasche Genootschap (T.B.G.) deel 4.
16. Weddik A.L., *Beknopl Overzicht van Het Rijk van Koetei*, Indische Archief, 1 ste jaargang deel 1, 1849.

Perpustakaan
Jenderal

95